

sih widan

PENGAYOM

Dalam Sastra Jawa Modern

072

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PUSAT BAHASA
BALAI BAHASA YOGYAKARTA

**PENGAYOM DALAM
SASTRA JAWA MODERN
STUDI KASUS PERIODE 1981-1997**

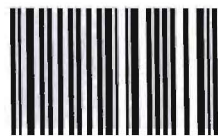
Sri Widati

**HADIAH
BALAI BAHASA YOGYAKARTA**



**PERPUSTAKAAN
PUSAT BAHASA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PUSAT BAHASA
BALAI BAHASA YOGYAKARTA
2005



00005146

PERPUSTAKAAN PUSAT BAHASA

Klasifikasi PB 899-231 072 WID P	No. Induk : 151 Tgl. 19/5/2006 Ttd. :
--	---

PENGAYOM DALAM SASTRA JAWA MODERN

Studi Kasus Periode 1981-1997

Penulis:

Sri Widati

Editor:

Slamet Riyadi

Penerbit:

Balai Bahasa Yogyakarta

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070, Faksimile (0274) 580667

Pencetak:

GAMA MEDIA

Jalan Lowanu 55, Yogyakarta 55162

Telepon/Faksimile (0274) 384830

ISBN 979-8477-04-9

Sanksi Pelanggaran Pasal 72:

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997
tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PENGANTAR

KEPALA BALAI BAHASA YOGYAKARTA

Balai Bahasa Yogyakarta mempunyai keinginan meningkatkan mutu bahasa dan apresiasi sastra Indonesia dan Jawa di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam mewujudkan keinginan itu dilakukan kegiatan yang terkait, yaitu pengkajian, pengembangan, dan pembinaan. Target peningkatan mutu dan apresiasi dilakukan melalui prosedur tiga hal itu, yaitu hal yang aktual diteliti, hasil penelitian dikembangkan, dan hasil pengembangan dipergunakan sebagai bahan pembinaan kepada masyarakat luas.

Kenyataan menunjukkan bahwa sikap positif masyarakat terhadap bahasa dan sastra Indonesia dan Jawa perlu ditingkatkan. Pemakaian bahasa yang ikut-ikutan, pemahaman sastra yang menganggap sastra hanya sebagai hiburan, ketidakpedulian masyarakat mengenai bahasa dan sastra Jawa merupakan bukti kebenaran pernyataan itu.

Terbitan ini merupakan hasil penelitian mandiri dari para peneliti Balai Bahasa Yogyakarta. Diharapkan terbitan ini dapat memperkaya deskripsi mengenai bahasa dan sastra, yang kemudian dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat.

Syamsul Arifin

UCAPAN TERIMA KASIH

Perkembangan kesenian --termasuk juga sastra-- pada umumnya dianggap jatuh dari langit dan selanjutnya mengalir dengan sendirinya, kemudian tiba-tiba sudah sampai di tangan pembaca dalam sebuah bentuk jadi. Padahal, fakta yang sebenarnya bukan seperti itu karena sebuah karya seni tidak dapat lahir dari kondisi budaya yang kosong. Ketidaktahuan masyarakat tentang hal itu disebabkan oleh proses kehadiran seni --dan juga sastra-- yang tersembunyi di balik sistem sastra (Jawa), tetapi kehadirannya tidak dapat diabaikan. Misalnya, perihal "pengayom" atau *patron*, atau *maecenas* --yang merupakan faktor amat penting bagi kehadiran sastra-- itu jarang sekali dibicarakan orang. Pada umumnya, masyarakat baru tersadar akan pentingnya pengayom atau *patron* setelah terjadi kelesuan dinamika sastra, atau penyimpangan-penyimpangan bentuk dan substansi sastra, misalnya pada periode "*Sastra Picisan*" tahun 1960-an—awal 1970-an. Pada situasi seperti itulah kehadiran pengayom mendapat perhatian. Selepas situasi itu, biasanya, kehadiran pengayom terabaikan lagi. Padahal, pengayom merupakan salah satu faktor internal yang penting dalam kehidupan sastra, atau kesenian pada umumnya. Sebagai contoh ialah kehadiran pengayom di sepanjang periode "1981-1997" yang merupakan periode akhir pemerintahan Orde Baru. Periode itu dikenal sebagai periode "penghapusan

budaya etnis" yang amat *plural* atau majemuk itu menjadi periode *monoculture*, yang disebut "budaya Indonesia".

Berangkat dari pentingnya dan tersembunyinya masalah pengayom dalam perkembangan sastra Jawa, maka penelitian berjudul "Pengayom dalam Sastra Jawa Modern: Studi Kasus Periode 1981-1997" ini pada tahun 2000 kami lakukan secara mandiri. Dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif penelitian ini menghasilkan temuan-temuan signifikan yang membantu mengurai ujung dari gumpalan benang-benang kusut di sekitar kepengayoman sastra Jawa modern, khususnya pada periode 1981-1997. Misalnya, tentang para pengayom, sistem di dalam lembaga-lembaga pengayom, dan bentuk kepengayoman masing-masing.

Kami berharap bahwa hasil penelitian yang masih amat elementer ini dapat membuka minat untuk penelusuran elemen makro-sastra Jawa modern lainnya yang masih jarang dijamah. Karena waktu penelitian yang relatif sempit, kami berharap akan ada masukan yang bersifat membangun, demi lebih baiknya buku ini.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Kepala Balai Bahasa Yogyakarta hingga hasil penelitian ini dapat terbit. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Prof. Dr. Rachmat Djoko Pradopo yang telah membaca hasil penelitian ini dan memberikan catatan di sana-sini sehingga akhirnya dapat terbit menjadi buku.

Wassalam.

Penulis

DAFTAR ISI

PENGANTAR Kepala Balai Bahasa Yogyakarta	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang dan Masalah	1
1.1.1 Latar Belakang	1
1.1.2 Masalah	9
1.2 Tujuan Penelitian dan Hasil yang Diharapkan	9
1.2.1 Tujuan Penelitian	9
1.2.2 Hasil yang Diharapkan	10
1.3 Hipotesis dan Landasan Teori	11
1.3.1 Hipotesis	11
1.3.2 Landasan Teori	12
1.4 Metode Penelitian dan Ruang Lingkup	14
1.4.1 Metode Penelitian	14
1.4.2 Ruang Lingkup	16
BAB II KEHADIRAN SASTRA JAWA PADA PERIODE PASCASASTRA KERAJAAN	20
2.1 Situasi Lingkungan	20
2.2 Perkembangan Sastra Jawa	25

BAB III PARA PENGAYOM SASTRA JAWA	31
3.1 Kepengayoman dari Penerbit dan Pers	39
3.2 Kepengayoman dari Lembaga-Lembaga	53
3.2.1 Lembaga-Lembaga Pemerintah	53
3.2.2 Lembaga-Lembaga Swasta	71
BAB IV BENTUK-BENTUK KEPENGAYOMAN	79
4.1 Aneka Rubrik untuk Sastra Jawa	79
4.2 Kegiatan-Kegiatan Khusus Pengayom dan Pembinaan Sastra Jawa	87
4.2.1 Macapatan	88
4.2.2 Pemberian Hadiah Sastra	89
4.2.3 Diskusi dan Pembinaan Kreativitas	92
4.2.4 Penerbitan Buku	94
BAB V KENDALA KEPENGAYOMAN DAN PEMBINAAN	100
5.1 Dari Kepengayoman Lembaga-Lembaga Pemerintah	101
5.2 Dari Lembaga-Lembaga Swasta	105
5.2.1 Javanologi	105
5.2.2 Lembaga Studi Jawa (LSJ)	106
5.2.3 Kepengayoman dari "Yayasan Rancage"	108
BAB VI KESIMPULAN	110
DAFTAR PUSTAKA	119

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

1.1.1 Latar Belakang

Karya sastra adalah karya seni yang kompleks karena dikelilingi oleh berbagai subsistem yang tidak dapat dipisahkan dari dirinya. Beberapa elemen subsistem yang terdekat dan penting ialah (1) sistem pengarang, (2) sistem penerbit, dan (3) sistem pembaca. Yang dimaksud dengan sistem pengarang ialah berbagai faktor terdekat dengan pengarang dan yang secara langsung mempengaruhi karya-karyanya, seperti asal dan tempat tinggal, lingkungan keluarga, latar budaya, agama, latar pendidikan, dan profesi pengarang. Sistem penerbit ialah berbagai faktor yang berkaitan dengan penerbitan sebuah buku sastra, seperti pemilikan modal, pemimpin redaksi, staf redaksi, dan semboyan atau yang berkaitan dengan ideologi penerbit. Berbagai aspek di sekitar penerbit itu secara langsung mempengaruhi buku atau karya yang diterbitkan, seperti pada tema cerita, teknik cerita, panjang halaman, bentuk huruf, sampai dengan *cover*. Adapun sistem pembaca ialah berbagai faktor yang berkaitan dengan pembaca. Iser (1980) menunjukkan 3 kelompok

pembaca sastra ialah (1) kelompok pembaca sesungguhnya/*real reader*, (2) pembaca kritis (pembaca canggih/*sophisticated reader/ideal reader*), dan (3) pembaca yang diacu pengarang, atau yang tertulis di dalam teks/*inside reader*.¹

Sebenarnya, masih ada lagi sebuah lembaga di luar sastra (sistem makro-sastra) yang juga dekat sekali dengan pengarang, terutama yang berfungsi dalam proses penghadiran atau menjembatani hubungan pengarang dengan penerbit sehingga pada gilirannya karya sastra terbit. Lembaga itu ialah pengayom, yang disebut juga *maecenas*, atau juga *patron*. Seperti halnya elemen-elemen sistem makro-sastra lainnya, pengayom juga memiliki sistem yang otonom (bdk. Ackof dalam Tanaka, 1976). Artinya, pengayom --sebagai sebuah lembaga-- juga memiliki unsur-unsur yang mendukungnya, misalnya siapa pengayom, bagaimana visinya, dan bagaimana kebijakan-kebijakannya. Apabila ada unsur-unsur dari luar sastra yang akan masuk, maka unsur dari luar itu harus tunduk atau menyesuaikan diri dengan kebijakan (*policy*) internal sistem tersebut.

Pengayom amat diperlukan kehadirannya dalam sistem sastra karena tidak semua karya sastra dapat terbit sendiri. Penerbitan sebuah buku, pada hakikatnya, tidak hanya dilandasi oleh kualitas buku, tetapi juga modal penerbit, misi

-
1. Dijelaskan oleh Iser (1980) bahwa setiap jenis pembaca memiliki fungsi dan tujuan sendiri-sendiri dalam membaca sastra sehingga hasil yang diperoleh juga berbeda-beda. Pembaca canggih telah melengkapi *ground*-nya dengan seperangkat ilmu sastra sehingga dalam proses pembacaan ia bersikap kritis. Pada pembaca kelompok kedua, pembaca ialah orang awam sehingga membaca dilakukan sebagai kegemaran. Hasil yang diperoleh pada akhir membaca sastra ini tentu berkebalikan dengan kelompok pembaca pertama karena tidak didasari oleh pengetahuan sastra. Adapun kelompok pembaca ketiga ialah pembaca yang tertera dalam teks, baik secara eksplisit maupun implisit, yang selanjutnya mempengaruhi teknik penulisan.

penerbit, dan hubungan antarpribadi atau antarlembaga dengan penerbit. Terutama, apabila berhubungan dengan penerbit besar. Oleh karena itu, buku yang baik atau berkualitas seringkali terbit terlambat, atau diterbitkan oleh penerbit kecil. Sebaliknya, buku yang tidak berkualitas dapat diterbitkan oleh penerbit yang besar atau berkualitas. Selain faktor intern penerbit, masalah yang lebih sering dihadapi pengarang ialah kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan politik pemerintah. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi pengarang dalam penerbitan itu perlu dijumpatani oleh suatu badan atau lembaga, yaitu yang disebut pengayom atau *maecenas*, atau *patron*.

Pengayom atau *maecenas*, atau *patron* itu ialah suatu lembaga atau perorangan (individu) --yang berada di lingkungan sistem makro-sastra-- dan lembaga itu memiliki fungsi khusus, yaitu mendukung, membantu, atau menyokong kehadiran karya seni, yang dalam kehidupan sastra ialah memberi kemudahan dalam proses kehadiran sastra (Echols dan Shadily, 1975:421).² Salim (1987:1367) menambahkan bahwa di dalam pengertian fungsi pengayom terkandung pengertian "melindungi". Selanjutnya, istilah "pengayom" atau "pelindung" kesenian itu seringkali diganti dengan nama tokoh kaya yang penuh kasih dan perhatian kepada seni itu, yaitu

2. *Maecenas* ialah nama seorang dermawan asal Romania. Ia kawan dekat Horatio, dan ia amat besar perhatiannya kepada kesenian, termasuk di dalamnya seni sastra. Perhatiannya itu diwujudkan dengan memberi lindungan kepada berbagai jenis kesenian, dengan berbagai cara, misalnya memberi dorongan mental, dan atau memberi subsidi kepada pengarang yang secara finansial lemah sehingga karya-karyanya dapat terbit. Selanjutnya, nama *Maecenas* itu diabadikan sebagai simbol penghargaan kepada pakar di bidang kesenian, keilmuan, dan perdamaian dunia. Selain itu, nama itu juga digunakan sebagai simbol pembela dan pelindung kesenian (Encyclopedia America V, 1991:74).

"*Maecenas*".³ Namun, sebagai sebuah istilah, *maecenas* atau pengayom dapat berupa individu (seperti halnya tokoh aslinya: *Maecenas*), atau lembaga --baik milik negara maupun swasta-- yang peduli kepada kesenian.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (1988: 541), istilah *Maecenas* mengacu kepada pengertian "orang kaya yang menjadi pelindung kebudayaan, pelindung seni, dan kalangan seniman". Di situ ditambahkan lagi bahwa yang dimaksud dengan "pelindung" itu diarahkan "untuk menggalakan kegiatan seni. Dengan demikian, definisi tentang pengayom atau pelindung, atau *maecenas* itu dapat memiliki arti sempit, bila berarti perorangan atau individu, tetapi juga dapat berarti lembaga atau institusi --baik lembaga pemerintah maupun swasta-- tertentu "yang berkuasa".

Dalam tradisi sastra Jawa tradisional --hingga berakhirnya sastra kepujangan-- yang menjadi pengayom ialah raja (sunan) karena raja ialah pemegang dan pengendali pemerintahan, termasuk dalam penulisan dan penyebarluasan seni sastra. Perintah raja terhadap seni tidak turun secara langsung, tetapi melalui pusat lembaga kesenian kerajaan yang disebut "*tepas kapujangan*". Lembaga inilah yang difungsikan sebagai perpanjangan tangan raja, atau yang ditugasi menentukan arah kebijakan kesenian di kerajaan. Meskipun demikian, keberadaan pusat kesenian (*tepas kapujangan*) di keraton itu mengindikasikan absolutisme pengayom (raja) atas kesenian di wilayah kerajaan. Hal itu dapat dilihat pada kolopon pada hampir semua naskah kerajaan, yang biasanya ditempatkan pada bait ke-1, yang menunjuk siapa yang

3. Tentang *Maecenas* itu dapat dilihat dalam *Webster's Third New International Dictionary* (1981:1656), dan *The New Oxford Encyclopedic Dictionary* (1987:1231).

berkuasa, melindungi, atau sebagai pengayom, atau sebagai patron (*maecenas*). Berikut ini dikutipkan bait ke-1 *Serat Paniti Sastra* gubahan Jasadipura (1725).⁴

*Makirtya ring agnya Narpasiwi
nular pralampitaning Sang Wuswan
ing Surakarta wedhare
tata tri gora ratu
ri sangkala witning winarti
Nitisastra ingaran
winanaeng kidung
kadi kadanging sajarwa
lumaksana sasananingkang janma di
adi kang kadriyana.*

‘Hamba berkarya atas perintah Putra Raja menyalin petuah ajaran Sang Wuswan di Surakarta ajaran ini diuraikan *tata tri gora ratu* (tertib tiga raja besar) awal tahun sangkala ajaran ini diwartakan diberikan sebutan *Nitisastra* akan disusun dalam bentuk *kidung* seperti karibnya yang ada dalam bentuk *jarwa* yang menguraikan ajaran tentang insan utama sepantasnyalah kalau hal itu dipahami.’

Dari kata-kata pada larik 1 dan 2 dapat diketahui beberapa hal penting. Pertama, tentang tokoh yang memerintahkan penulisan buku tersebut. Dari catatan dalam kolopon tersebut diketahui bahwa pemberi perintah penulisan buku tersebut. Dari catatan kolopon itulah diketahui bahwa pemberi perintah menulis adalah Putra Raja (Pangeran). Catatan itu menguatkan pendapat bahwa, pada umumnya, pengayom atau patron, atau pelindung (*maecenas*) *Serat Paniti Sastra*

4. Kutipan *Serat Paniti Sastra* ini diambil dari naskah penelitian Sudewa (1991:28) yang digunakannya sebagai naskah induk.

ialah lembaga kekuasaan, atau kerabatnya. Mereka, pada umumnya, bertindak mutlak sebagai pemilik modal, penguasa, bahkan sekaligus sebagai penasihat spiritual.

Ketika peran kepujangaan kerajaan berakhir --yaitu sepeninggal R.Ng. Ranggawarsita-- kepengayoman sastra Jawa tidak lagi raja atau kerajaan. Kegiatan bersastra Jawa bergeser menjadi bagian dari kegiatan masyarakat pemakai bahasa Jawa. Secara ekonomis dan edukatif mereka dapat dikelompokkan ke dalam tiga strata sosial utama, yaitu strata sosial tinggi, menengah, dan rendah. Konsep kebudayaan Jawa yang ditata menurut persepsi kerajaan secara perlahan diinterpretasikan berbeda --karena konsep budaya masyarakat mengabdikan kepada rakyat memang berbeda-- dengan konsep budaya kerajaan yang rumit itu (Sumarsait, 1987). Dari sisi kepengarangan dan penerbitan pun sastra Jawa memiliki sisi-sisi yang lebih luas daripada sastra kerajaan. Pertama, pengarang bukan lagi abdi kerajaan, tetapi siapa pun yang memiliki bakat mengarang. Kedua, penyebarluasan karya sastra diserahkan kepada penerbit sehingga karya siapa pun dapat terbit dan disebarluaskan. Atas dasar persepsi itulah dapat diperkirakan bahwa kepengayoman sastra oleh kerajaan telah berakhir (bdk. Pidato Sultan Hamengkubuwono X di acara pembukaan "Temu Pengarang, Penerbit, dan Pembaca Sastra Jawa", 14 Desember 1991). Selanjutnya, secara implisit kepengayoman yang absolut --oleh raja dan kerajaan-- atas sastra Jawa amat dimungkinkan beralih kepada lembaga-lembaga lain di luar kerajaan. Pergeseran kepengayoman dalam sastra Jawa pada pascakerajaan itu dimungkinkan akan menarik karena akan terjadi perubahan konvensi. Akan tetapi, hal tersebut belum pernah diteliti.

Sebuah penelitian tentang kepengayoman sastra pernah dibicarakan oleh Umar Kayam dalam bukunya *Seni, Tradisi dan Masyarakat* (1981:71-81). Salah satu judul dari daftar isi buku itu berjudul "*Maecenas-maecenas dan Jaringan Dewan Kesenian*". Artikel tersebut membicarakan masalah penting dan tidak pentingnya kepengayoman. Pentingnya kepengayoman (*patronage*) bagi seni terlihat dari kegiatan kerja para ahli sungging wayang, dalang, ahli gending, dan sebagainya yang tidak dapat lepas dari order-order (dari) orang-orang atau lembaga berduit, atau yang menguasai fasilitas-fasilitas tertentu (Kayam, 1981: 75).

Pergeseran persepsi masyarakat tentang wayang (dan seni lainnya), yaitu dari bagian budaya tinggi (*high culture*) menjadi budaya massa (*mass culture* atau *low culture*). Dikatakannya pula bahwa kemasan-kemasan khusus dari bentuk asli wayang --yang seharusnya lengkap dan digelar semalam suntuk-- telah berubah menjadi kemasan serita wayang yang dipadatkan dan digelar dalam waktu cukup 1 atau 2 jam. Bentuk-bentuk kemasan baru itu disebut *kitsh*. Perubahan bentuk itu tidak dapat dilepaskan dari pemilik modal, yaitu orang atau lembaga yang sering disebut dengan sponsor. Umar Kayam menyamakan sponsor dengan *maecenas* atau pengayom karena di satu sisi, yaitu mereka sebagai pemilik modal, kedua lembaga itu sama. Akan tetapi, sebenarnya, *maecenas* tidaklah sama dengan sekadar pengertian "pemilik modal". Seperti disebutkan dalam definisi di depan, *maecenas* atau pengayom ialah orang atau lembaga "yang atas dasar sayang" melindungi seni (termasuk sastra). Padahal, dalam paparannya tentang perkembangan yang telah terjadi pada kemasan seni tertentu itu, misalnya dicontohkannya dengan wayang, telah terjadi "pemaksaan", pemangkasan, atau

penyusutan pada totalitas struktur dari sebuah karya seni. Perlakuan tersebut pada gilirannya menciptakan defiasi yang amat penting terhadap kelembagaan seni tersebut. Peristiwa seperti itu tidak dapat dilepaskan dari berbagai aspek yang inheren dalam lembaga yang disebut, atau yang menamakan diri sebagai “pengayom atau *maecenas*” itu.

Mengenai batasan waktu penelitian, yaitu periode 1981-1997 bukanlah penentuan atau batasan yang dipilih secara semena-mena atau acak, tetapi ditentukan atas dasar asumsi bahwa periode itu adalah lanjutan dari berdirinya OPSD (selanjutnya berubah menjadi OPSJ), yaitu sebuah organisasi sastrawan Jawa yang berdiri di Yogyakarta pada tahun 1966, atas prakarsa sanggar lukis “Sanggar Bambu” pimpinan Soenarto Pr. Kebangkitan OPSJ diasumsikan sebagai titik awal bangkitnya suatu generasi sastrawan baru dalam sistem kepengarangan Jawa, setelah tenggelam akibat *boom* roman panglipur wuyung pada periode sebelumnya.⁵

Adapun batas waktu akhir penelitian, yaitu tahun 1997 ialah pembatas akhir pemerintahan Orde Baru, yang waktu itu ditandai dengan berhentinya kepercayaan dan popularitas kepemimpinan Presiden Suharto. Dengan demikian, penetapan periode penelitian dari tahun 1981-1997 diasumsikan akan amat signifikan bagi penelitian ini.

Penelitian ini, secara praktis, diharapkan berguna bagi guru, dosen, dan masyarakat umum untuk meningkatkan

5. Sejak OPSJ dirasa tidak berfungsi lagi sepeninggal Ketua Umumnya (Soedarmo KD), di beberapa daerah yang mayoritas penduduknya masih menggunakan bahasa pengantar bahasa Jawa bermunculan kantung-kantung sastra Jawa. Kantung-kantung itu dijadikan sanggar sastra yang berfungsi untuk membina dan mengembangkan sastra Jawa. Sebagian komunitas sastra Jawa itu menggunakan nama sanggar atau paguyuban. Misalnya, Sanggar Sastra Parikuning (Banyuwangi, berdiri tahun 1975), dan Sanggar Sastra Triwida (di Tulungagung, berdiri tahun 1980).

wawasan tentang sastra Jawa, terutama mengenai kepengayoman atau *maecenas* dalam kehidupan sastra Jawa modern. Selain kegunaan praktis tersebut tadi, penelitian ini diharapkan akan menyadarkan masyarakat sastra bahwa kehadiran sastra tidak begitu saja turun dari langit, tetapi melalui kehadiran lembaga-lembaga lain di sekitarnya. Adapun kegunaan teoretis penelitian tentang kepengayoman ini ialah sebagai acuan untuk penelitian sejenis bagi penelitian karya sastra etnis lain, atau sebagai pijakan untuk penelitian lanjutan. Dengan pikiran-pikiran kritis dari para kritikus dan pengamat sastra Jawa tentang buku ini diharapkan muncul penelitian lain yang berkaitan dengan kepengayoman sehingga akan lebih mengembangkan wawasan masyarakat terhadap sistem sastra Jawa modern yang luas itu.

1.1.2 Masalah

Dari uraian panjang tentang kepengayoman dalam subbab 1.1 itu muncul beberapa masalah pokok. Pertama, bagaimana menunjukkan aspek kepengayoman yang muncul pada pascakerajaan, terutama dalam rentang periode 1981-1997. Kedua, siapa dan bagaimana pengayom sastra Jawa modern, terutama yang hadir dan aktif di sepanjang periode 1981-1997. Ketiga, apakah motivasi kepengayoman dan dampaknya bagi perkembangan sastra Jawa. Keempat, jenis-jenis sastra apa saja yang biasanya dilindungi oleh pengayom.

1.2 Tujuan Penelitian dan Hasil yang Diharapkan

1.2.1 Tujuan Penelitian

Ada dua jenis tujuan penelitian, yaitu tujuan praktis dan tujuan teoretis. Tujuan teoretis pertama ialah menetap-

kan kriteria pengayom, yang pada hakikatnya memiliki ganda. Dari tujuan pertama itu akan diketahui siapa yang sebenarnya dapat disebut pengayom, dan apa saja jenis kepengayoman yang biasanya diberikan. Tujuan teoretis kedua ialah menemukan teori sosiologi sastra yang tepat agar tujuan penelitian tercapai, yaitu menemukan hubungan pengayom dengan sastra sebagai objek sasaran.

Tujuan praktis dari penelitian ini ialah untuk memberi gambaran jelas tentang situasi kepengayoman dalam sastra Jawa, khususnya sastra Jawa modern pada periode 1981-1997. Dengan demikian, masyarakat mengetahui kondisi sastra Jawa modern secara lebih konkret.

1.2.2 Hasil yang Diharapkan

Dari permasalahan yang muncul dalam subbab 1.2 penelitian ini mengedepankan 4 substansi yang dapat dikelompokkan ke dalam 4 bagian pokok. Bagian pertama yaitu Bab I, berisi anjakan penelitian, latar belakang dan masalah yang harus digarap, tujuan penelitian dan hasil yang diharapkan, hipotesa, teori yang digunakan, metode penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Bab II membahas lingkungan sosial-budaya di sekitar kehidupan sastra Jawa. Bab III berisi bahasan tentang pengayom dalam sastra Jawa modern, terutama pada periode 1981-1997. Pada bagian itu juga dibahas jenis pengayom, dan motivasi kepengayoman dalam sastra Jawa modern. Bab IV membahas jenis-jenis kepengayoman dan *output* dan dampaknya bagi sastra Jawa, termasuk bagi pengarang dan bagi perkembangan sastra Jawa modern. Selanjutnya, Bab V merupakan simpulan akhir dari seluruh hasil penelitian. Penelitian ini ditutup dengan daftar pustaka



yang digunakan dalam penyusunan penalaran bagi laporan penelitian ini.

1.3 Hipotesis dan Landasan Teori

1.3.1 Hipotesis

Sistem sastra Jawa bukan lagi sistem yang tertutup (*closed system*), tetapi telah menjadi sistem yang terbuka (*open system*). Dalam kondisi sistem apa pun, sebenarnya, kehadiran sastra tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor di sekelilingnya, misalnya siapa pengarangnya, siapa penerbitnya, dan siapa pula pembacanya. Faktor-faktor lingkungan --atau disebut juga sistem makro-sastra-- bukanlah sistem yang tertutup, tetapi berupa sistem yang terbuka, yaitu sistem yang "dapat" menerima masukan dari luar dirinya, untuk selanjutnya --melalui sebuah proses-- menjadi bagian sistem. Demikianlah, sastra Jawa modern sebagai contoh sastra daerah berfungsi sebagai sistem yang terbuka sehingga sangat dimungkinkan mengalami perubahan "struktur dalam".

Ada 2 faktor penting yang mendorong pergeseran posisi sastra Jawa ke posisi tepi (marginal) itu. Pertama, ialah karena kedudukan bahasa dan sastra Jawa berdampingan dengan sastra-sastra daerah lainnya, terutama dengan sistem sastra dominan, yaitu sastra Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sangat dominan, yaitu sebagai bahasa nasional yang tentu saja menjadi bahasa resmi negara. Dengan dikuatkan oleh Undang-undang Dasar '45 setelah kemerdekaan, bahasa-bahasa daerah (termasuk bahasa Jawa) ditempatkan pada posisi pinggir dan terabaikan. Kedua, hingga saat ini masih ada persepsi dari sebagian besar masyarakat Jawa bahwa R. Ng. Ranggawarsita ialah pujangga Surakarta terakhir sehingga setelah kepergiannya masyarakat berang-

gapan bahwa tidak ada lagi pujangga atau pengarang.⁶ Hal itu menyiratkan pengertian bahwa garis kepengayoman sastra Jawa melalui garis kerajaan telah berakhir. Padahal, kehadiran pengayom amat penting bagi kehadiran sastra, khususnya sastra Jawa modern.

Dalam kondisi lingkungan sastra semacam yang tanpa pengayom itu sastra Jawa modern, terutama, amat membutuhkan kesinambungan pengayom agar mampu bertahan. Akan tetapi, sebenarnya, faktor pendukung sastra Jawa bukan hanya pada kesinambungan pengayom karena masih ada beberapa faktor lain yang juga terkait dengan kehadiran sastra Jawa. Faktor-faktor lain itu ialah S.D.M. di sektor kepengarangan, dan media massa atau penerbit yang akan menjadi perantara penyebar luas sastra kepada masyarakat.

1.3.2 Landasan Teori

Dari paparan latar belakang dan himpunan masalah yang digarap, tampak bahwa penelitian ini memerlukan bantuan teori sosiologi sastra karena karya sastra, pada hakikatnya sering dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya pengayom. Hal itu terlihat dari hubungan pengayom dengan faktor-faktor lingkungan --sebagai elemen sistem makro atau sistem konkret-sastra--, dan unsur-unsur internal dari sistem mikro-sastra, yaitu yang berkaitan dengan lingkungan dan elemen sistem pengarang, penerbit, maupun pembaca. Keberadaan elemen-elemen sistem luar-sastra --sebagai bagian dari sistem

6. Persepsi tersebut tampaknya masih hidup subur di tengah masyarakat Jawa, terutama di kalangan generasi tua dan kelompok tradisional. Hal itu seringkali menonjol dengan munculnya pernyataan eksplisit tentang kualitas sastra kerajaan yang adiluhung dan sastra massa yang tidak ada apa-apanya. Pergeseran konvensi sastra dari sastra kerajaan ke sastra massa belum berterima di seluruh lapisan masyarakat Jawa.

makro-sastra--menjadikannya sebagai sistem yang dinamis, yang memungkinkan perubahan dapat terjadi (Ackoff, dalam Tanaka, 1976:9). Dijelaskan lebih lanjut bahwa perubahan pada salah satu elemen, atau keseluruhan sistem makro-sastra akan mempengaruhi struktur internal sistem mikro-sastra (Tanaka, 1976:18, 19; Kayam, 1978:158-159).

Dalam konsep dasar teori makro, sastra menjadi subjek dari sistemnya sendiri --yang disebut dengan sistem formal (sistem mikro-sastra)-- dan juga subjek dari sistem sosial --atau sistem konkret (sistem makro-sastra)-- yang luas (Tanaka, 1976:6). Dalam sistem makro-sastra terdapat tiga elemen pokok, yaitu sistem pengarang, penerbit, dan pembaca. Dalam sebuah sistem, Welles dan Warren (1956: 93-96) menjelaskan pentingnya hubungan pengarang dengan pengayom (*patron*), atau kepengayoman (*patronage*) dalam kehadiran sastra.⁷ Dengan demikian, kehadiran pengayom ialah di sekitar sistem makro-sastra, atau sebagai bagian dari faktor pendukung sistem makro, atau sistem konkret-sastra (Ackoff, 1976). Pandangan itu lebih ditegaskan oleh Damono (1978: 61) dengan mengatakan bahwa kehadiran pengayom beserta sistemnya (*patronage*) dalam sastra amat penting, dalam kaitannya dengan produktivitas karya seni, termasuk di dalamnya sastra. Tentang bentuk, kuantitas, kualitas, dan sistem kerjanya, kepengayoman tidak selalu berbentuk tunggal atau perorangan, tetapi dapat berupa lembaga atau kelompok masyarakat, dan hal itu amat tergantung kepada kondisi dan situasi pengayom dan lingkungan di sekitar objek yang diayomi.

7. Pada umumnya, yang disebut dengan pengayom ialah perorangan, atau lembaga yang —seperti disebutkan di bagian pengantar— yang bertugas membantu dan melindungi pengarang, terutama dalam proses penulisan dan penerbitan (Laurenson dan Swingewood, 1972:96-97).

Dalam lingkungan sastra modern yang dinamis, sangat dimungkinkan bila sistem pengayom sastra Jawa pada masa kini berbeda dengan sistem pengayom pada masa lalu, atau di masa kerajaan. Setidaknya, faktor pendidikan yang semakin merata dan berkembang, serta dinamika sosial-ekonomi pada suatu kurun waktu amat memungkinkan kehadiran dan atau melesapnya lembaga-lembaga kebudayaan, khususnya yang terkait dengan sastra Jawa, yang melalui kehadirannya perkembangan sastra Jawa modern mendapatkan dukungan atau dorongan. Sesuai dengan pandangan dasar sebuah sistem, perkembangan atau perubahan apa pun yang muncul di lingkungan sistem akan mempengaruhi sistem atau elemen-elemen dari sistem sastra sebagai sistem mikro-sastra. Misalnya unsur pendukung dari luar yang disebut pengayom atau *maecenas (patron)*. Perubahan yang terjadi pada setiap periode, misalnya periode kepengayoman kerajaan dan periode sekarang diasumsikan amat berbeda, baik dari bentuk maupun sifatnya. Perbedaan itu tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan perubahan zaman dan faktor-faktor lingkungan yang lain yang selalu dinamis. Demikian juga halnya dengan kehadiran pengayom sebagai salah satu elemen lingkungan sastra Jawa modern periode 1981-1997, dengan kehadiran kepengayoman (*patronage*)-nya, sastra Jawa dimungkinkan dapat berkembang.

1.4 Metode Penelitian dan Ruang Lingkup

1.4.1 Metode Penelitian

Fokus penelitian ini ialah penelusuran informasi tentang pengayom dan kepengayoman dalam sastra Jawa, terutama yang terjadi di sepanjang periode 1981-1997. Dalam

pembahasan teori disebutkan bahwa kedudukan pengayom dalam sistem sastra ialah sebagai salah satu elemen dari sistem makro-sastra, atau elemen-elemen konkret di luar sastra. Dalam kedudukannya itu pengayom menjadi subjek utama pembicaraan. Selain itu, karena pengayom sebagai bagian dari sistem makro, pengayom itu juga sebagai subjek dari sistem makro yang luas, diperlukan pembahasan khusus tentang elemen-elemen dari sistem makro-sastra yang berpengaruh pada pengayom.

Dari paparan tentang kedudukan pengayom dalam sistem sastra yang luas itu, maka metode yang digunakan ialah metode yang dekat dengan teori makro-sastra, yaitu pendekatan yang melihat kondisi pengayom sebagai subjek bagi dirinya, dan melihat pengayom sebagai subjek dari sistem konkret atau sistem sosial sastra yang luas. Untuk itu, metode yang digunakan ialah sosiologi sastra, yang dilakukan dengan (1) mencatat berbagai bentuk pengayom dalam sastra Jawa di sepanjang tahun 1981-1997, dan (2) mencatat berbagai informasi sastra (tentang pengayom) di media massa, atau melakukan wawancara langsung dengan para pengayom sastra Jawa, terutama di sepanjang periode 1981-1997. Dalam pencatatan data, baik tentang pengayom maupun kepengayoman, digunakan teknik catat dan rekam sehingga diperoleh hasil penelitian induktif.

Setelah penelitian kepengayoman selesai, disusun sebuah laporan penelitian yang sistematis, dengan menggunakan bahasa Indonesia baku, yang mengikuti EYD. Laporan penelitian itu diawali dengan Bab I (Pendahuluan) yang berisi latar belakang, masalah, tujuan penelitian dan hasil yang diharapkan, teori dan metode. Bab II berisi gambaran lingkungan sastra Jawa pada periode 1981-1997, terutama yang

berkorelasi dengan kehadiran pengayom. Bab III berisi bahasan tentang pengayom-pengayom sastra Jawa di sepanjang periode 1981-1997. Bab IV membahas bentuk-bentuk kepengayoman dalam sastra Jawa periode 1981-1997. Bab V membahas berbagai kendala dalam kepengayoman di periode 1981-1997, dan Bab VI berisi simpulan yang diangkat dari seluruh hasil penelitian. Laporan ini ditutup dengan daftar pustaka (buku bacaan) yang digunakan untuk pembahasan penelitian ini.

1.4.2 Ruang Lingkup

Penelitian ini memfokuskan diri pada berbagai masalah kepengayoman dalam sastra Jawa modern, khususnya yang terjadi pada periode 1981-1997, atau pada paro kedua pemerintah Orde Baru. Seperti disebutkan di dalam subbab 1.1 bahwa yang dimaksud dengan kepengayoman atau *patron* ialah perorangan, kelompok masyarakat, atau juga lembaga yang kehadirannya di tengah kehidupan sastra berperan membantu kehidupan kesenian, termasuk di dalamnya sastra. Dengan demikian, ruang lingkup penelitian ini ialah meliputi orang per orang (perorangan), kelompok masyarakat, atau lembaga --baik dari lembaga pemerintah atau swasta-- yang turut berperan dalam kehidupan sastra Jawa, khususnya sepanjang periode 1981-1997, atau periode akhir pemerintahan Orde Baru.

Batas waktu periode 1981-1997 bukan ditentukan secara acak, tetapi dengan sengaja dipilih secara kritis. Pertimbangan pokok ialah karena dari fakta sejarah terlihat bahwa pada awal tahun 1980-an kehidupan sastra Jawa mulai

ramai.⁸ Hal itu terlihat dari berdirinya kantung-kantung sastra Jawa di beberapa kota yang masih banyak pemakai bahasanya. Beberapa kantung sastra yang penting ialah "Sekolah Ngarang" (1972) pimpinan Arswendo Atmowiloto (di Surakarta), "Sanggar Parikuning" (1975) (di Banyuwangi) yang dipimpin oleh Esmiet (Sasmita Adi), "Grup Diskusi Sastra Blora" (1978) (di Blora) yang dipimpin Ngalimu Anna Salim, Sanggar Sastra Jawa "Larajonggrang" (di Yogyakarta pimpinan Andriek Poerwasita), Sanggar Sastra Jawa "Triwidha" (1980) (di Tulungagung) pimpinan Tamsir AS, dan masih beberapa lagi yang lain.⁹

Dengan berdirinya kantung-kantung sastra Jawa di beberapa daerah itu kegiatan sastra Jawa dapat dikatakan semakin menyebar di banyak kota penting di Jawa, terutama Jawa Timur. Pada umumnya, di kota-kota itu terdapat pengarang yang juga aktif penggerak sastra Jawa. Oleh karena itu, sejak tahun 1975 dapat dikatakan kehidupan bersastra Jawa mulai bangkit lagi. Komunitas-komunitas sastrawan dan pemerhati sastra Jawa dapat disebut sebagai salah satu bentuk *patron* atau pengayom dalam bentuk lembaga.

Adapun alasan lain penentuan rentang waktu penelitian ini dapat diamati dari sambutan masyarakat luas ter-

8. Sejak pertengahan dekade 1970, sebenarnya, sudah banyak keluhan tentang OPSJ (Organisasi Pengarang Sastra Jawa) yang waktu itu dipimpin oleh Susilomurti —pengganti Sudarmo KD yang wafat tahun 1975— karena dinilai tidak lagi bergairah. Penyebab pertamanya ialah keadaan lesu tersebut menyebabkan sejumlah pengarang senior mengambil inisiatif sendiri dengan mengembangkan sastra Jawa di wilayah masing-masing.
9. Di Jawa Tengah, sejak awal dekade 70-an juga muncul sanggar-sanggar sastra Jawa, seperti di Surakarta, pada tahun 1971 berdiri "Sanggar Sastra Sasonomulya" yang dipimpin Arswendo Atmowiloto, "Sanggar Sastra Brayan Mudha" (1976), "Sanggar Sastra Bening Penulis Muda (PSM)" (1978), Sanggar Sastra "Keluarga Penulis Kudus" (1991), "Sanggar Sastra Kopi Sisa" di Purworejo/Kedu, "Sanggar Sastra Tabloid Tegal-tegal" (1991), dan "Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta atau SSJY" (1991).

hadap periode 1981-1997. Misalnya, di Yogyakarta terbit majalah berbahasa Jawa *Djoko Lodhang* (1975), yang mengikuti munculnya *Mekar Sari* pada tahun 1957. Di Jakarta, Susilomurti (dalam Hutomo, 1988:89) membantu penerbitan dua buah mingguan, yaitu *Sekar Jagad* dan *Kumandhang*. Selain terbitnya majalah berbahasa Jawa, perkembangan positif juga tampak dari munculnya rubrik sastra atau budaya Jawa di beberapa media massa berbahasa Jawa dan Indonesia. Setidaknya ada pula dua surat kabar mingguan berbahasa Indonesia --yaitu *Andika* dan *Gelora Berdikari*-- yang juga membuka rubrik berbahasa Jawa (Hutomo, 1988:88-89). Demikian juga halnya di Yogyakarta, majalah berbahasa Jawa *Mekar Sari* membuka rubrik *guritan*, diawali dari nomor 15, Tahun X, 1 Oktober 1966 sampai dengan nomor 15, Tahun XII, 1 Oktober 1968. Rubrik itu diberi nama "*Gupita Sari*", diasuh oleh Dr. Suripan Sadi Hutomo. Ternyata, rubrik atau ruang-ruang yang dibuka oleh beberapa media massa untuk sastra Jawa itu berterima oleh masyarakat, yang dapat dilihat dari banyaknya guritan dari para penggurit yang masuk dan dimuat. Catatan oleh Dr. Suripan Sadi Hutomo juga mendapat tanggapan dari para pembaca sastra Jawa. Selain itu, munculnya polemik tentang berbagai permasalahan sastra Jawa dalam rubrik-rubrik sastra majalah berbahasa Jawa --seperti *Panyebar Semangat* di Surabaya-- adalah salah satu tanda pila bahwa kehidupan sastra Jawa pada tahun 1970-an mulai bangkit.

Kesemua fakta empirik di bidang jurnalistik yang menunjukkan tanggapan terhadap kehidupan sastra Jawa itu menandai besarnya sambutan masyarakat terhadap kebangkitan OPSD (atau OPSJ). Di sisi lain, sambutan tersebut juga menjadi fakta bahwa media massa melakukan "peng-

ayoman” kepada sastra Jawa, baik sastra tradisional, karena *tembang* juga dimuat di dalamnya, bersama dengan berjenis sastra Jawa modern.

BAB II

KEHADIRAN SASTRA JAWA PADA PERIODE PASCASASTRA KERAJAAN

2.1 Situasi Lingkungan

Seperti disebutkan di dalam Bab I, sepeninggal Rg. Ranggawarsita --cucu R.Ng. Jasadipurall-- Kerajaan Surakarta tidak mengaktifkan lagi *Tepas Kapujanggan*, yaitu sebuah lembaga kesenian di lingkungan kerajaan yang mengelola kegiatan sastra Jawa. Hal itu terlihat jelas dengan tidak ada lagi pengangkatan pujangga sepeninggal R. Ng. Ranggawarsita. Masyarakat memahaminya sebagai pujangga kerajaan yang terakhir. Secara tersirat fakta itu dapat diartikan dengan dilepaskannya kegiatan bersastra dari kerajaan. Fakta itu, sebenarnya, juga tidak dapat dilepaskan dari semakin rapuhnya kerajaan sejak abad ke-18, baik dari aspek harta maupun martabat (bdk. Kayam, 1981: 72). Masyarakat berbelah, sebagian tetap mengabdikan kerajaan dan sebagian yang lain mengabdikan kepada pemerintah kolonial karena dengan didirikannya sekolah-sekolah formal --walaupun belum banyak dan terbatas bagi keluarga bangsawan-- tetapi kegiatan baru itu menjanjikan masa depan yang lebih baik. Keadaan kacau di lingkungan kerajaan Surakarta pada abad

ke-19 digambarkan oleh R. Ng. Ranggawarsita melalui tulisan orang lain, menjadi *Serat Djoko Lodhang*, yang diterbitkan oleh Tan Koen Swie (1941). Karya itu dianggap menyimpangi konversi yang disepakati masyarakat waktu itu sehingga dengan karyanya itulah R.Ng. Ranggawarsita dianggap sebagai pembangkang kerajaan. *Tepas Kapujanggan* yang merupakan lembaga kerajaan itu dapat disebut sebagai pengayom bagi para pujangga (pengarang kerajaan). Akan tetapi, sejak wafatnya R. Ng. Ranggawarsita, kerajaan tidak lagi mengangkat pujangga penggantinya dan *Tepas Kapujanggan* juga tidak lagi menjadi pusat kapujanggan. Sejak itulah, sistem kepengayoman kerajaan dapat dikatakan berakhir dan sastra Jawa berada di tangan rakyat. Sistem kepengarangan sastra yang semula tertutup (*closed system*) –karena hanya kerajaan yang berhak mengangkat dan memerintahkan pujangga menulis-- berubah ke sistem terbuka (*opened system*) yang membebaskan siapa pun menulis. Keberadaan sastra Jawa di tengah masyarakat awam itu dengan cepat mengalami perubahan dan perkembangan. Pengarang Jawa pasca-Ranggawarsita yang pertama kali menanggapi perubahan itu ialah Padmosoesastro --seorang bangsawan rendah yang belajar sastra Jawa melalui R.Ng. Ranggawarsita-- dengan menyebut dirinya dengan "*wong mardika*".

Di bidang sastra pergeseran utama tercermin pada kecenderungan penulisan, yang semula terfokus pada situasi di lingkungan istana, kemudian bergeser kepada situasi sehari-hari, yaitu situasi yang dialami oleh masyarakat. Maka, tema-tema didaktis pun tidak dominan lagi karena digantikan dengan tema-tema baru yang berkisar pada fakta riil sehari-hari. Bahasa pengantar antaranggota masyarakat pun berubah, mengikuti perkembangan lingkungannya, yaitu masya-

rakat luas. Pada periode kemerdekaan, egaliterisme ditegakkan karena hubungan antarmasyarakat menjadi semakin akrab, karena mereka menolak pemisahan antarmanusia oleh faktor di luarnya. Oleh karena itu, secara pasti bahasa Jawa yang rumit itu disederhanakan, dengan melepas beberapa strata yang dianggap menjadi pemisah paling besar. Bahasa Jawa menjadi sederhana, hanya tiga strata, yaitu *ngoko*, *krama* (*krama madya* dan *krama inggil*). Beberapa penanda penting yang menandai pergeseran budaya bangsawan atau priyayi itu ialah munculnya novel-novel priyayi yang mengangkat masalah-masalah sehari-hari di lingkungan masyarakat dengan tema-tema yang baru pula, seperti novel *Serat Riyanta* (1920) karya R.B. Soelardi, *Kirti Njunjung Drajat* (1924) karya R. Ng. Jasawidagda, *Ngulandara* karya Margana Djajaatmadja (1938), dan *Gawaning Wewatekan* (1938) (Kuntowijaya, 1988). Novel priayi, pada umumnya, membahas masalah terjadi di lingkungan priayi berdarah biru pada beberapa dekade awal abad ke-20.

Diawali dengan novel "*Mbok Randha Gunawacana*", yang mulai menggarap pergeseran posisi perempuan dari sektor domestik ke sektor publik. Novel itu menggarap yang ditunjukkan dengan pemilihan beberapa khusus. Tema itu selanjutnya berkembang merambahi aspek-aspek kehidupan yang luas, seperti pemilihan jodoh, peningkatan status sosial, dan sebagainya menjadi salah satu penanda tentang pergeseran konvensi dalam masyarakat Jawa itu. Novel-novel Jawa modern sebelum kemerdekaan, seperti *Jarot*, *Kirti Njunjung Drajat*, *Ni Wungkuk ing Bendha Growong*, *Gawaning Wewatekan*, *Mrojol Selaning Garu*, *Katresnan*, dan sebagainya, serta karya-karya sastra Jawa yang dimuat di media massa cetak. Bukti-bukti empirik atas pergolakan sosial yang terjadi pada

waktu itu terlihat dari bangkitnya kelompok elite baru hasil pendidikan formal, baik dari sekolah bumiputera maupun dari sekolah Belanda. Contoh yang jelas terlihat dari munculnya pegawai pemerintah (Belanda) yang diangkat atas dasar tingkat pendidikan formal, tidak lagi atas dasar darah kebangsawanan. Novel *Katresnan* (1924), *Supraba lan Suminten*, *Pepisahan Pitu Likur Tahun*, dan novel *Pameleh* menunjukkan dengan jelas berbagai tanda tentang pergeseran status sosial yang terefleksi dalam sastra Jawa periode pra-kemerdekaan. Baik penerbit swasta maupun penerbit pemerintah yang menerbitkan buku-buku dengan idealisme baru itu seperti gayung bersambut dengan perkembangan tingkat pendidikan --dan kemampuan baca huruf latin-- masyarakat di lingkungan sastrawan Jawa waktu itu.¹⁰ Dengan demikian, fakta itu menandai "penyambutan" penerbit untuk menjadi bagian dari "pengayom" atau *maecenas* bagi sastra Jawa waktu itu, baik untuk jenis sastra tradisional maupun sastra modern.

Pada sisi lain, pergeseran sosial sudah terekam juga melalui media massa, yang dalam sastra Jawa sudah bangkit sejak paro kedua abad ke-19, diawali dengan terbitnya *Bromartani* pada tahun 1856. Kehadiran media massa itu menjadi media penting bagi pengembangan dan penyebarluasan sastra Jawa waktu itu, walaupun penataan rubrik dan isi di dalamnya masih sederhana. Kehadiran media massa seakan

10. Bandingkan dengan situasi masyarakat pada akhir abad ke-19, di masa R.A. Kartini hidup yang sebagian besar belum dapat mengikuti pendidikan formal. Selanjutnya, pada awal abad ke-20, sebagai tindak lanjut atas politik balas budi (politiek etishe) yang diumumkan pada tahun 1901. Dimulai dengan dibangunnya sejumlah sekolah, terutama untuk tingkat SD, di Jawa. Walaupun masih amat terbatas jumlah sekolah dan kelompok pribumi yang mengikutinya, dikhususkan untuk kelompok priayi berdarah biru— dan kehadiran mereka menandai bangkitnya kelompok elite baru, hasil pendidikan formal Belanda.

membuka lembar baru bagi sastra Jawa karena menjadi bagian dari kepengayoman baru bagi sastra Jawa, sesudah keraja-an —dengan *Tepas Kapujanggan-nya*— tidak lagi berfungsi sebagai pengayom. Sejumlah majalah berbahasa Jawa yang terbit sebelum kemerdekaan, sebenarnya, sudah mulai muncul sebelum *Kedjawen*, yang diterbitkan Balai Pustaka (1926), dan *Panyebar Semangat* (1933) yang diterbitkan oleh Boedi Oetomo. Kehadiran penerbitan dan media massa berbahasa Jawa selain *Bromartani*, cukup bagus karena sejumlah karya berbahasa Jawa mendapat tempat di dalamnya.

Pada waktu peralihan pemerintahan Belanda --secara *de facto*-- kepada Republik pada tanggal 28 Desember 1949, situasi sosial-ekonomi dan politik mengalami kekacauan karena pergantian sistem pemerintahan, dari sistem kolonial ke sistem republik yang merdeka dan berdaulat penuh. Pengakuan-pengakuan atas kemerdekaan penuh RI terus mengalir dan menguatkan berdirinya RI. Yang secara jelas terjadi ialah kembalinya pusat pemerintahan RI dari Yogyakarta ke Jakarta lagi, dan dilanjutkan dengan persiapan pemilu untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat RI. Pemilu I di Yogyakarta dilaksanakan pada tahun 1951 (Tashadi *et al.*, 1995:104). Selanjutnya, secara bertahap, sistem pemerintahan kolonial beralih menjadi sistem pemerintahan republik. Perubahan pemerintahan yang bertentangan sistem itu dipersiapkan dengan serius. Pertama yang dilakukan ialah ketatanegaraan, politik, kemudian ekonomi, dan selanjutnya membawa sistem baru di berbagai bidang, termasuk pendidikan bagi seluruh warga negara.

2.2 Perkembangan Sastra Jawa

Ketika sastra Jawa berganti kepengayoman, yaitu kepada masyarakat, sistem pengarang pun berubah menjadi sistem terbuka. Pengarang tidak lagi dipilih oleh raja melalui hak prerogatifnya, tetapi setiap orang yang mampu mengembangkan bakat menulisnya berhak menulis atau menjadi pengarang. Dengan demikian, pengarang adalah suatu institusi swasta yang memberikan lapangan kerja bagi masyarakat. Akan tetapi, pengarang tidak dimungkinkan hanya berkuat pada dirinya sendiri, atau hanya mengembangkan SDM-nya saja karena dalam sistem komunikasi yang lebih luas, sastra adalah bagian dari sistem komunikasi yang luas itu (Ackof dalam Tanaka, 1976:1). Itulah sebabnya, untuk dapat sampai ke tangan pembaca, naskah sastra harus melalui lembaga penerbitan. Pengarang harus menawarkan karyanya kepada lembaga penerbit agar dapat diterbitkan, kemudian dibaca pembaca. Dengan demikian, setidaknya, ada dua lembaga lagi yang dulu --di zaman sastra kerajaan-- tidak pernah dipikirkan karena semua berlangsung secara mekanis.

Dalam sistem penerbitan pascakerajaan, sastra Jawa berkembang mengikuti perkembangan lingkungan di sekitarnya, yang secara tidak langsung juga "memaksanya" menyiapkan sistem kerja yang berbeda. Menurut perkembangan sistem ekonomi modern, segala sesuatu yang dipasarkan harus menghasilkan laba sebanyak-banyaknya agar modal dapat berkembang dan institusi semakin besar. Dalam sistem ekonomi itu, penerbitan sastra Jawa harus berada di tengah pusaran ekonomi modern, yaitu sistem reproduksi sastra (*literary reproduction system* atau *LRS*), yang (di negara maju) bekerja meliputi reproduksi dan sekaligus penyebaran sastra (Tanaka, 1976:22). Rumah reproduksi disebut *publishing house* atau penerbit.

Dalam sistem reproduksi atau penerbitan tradisional, pada umumnya, penerbit "menunggu" naskah datang, kemudian menyeleksi berdasarkan kriteria mereka sehingga ada naskah yang diterima atau ditolak. Kriteria untuk mengukur pantas dan tak pantas terbitnya sebuah buku tidak selalu sejajar dengan kriteria sastra, karena kedua institusi itu berbeda sistem. Akan tetapi, dalam sistem penerbitan semacam itu penerbit tidak mampu mengontrol pengarang, meskipun penerbit menguasai sistem pengarang. Itulah sebabnya, dalam sastra Indonesia novel *Salah Asuhan* karya Abdul Muis dan novel *Atheis* karya Armijn Pane yang bernilai sastra tinggi ditolak Balai Pustaka karena dinilai melanggar kode etik penerbitan pemerintah, yang terdapat dalam Nota Rinkeles.

Adapun kasus dalam sastra Jawa modern, penyusutan penerbitan buku berbahasa Jawa oleh Balai Pustaka juga dilatarbelakangi politik pemerintah Belanda yang didasari oleh ekonomi mereka yang pada akhir tahun 1930-an mulai bangkrut. Atas dasar itulah, sebenarnya, pemerintah menyusutkan penerbitan buku berbahasa Jawa dan Sunda, bahkan penerbitan buku berbahasa Madura dihentikan. Untuk menutup alasan politis itu, pemerintah menyampaikan alasan lain, berkenaan dengan bahasa Melayu sudah diangkat sebagai bahasa komunikasi resmi antarsuku dan antaranggota masyarakat di Hindia Belanda sejak Oktober 1928.

Dalam sistem reproduksi "menunggu naskah" semacam Balai Pustaka itu penerbit dapat membayangkan atau menentukan calon pembacanya atas dasar persepsi mereka, tanpa melihat faktor pengarang. Balai Pustaka, misalnya, mengklasifikasi buku berbahasa daerah (Jawa, Melayu, Sunda, dan Madura) ke dalam kriteria pembaca menjadi tiga

kategori: kategori A, kategori B, dan kategori C. Kategori A ialah buku-buku untuk rakyat/masyarakat yang baru belajar membaca. Kategori B untuk rakyat/masyarakat yang sudah lebih pandai. Termasuk ke dalam kategori B ialah sastra terjemahan untuk anak-anak. Adapun kategori C ialah untuk bacaan rakyat/masyarakat yang dianggap canggih, hasil pendidikan Belanda. Dalam kategori C itu hanya ada buku sastra Melayu (Indonesia) di dalamnya. Tiap kategori ditentukan hanya dengan kriteria penerbit, bukan dengan kriteria sastra. Oleh karena itu, dalam penerbitan dan penyebaran sastra Jawa, sebagian besar mengikuti sistem tradisional.

Dalam sistem penerbitan, pengarang yang harus aktif menulis dan menawarkan karyanya kepada penerbit yang sudah memiliki horison harapan tentang pengarang. Itulah sebabnya, banyak karya pengarang Jawa yang ditolak oleh penerbit "bergengsi". Dalam proses selanjutnya, pengarang harus menerima "diadili" oleh penerbit, walaupun sebenarnya karya itu bagus. Kasus penerbitan cerpen-cerpen Jawa, seperti karya Tiwiek AS dalam *Djaka Lodhang*, yang banyak dimuat ialah karya-karya yang sesuai dengan prediksi atau selera pasar, yang ditinjau dari sudut penerbit. Penerbit (pemilik modal) rupanya memandang masyarakat pembaca sastra Jawa senang tentang sastra pornografis. Dengan demikian, perubahan di luar, sebenarnya, tergantung pada cara kerja penerbit model penerbit (LRS) ini.

LRS (Literary Reproduction System), sebenarnya, merupakan model sistem reproduksi yang dinamis dan kompleks, yang ditandai dengan sikap redaksi yang tidak hanya menunggu datangnya naskah. Dalam sistem penerbitan modern, yang kompetitif, penerbit harus "berani" berburu pe-

ngarang yang karyanya dapat diperkirakan laku dan digemari pembaca. Penerbit Gramedia, misalnya, "menangkap" Kuntowijoyo dengan menerbitkan hampir seluruh karyanya. Begitu juga halnya dengan Kirdjomuljo, karyanya tidak satu pun diterbitkan penerbit di luar Gramedia. Hingga sekarang, penerbit Gramedia ini "memegang" pengarang-pengarang tertentu sebagai pengarang yang "harus memasok" karyanya ke penerbit ini.

Sejak tahun 1970-an sastra Jawa modern lebih banyak diterbitkan penerbit Balai Pustaka dan Pustaka Jaya. Penerbitan Pustaka Jaya, antara lain, ialah novel *Tunggak-tunggak Jati* karya Esmiet (1976) dan *Tanpa Daksa* karya Sudarmo KD (1976). Adapun Balai Pustaka --yang di dalamnya duduk seorang pengarang Jawa (Harjono HP) sebagai redaksi penilai-- masih cukup banyak menerbitkan beberapa buku. Dimulai tahun 1950-an, terbit *Kumpule Balung Pisah*, *Sapu Ilang Suhe*, dan cetak ulang *Kembang Kanthil*. Pada tahun 1970-an terbit dua buku Ag. Suharti, yaitu *Anteping Tekad* (1975) dan *Mendhung Kesaput Angin* (1980). Namun, setelah itu, tidak ada lagi penerbitan sastra Jawa melalui Balai Pustaka. Baru pada tahun 1988, antologi *guritan* yang dihimpun Suripan Sadi Hutomo berjudul *Guritan Antologi Modern (1940-1980)* (1985) diterbitkan oleh Balai Pustaka. Penerbitan antologi karya Suripan Sadi Hutomo oleh Balai Pustaka itu disusul oleh penerbitannya yang lain, yaitu penerbitan antologi *guritan* feminis Jawa berjudul *Kalung Barleyan* (1991).

Fakta empirik dalam penerbitan sastra daerah tersebut menyarankan kepada kita bahwa secara perbandingan, penerbitan sastra Jawa amat jarang yang dilakukan oleh penerbit besar, padahal banyak pengarang besar hingga akhir tahun

1980-an.¹¹ Itulah sebabnya, pada tahun 1950-an hingga awal tahun 1970-an novel *panglipur wuyung* yang tipis-tipis itu hanya “ditangkap” dan “diminta” oleh penerbit-penerbit kecil, seperti Penerbit Jaker, Dua A, Muria, Subarno, C.V. Burung Wali, U.D. Djaja, C.V. Aktiva, dan F.A. Nasional dari beberapa kota penting, seperti kota Yogyakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya.

Pengarang sastra Jawa pada kenyataannya terus hadir. Mereka tersebar di berbagai tempat/provinsi di Jawa. Namun, pada kenyataannya, pada pascatahun 1966, tepatnya setelah periode sastra *panglipur wuyung* (s.d. awal tahun 1970-an), penerbit besar jarang mengulurkan tangan untuk “menangkap” karya mereka. Hanya Pustaka Jaya pada tahun 2002 masih menerbitkan novel kultural Jawa yang bagus, berjudul *Candhikala Kapuranta*, karya Sugiarta Sriwibawa. Setelah itu, penerbit-penerbit besar itu berhenti lagi menerbitkan karya sastra Jawa modern karena secara faktual memang pada saat ini penerbitan sastra daerah tidak menghasilkan laba atau tidak menguntungkan. Hal itu mengasumsikan (kepada kita) bahwa kepengayoman terhadap sastra Jawa telah bergeser, bukan lagi berada pada tangan penerbit buku, melainkan pada media massa, termasuk majalah berbahasa Jawa. Hingga tahun 1997 (batas waktu penelitian) majalah bahasa Jawa hanya tinggal empat buah, yaitu di Yogyakarta (majalah khusus Katholik *Praba* dan majalah umum *Djaka Lodhang*), dan di Surabaya yaitu majalah umum *Panyebar Semangat* dan *Jaya Baya*.

11. Sampai dengan akhir tahun 1980-an sastra Jawa masih memiliki sejumlah pengarang besar, seperti St. Iesmaniasita, Tamsir AS, Esmiet, Suparto Brata, Purwadhie Atmodihardjo, Satim Kadarjono, Suparto Brata, Sakdani, dan M. Nursyahid.

Fakta menunjukkan bahwa pada pascatahun 2000 mulai tampak kebangkitan kembali majalah berbahasa Jawa, meskipun beberapa waktu sebelumnya di Surakarta juga muncul tabloid *Punakawan*. Namun, selanjutnya majalah bahasa Jawa itu pindah ke Surabaya berganti nama *Jawa Anyar*. Di Yogyakarta pada tahun 2002 Dinas Kebudayaan (Seksi Bahasa) menerbitkan majalah kebudayaan Jawa bernama *Sempulur* yang hingga sekarang masih hidup. Pada bulan Juni tahun 2005 di kota ini juga terbit majalah tiga bulanan *Nilakandhi*. Di Jakarta, sepanjang paruh terakhir 2003-2004 majalah *Parikesit* terbit (hanya satu tahun), yang dibiayai oleh perorangan. Kemudian, di Jakarta pula telah terbit majalah kebudayaan Jawa populer bernama *Damar Jati* (2005), yang kehadirannya juga atas biaya perorangan.

BAB III

PARA PENGAYOM

SASTRA JAWA

Membangun kehidupan sastra tidak harus hanya mengandalkan kepada para penulis atau pengarang sastra karena pengarang hanyalah suatu profesi perorangan yang memusatkan pekerjaannya dalam kreativitas sastra (Moeliono et al, 1988:390), baik untuk penulisan jenis fiksi maupun jenis sastra lainnya. Kondisi sastra di tengah masyarakat memang semakin menyedihkan karena sastra semakin terabaikan, baik di sekolah maupun di rumah. Rasanya ada hal lain yang lebih penting dan mendesak kehidupan dan perhatian terhadap sastra. Hal itu dapat diketahui dengan cepat apabila dilihat dari jumlah omset atau jumlah oplag sekali terbit dari setiap buku sastra, khususnya sastra Jawa modern, lebih-lebih bila dilihat dari sudut pandang pemilihan buku sastra Jawa oleh masyarakat. Keadaan seperti itulah yang seringkali mengundang pertanyaan bagaimana agar sastra Jawa dapat bertahan dan berkembang.

Seperti dikatakan Ackoff (dalam Tanaka, 1976), sastra tidak dapat datang sendiri dari langit. Sastra hadir melalui

serangkaian kelembagaan yang kompleks, atau kelembagaan sastra yang disebut sistem sosial-sastra atau sistem-makro sastra. Dalam kelembagaan yang kompleks itulah karya sastra hadir dan menjadi bagian darinya (sistem mikro-sastra). Setidaknya ada tiga buah kelembagaan yang amat dekat dengan sistem mikro-sastra yang menyebabkan kehadiran sastra hampir selalu berhubungan dengannya. Ketiga sistem kelembagaan di sekitar sastra tersebut adalah pengarang sebagai lembaga reproduksi sastra, penerbit sebagai lembaga penerbit dan penyebarluasan sastra, dan pembaca sebagai lembaga penerima atau penikmat sastra.

Dalam kaitannya dengan keberadaan sastra di tengah konstelasi elemen-elemen sistem makro itulah karya sastra hadir, dan apabila dicermati dengan seksama akan tampak tapak-tapak campur tangan "banyak pihak" dari luar sistemnya (sistem mikro-sastra). Salah satu di antara tapak campur tangan yang dekat sekali dengan sistem pengarang --sebagai lembaga yang memproduksi sastra-- ialah hadirnya pengayom. Pengarang memang bukan selalu profesi yang mandiri, lebih-lebih pada profesi pengarang modern. Profesi tersebut tidak selalu dapat menghasilkan uang dengan cepat, terutama pada pengarang muda. Di sisi lain, penerbitan sastra juga bukan pekerjaan yang mudah karena memerlukan dana yang memadai. Itulah sebabnya, kepengarangan seringkali harus berhubungan dengan lembaga lain yang dapat mendukung dana --baik untuk proses penulisan maupun penerbitan-- dan lembaga itu disebut pengayom atau *maecenas* (lihat Bab I).

Pengayom atau *maecenas* sebenarnya bukan harus berwujud lembaga, tetapi juga dapat berwujud perorangan. Fungsi keduanya tetap sama yaitu mendukung hidupnya kesenian dengan berbagai cara. Berbagai lembaga yang dimung-

kinkan mendukung kehidupan kesenian, antara lain, lembaga penerbitan, lembaga resmi negara --seperti Dewan Kesenian, yayasan-yayasan penyanggah dana milik negara seperti Depsos-- atau lembaga swasta.

Sejak kepujangaan Jawa (di Surakarta) tidak dilanjutkan lagi, secara praktis aktivitas yang berkaitan dengan lembaga tersebut pun dihentikan. Hal itu mengisyaratkan berhentinya pula tradisi kepujangaan kerajaan (keraton). Meskipun demikian, sebenarnya, sastra Jawa tidak hanya hidup dalam sistem kerajaan yang memiliki pengayom tunggal, yaitu raja, yang bertanggung jawab atas semua kebutuhan pujangga dan keluarganya. Dengan kata lain, raja berfungsi sebagai pengayom tunggal para pujangga. Hal itu dapat dilihat sejak raja-raja Jawa pada zaman Mataram Hindu --yang melahirkan *Ramayana*, *Mahabarata*, *Negaraker-tagama*, *Pararaton*, dan *Nitisastra*-- hingga Mangkunegoro VII dan Pakubuwono X bertahta.

Sesuai dengan namanya, para pengarang pada zaman kerajaan disebut dengan istilah pujangga (Sansekerta: *bhu-jangga*) bukanlah sekedar pengarang (orang yang mempunyai profesi mengarang), yaitu keahlian yang dapat dilakukan oleh siapa pun. Masyarakat Jawa memang membedakan istilah "pengarang" dengan "pujangga" karena persepsi masyarakat Jawa tentang kedua istilah itu juga tidak sama: masing-masing memiliki spesifikasi khusus. Persyaratan pertama bagi seorang pujangga sebagai pemangku kedudukan hanya dipilih atau ditentukan oleh raja sehingga dapat dipastikan bahwa seorang pujangga tidaklah dapat dipegang oleh sembarang anggota masyarakat. Raja pasti memilih pujangga dari "orang dalam", yang berarti harus memiliki darah kerajaan, atau memiliki hubungan kekerabatan dengan

raja. Persyaratan kedua ialah bahwa orang itu harus memiliki keahlian yang berkaitan dengan profesi tersebut. Padmosoekotjo (1958:13) menunjukkan beberapa keahlian yang berkaitan dengan profesi tersebut, yaitu (1) keahlian bahasa dan sastra (*paramengsastra*), (2) keahlian dalam mengarang (*paramengkawi*), (3) keahlian dalam hal gending (*mardawa lagu*), (4) keahlian dalam mendongeng (*awicarita*), (5) keahlian menggunakan bahasa (*mardawa basa*), (6) keahlian dalam hal kebudayaan (*mandraguna*), (7) halus perasaan (*nawungkridha*), dan (8) baik kehidupannya (*utama uripe*). Intinya, seorang pujangga wajib memiliki kelebihan dalam hal kebudayaan dan berbudi luhur.

Karena banyaknya persyaratan menjadi pujangga, tidak semua orang yang dapat menulis karya sastra dapat diterima atau diangkat sebagai pujangga.¹² Di samping itu, karena pengangkatan pujangga itu dilakukan oleh raja atau penguasa kerajaan, ada persyaratan tidak tertulis --tetapi harus diikuti-- oleh pujangga, yaitu loyalitas atau kesetiaan mutlak kepada raja. Seorang pujangga harus tunduk serta patuh mengikuti perintah raja, tidak boleh melakukan kritik. Itulah sebabnya, sepeninggal R. Ng. Ranggawarsita, keraton Surakarta tidak lagi menghidupkan *Tepas Kapujanggan*. Ki Padmosoesastro yang diharapkan menggantikan posisi R. Ng. Ranggawarsita menolak posisi tersebut karena merasa tidak mampu. Bahkan, selanjutnya ia memproklamasikan dirinya sebagai "*wong mardika*" (Supardi, 1963), yaitu orang yang bebas dari berbagai ikatan kepujangaan. Dengan demikian, sepeninggal R. Ng. Jasadipura II dan R. Ng. Ranggawarsita,

12. Beberapa pujangga pada zaman Mataram Islam --seperti R. Ng. Jasadipura II dan R. Ng. Ranggawarsita dan -- juga sudah pernah menulis kritik terhadap pemerintah pada waktu itu.

kepujangaan kerajaan berakhir dan kepengayoman kerajaan terhadap pujangga atau pengarang pun dapat disebut berakhir. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa aktivitas kepujangaan di kalangan kerajaan berhenti pula.

Sepeninggal pengayom dari kerajaan dimungkinkan tumbuh kepengayoman baru bagi kehidupan sastra Jawa. Seperti dikatakan oleh Wellek dan Werren (1958:93-96) bahwa seni lisan dan tulis terlahirkan oleh formula-formula magis dan upacara-upacara keagamaan di zaman paleolitikum. Kedua buah kesenian tersebut, lanjutnya, pada awalnya berkembang bersama-sama dengan seni rupa sehingga menciptakan seni kolaborasi. Pada perkembangan selanjutnya, dilakukan kesepakatan karena muncul kelompok-kelompok yang memiliki struktur tertentu dan membutuhkan komunikasi antaranggota. Dari sudut itulah, kemudian muncul tanda-tanda yang digunakan sebagai media komunikasi antaranggota, dan pada gilirannya menciptakan teknik-teknik stilistika. Teknik-teknik itu selanjutnya memiliki fungsi dan arti tertentu di dalam masyarakat. Demikianlah, sastra yang bermediakan bahasa itu memiliki sistem tanda tertentu yang berfungsi sebagai media komunikasi serta media penyampai informasi dan inspirasi. Fungsi bahasa lainnya ialah untuk penyampai hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh masyarakat secara umum. Fungsi yang terakhir itu menghasilkan bentuk-bentuk sastra mantra sehingga masyarakat menganggap sastrawan --yang dalam masyarakat Jawa tradisional disebut pujangga-- juga sebagai juru nujum. Sastrawan dihormati oleh komunitas tradisional karena kemampuannya meramal atau menerjemahkan hal-hal yang kasat mata, seperti mimpi dan bahasa isyarat.

Ketika sastrawan terbebaskan dari tradisi kepengayoman istana atau kerajaan, terjadilah pembagian kerja dalam masyarakat. Pada pembagian kerja itulah masyarakat tidak lagi memberikan posisi yang dominan kepada sastrawan, seperti halnya para pujangga kerajaan dahulu. Kehadiran kapitalisme sebagai suatu ideologi yang mengedepankan pentingnya uang, tidak lagi menganggap penting seni dengan kelembagaannya. Perkembangan struktur masyarakat yang berkembang dan tidak meratanya pendidikan dalam masyarakat telah menyebabkan seni hanya dapat dinikmati oleh sebagian masyarakat. Sementara itu, kapitalisme semakin berkembang dan totalitas pandangan dunia semakin sulit dicapai karena kekuasaan borjuis tertinggi bergerak semakin merosot di mata masyarakatnya.

Di sisi lain, situasi pada tahun 1970-an tidak menguntungkan bagi bahasa dan sastra Jawa. Situasi tersebut sebenarnya bermula dari menurunnya perhatian masyarakat terhadap bahasa Jawa, yang secara tidak langsung menyeret sastra Jawa juga karena sastra Jawa menggunakan media utama bahasa Jawa. Hal itu tampak sekali dari ketimpangan perhatian pemerintah terhadap bahasa Jawa sebagai salah satu bahasa daerah yang seharusnya diperhatikan. Di satu sisi pemerintah meresmikan buku *Pedoman Ejaan Bahasa Jawa yang Disempurnakan* (1974). Ironisnya, pada tahun berikutnya, ternyata pemerintah memberlakukan kurikulum 1975 yang menyisihkan pengajaran bahasa daerah, termasuk bahasa Jawa. Padahal, bahasa Jawa merupakan sarana untuk mengajarkan kebudayaan dan sastra Jawa. Dengan demikian, kebijakan pemerintah di dalam kurikulum 1975 itu secara langsung telah membunuh sastra daerah, termasuk sastra Jawa. Dari kebijakan itu mulai luntur atau hilang integritas penga-

rang dari masyarakatnya. Di sisi lain, masyarakat semakin berkembang secara kompleks, baik struktur maupun fungsinya. Semua itu turut melatarbelakangi tersisihnya sastra dari masyarakatnya sehingga sastra harus mencari atau mendapatkan pengayom.

Hubungan pengarang dengan pengayom menjadi semakin penting, dan tampak mulai bangkit ketika situasi pasar mulai meluas. Pada saat yang hampir bersamaan, jurnalisme dan penerbit --sejak akhir abad ke-18 sudah bangkit-- mulai bergairah dan mengembangkan diri. Fakta itu terjadi karena dukungan perpustakaan-perpustakaan yang seiring dengan perkembangan pendidikan formal juga mulai berkembang (Damono dkk., 1979:60-63). Peran perpustakaan menjadi penting karena kehadirannya sangat bermanfaat bagi perkembangan minat baca, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat luas.

Kehadiran lembaga penerbit dan perpustakaan di masyarakat itu berdampak kepada kelas-kelas masyarakat, terutama kelompok masyarakat rendah, seperti petani, nelayan, tukang-tukang, babu, dan jongos. Hal itu disebabkan oleh meluasnya informasi praktis bagi masyarakat, khususnya melalui rubrik-rubrik di dalamnya. Di samping itu, meluasnya peranan penerbit juga didukung oleh semakin tersedianya waktu senggang bagi kelas menengah akibat semakin terbebasnya kelas itu dari pekerjaan rutin yang digantikan dengan tenaga kerja urban dan mesin. Demikianlah, dalam sistem penerbitan, sastra hadir sebagai karya tunggal atau bagian dari antologi sebuah buku. Sementara itu, kehadirannya di dalam majalah atau terbitan pers, sastra hadir melalui rubrik-rubrik di dalamnya. Keadaan semacam itu terjadi di mana

pun, baik di negeri maju, di negeri berkembang, maupun di negeri miskin.

Dalam kehidupan sastra modern, kepengarangan dipegang oleh rakyat, sehingga pengarang bukan lagi menjadi pekerja profesional tunggal karena pekerjaan sebagai pengarang tidak lagi menjanjikan kesejahteraan hidup, seperti pada zaman sastra kerajaan. Jaminan sosial bagi mereka dapat diperoleh apabila mereka telah benar-benar populer atau dikenal oleh sebagian besar masyarakat, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Ketika penyebaran sastra semakin meluas, pengarang membutuhkan kehadiran sponsor atau pengayom untuk mengembangkan penerbitan lebih lanjut. Dengan semakin tersebar nya pendidikan dan kekayaan masyarakat, timbul kemungkinan-kemungkinan baru dalam hal sponsor atau pengayom. Misalnya, pengarang merujuk (secara langsung), atau melalui tanda-tanda verbal, seperti pilihan judul dan pilihan bahasa pengantar. Bahkan, arah atau tujuan pembacanya dapat juga dilihat dari gambar/ilustrasi pada sampul buku. Pilihan serupa itu mudah dikenali masyarakat kelompok tertentu sehingga mereka "merasa" terpanggil untuk membaca atau merespon. Cara memanfaatkan tanda-tanda spesifik seperti itu dalam sastra populer dapat membantu buku-buku itu cepat laku. Akan tetapi, ada pula kelompok pengarang yang tetap bertahan kepada harga layak. Kedua kelompok itu, masing-masing, berhasil mendapatkan kelompok pembacanya sendiri.

Dengan demikian, pengayom merupakan lembaga yang pertama-tama muncul --dan memberikan perhatian dan perlindungan kepada sastra-- pada pascakepengayoman kerajaan adalah pers dan penerbit. Pers atau penerbit itu pada

umumnya berupa lembaga swasta karena tugas kepengayoman tidak dapat dilepaskan dari masalah dana. Dengan demikian, pemilikan modal sangat penting. Dalam kaitannya dengan hal itu, dapat dikatakan bahwa pers dan penerbit pada umumnya merupakan lembaga swasta yang harus mandiri. Baru setelah kemerdekaan, muncul beberapa lembaga pemerintah yang bertugas melakukan kerja pembinaan, pelestarian, dan pengembangan sastra daerah melalui penerbitan.

3.1 Kepengayoman dari Penerbit dan Pers

Dikemukakan oleh Hutomo (1975:16) bahwa perkembangan sastra Jawa modern --terutama sejak tahun 1966-- dapat disebut sebagai "sastra majalah". Artinya, sastra Jawa hanya mampu terbit atau beredar di tengah masyarakatnya melalui rubrik-rubrik dalam majalah atau surat kabar berbahasa daerah. Hal itu disebabkan oleh semakin sedikitnya peran penerbit dalam penyebarluasan sastra, terutama sejak pencabutan subsidi kertas oleh pemerintah (Riyadi dkk., 1996:14). Fakta empirik menunjukkan bahwa sejak tahun 1966 telah muncul sejumlah besar majalah dan surat kabar berbahasa Jawa, seperti *Mekar Sari* (1957), *Gumregah* (1967), *Dharma Nyata* (1971), *Parikesit* (1971), *Kunthi* (1969), *Merdika* (1973), *Kembang Brayan* (1969), *Djaka Lodhang* (1971), dan *Tjendrawasih* (1975).¹³

Kehidupan pers daerah memang telah mulai tumbuh di daerah pesisir utara, yaitu di Semarang, dan pers daerah

13. Karena kesulitan kertas, majalah-majalah tersebut satu demi berguguran. Akhirnya, sejak tahun 1980-an hanya 5 buah majalah yang bertahan hidup, yaitu *Mekar Sari* walaupun kini hanya tinggal terbit per tiga bulan, demi mempertahankan SIUP—, *Djaka Lodhang*, *Jaya Baya*, dan *Panyebar Semangat*.

(berbahasa Jawa) yang pertama terbit adalah mingguan *Bromartani* (1885), di Surakarta. Mingguan tersebut tidak dibiayai oleh pemerintah (kolonial) seperti halnya *Kejawen* (1926) dan *Pandji Pustaka* (1924), tetapi dibiayai oleh keluarga Indo-Belanda, Hartevelt (Adams, 1994: van der Mollen, 1995). Dengan demikian, walaupun penerbitnya berkebangsaan Belanda, kebijakan yang dipilih diasumsikan bukanlah kebijakan kolonial yang memiliki tujuan dan persyaratan khusus yang sejalan dengan sistem pemerintah kolonial.¹⁴ Sebaliknya, sebagai penerbit swasta, masalah profit atau keuntungan pasti menjadi salah satu bagian dari sistem penerbitan, terutama karena pemilik modalnya adalah swasta. Berikut ini contoh halaman pertama harian berkala *Bromartani* tersebut, yang menunjukkan pula upayanya mencari tambahan modal penerbitan.



Halaman pertama *Bromartani*

14. Penerbitan *Kedjawen* (1933) adalah salah satu perwujudan Politik Etis Belanda, yaitu untuk mendukung butir 3: *educatie*.

Pada masa kolonial --setelah terbitnya *Bromartani*-- majalah dan penerbitan swasta tetap lebih banyak dipegang pemilik modal nonetnis Jawa, seperti Belanda, Arab (Penerbit *Abu Aisiyah*, *Poestaka Hisbulwathon*, 1923). Beberapa surat kabar dari pemilik modal Cina, antara lain, *Retno Dumilah*, *Darmo Kondho*, dan *Genthakekeleng*, Kondisi sosial-ekonomi pada waktu itu memang tidak memungkinkan kelompok pribumi memiliki modal besar. Di samping itu, kelompok pribumi itu, memang tidak memiliki pendorong untuk mengembangkan bakat dagang mereka. Oleh karena itu, amat jarang ditemukan pers atau penerbit pribumi pada era kolonial. Sebaliknya, pada masa itu penerbit pemerintah (kolonial) --yang berlandung di balik naungan Balai Pustaka-- hanya menunjukkan perhatian kepada kebudayaan daerah melalui majalah-majalah khusus. Misalnya, untuk mendukung pembinaan bahasa dan sastra daerah Melayu di Sumatra diterbitkan *Pandji Pustaka* (1923); untuk pembinaan bahasa dan sastra Sunda diterbitkan *Parahijangan* (1926); untuk pembinaan bahasa dan sastra Jawa diterbitkan *Kadjawen*, yang terbit pertama kali pada tahun 1926.¹⁵

Harian berkala milik nonpribumi Belanda tersebut bukanlah harian khusus budaya atau sastra, tetapi berupa harian berkala umum, yang di dalamnya didominasi oleh berbagai informasi faktual. Dengan demikian, sastra di dalamnya hanyalah bagian dari berbagai jenis rubrik umum. Posisi sastra dalam terbitan semacam itu menyiratkan makna bahwa rubrik sastra memiliki kesejajaran fungsi dengan

15. Di samping itu, sejak awal abad ke-20 muncul beberapa pemilik modal dari etnis Jawa yang menanamkan modalnya di bidang penerbitan harian dan majalah, seperti pada surat kabar *Pepadjar* (1926), *Kawi* (Solo, 1928), dan percetakan *Javaansche Drukkery Boekhandel Boedi Oetomo* (Solo, 1910).

rubrik-rubrik lain di dalam terbitan umum berkala itu. Menurut catatan Adams (1994:12), terbitan umum berkala tersebut baru memiliki tiga rubrik untuk sastra, yaitu bacaan, tembang, dan wayang.

Dikatakan pula oleh Adams (1994:13), bahwa hampir bersamaan dengan kehadiran *Bromartani* telah terbit sebuah jurnal khusus berbahasa Jawa yang berisi kumpulan khusus karya sastra, yaitu *Poesparinontje*. Berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik simpulan bahwa sejak terbit dan aktifnya pers di kalangan masyarakat Jawa --walaupun masih bersifat berkala dan isinya sederhana-- pers sudah dapat dianggap sebagai pengayom sastra, terutama sastra luar-keraton. Di samping itu, sejak *Bromartani* terbit, tidak dapat dipungkiri oleh masyarakat bahwa sastra Jawa bukan hanya sastra kerajaan (di Surakarta), tetapi ada pula sastra luar-kerajaan yang memiliki konvensi sendiri, tidak mengikuti konvensi kerajaan. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa sastra nonkerajaan memiliki komunitas tersendiri, baik komunitas pengarang maupun pembacanya.¹⁶

Kepengarangan luar-istana yang memiliki sistem kerja sendiri itu secara jelas tidak menunjukkan hubungannya dengan kepengarangan kerajaan, terutama dalam tradisi kepengarangan yang menyangkut gaji atau penghidupan.¹⁷ Profesi kepujangaan kerajaan atau keraton diperoleh melalui proses panjang yang harus diikuti seorang calon pujangga secara taat karena menjadi seorang pujangga memang ditun-

16. Sastra dari luar istana itu disebut sastra rakyat karena jenis sastra itu hampir tidak berkaitan dengan jenis sastra kerajaan.

17. Para pujangga kerajaan terlindungi oleh sistem kepujangaan dalam berbagai hal, seperti gaji dan perumahan. Sebagai imbalannya, seorang pujangga harus patuh kepada seluruh aturan kerajaan, termasuk di dalamnya harus menunjukkan loyalitas tunggal.

tut untuk memenuhi seperangkat persyaratan khusus, antara lain, pandai dalam ilmu gending, ilmu bahasa, ilmu sastra, dan ilmu kebatinan (Padmosoekatja, 1958:13). Oleh karena itu, profesi tersebut tidak dapat diikuti oleh setiap orang. Hal itu sangat berbeda dengan pengarang luar-istana (rakyat), seperti yang dikembangkan masyarakat di luar kerajaan, yang tidak tergantung sama sekali pada kepengayoman kerajaan dan raja. Sastra dari luar konvensi kerajaan itu berada dalam sistem kepengayoman yang baru, yang lain sekali dari kepengayoman kerajaan. Di luar jaringan kepengayoman kerajaan tersebut dimungkinkan muncul kepengayoman baru yang lebih bervariasi, dan salah satu di antaranya ialah penerbit. Dari kelembagaan itu sastra dicetak dan disebarluaskan atau dipublikasikan ke masyarakat. Dengan demikian, setiap karya sastra yang terbit melaluinya, baik dalam bentuk buku maupun surat kabar dan majalah, akan mengikuti kebijakan atau sistem yang berlaku pada setiap penerbit.

Bromartani terbit dengan modal dari luar penerbit pemerintah (Belanda), yaitu seorang Indo-Belanda: Hartevelt bersaudara. Setelah majalah itu, beberapa pemilik modal nonpribumi dan non-Belanda seorang Indo-Cina pun menanamkan modal dalam penerbitan, seperti dalam beberapa majalah berbahasa daerah yang diterbitkan di Jawa. Setelah kemerdekaan, sejumlah penerbit baru yang dimodali pribumi muncul. Selain terbitnya kembali *Panyebar Semangat* dan bangkitnya majalah baru *Djaja Baja* --yang menyusul kehadiran *Panjebar Semangat* di Surabaya-- di Surabaya (Jawa Timur) terbit lagi sebuah majalah berbahasa Jawa dari modal pribumi, yaitu *Obor*. Akan tetapi, majalah itu bersifat umum sehingga sastra belum mendapat rubrik di dalamnya.

Profesi kepengarangan dari luar kerajaan tersebut tidak selalu menjadi profesi tunggal, seperti yang terjadi pada para pujangga kerajaan yang hampir tidak memerlukan lagi nafkah tambahan karena lembaga kepengarangan adalah bagian dari sistem kerajaan. Berbeda sekali halnya dengan kehidupan para pengarang yang kelembagaannya tidak lagi menjadi bagian dari kerajaan, atau yang dilindungi oleh kolonial. Oleh karena itu, kebutuhan kehidupan sehari-hari pengarang harus diupayakan sendiri. Diterbitkannya karya-karya seorang pengarang, baik melalui penerbitan buku maupun melalui rubrik-rubrik khusus dalam surat kabar dan majalah, menandai bahwa kepengayoman kerajaan mulai bergeser. Akan tetapi, dalam hal pencukupan nafkah pengarang telah terjadi perubahan pula. Bila dalam sistem kerajaan pengarang terbebaskan dari kerisauan tercukupinya kebutuhan sehari-hari, para pengarang yang sudah terlepas dari sistem kepengayoman kerajaan harus mencukupi kebutuhan sehari-harinya sendiri. Mereka harus mencari "tempat" bagi penyebarluasan karya-karya mereka. Pendukung dana untuk penyebarluasan itu adalah penerbit dan pers dengan berbagai bentuk terbitannya, seperti jurnal, surat kabar, majalah, atau tabloid.

Diakui oleh beberapa pengarang Jawa pemula bahwa keadaan kepengayoman sastra Jawa periode 1981-1997 ialah majalah berbahasa Jawa karena lembaga inilah yang mendukung, menampung dan menyebarluaskan karya-karya mereka. Jadi, lembaga itulah pengayom sastrawan muda atau pemula untuk mengembangkan karya mereka dan menempatkannya pada khasanah sastra Jawa modern hingga saat ini. Penerbit yang menyusut memperhatikan sastra Jawa,

bahkan kepada ilmu-ilmu humaniora --karena dianggap tidak memberi untung-- turut mendorong sastra Jawa semakin terpuruk. Dengan demikian, sastra Jawa modern memang benar-benar hanya mempunyai induk angkat majalah-majalah berbahasa Jawa, seperti *Panjebar Semangat*, *Djaja Baja*, *Mekar Sari*, dan *Djaka Lodhang*, walaupun honorinya kecil.¹⁸ Oleh karena kecilnya honor itu, mereka tidak dapat hanya mengandalkan profesi mengarang, tetapi juga pada profesi yang lain. Beberapa jabatan selain mengarang yang banyak dimiliki pengarang Jawa ialah (1) guru (St. Iesmaniasita, Sri Setya Rahayu, Tamsir S.A., Esmiet, Jayus Pete, dan Moh. Yamin), (2) wartawan (Tut Sugiyarti Sayogya, Totilowati, Suharsini Wisnu, Moh. Nursyahid P, Yunani, dan N. Sakdani). Selain itu, ada pula pekerjaan lain yang digeluti pengarang Jawa, seperti buruh, pekerja kantor, dan pekerja seni lain (seperti yang dilakukan oleh Poerwadhi Atmodihardjo, Anjar Any, Sukoso DS, Jaimin K.). Dari fakta informatif tentang honorarium pengarang semacam itu, masih dapatkah penerbit majalah berbahasa Jawa ditempatkan sebagai pengayom sastra Jawa?

Hingga sekarang, pada kenyataannya pers berbahasa Jawa masih menjadi satu-satunya lembaga yang paling mendukung penyebaran sastra. Sejak awal kehadirannya, hampir setiap penerbit memiliki rubrik sastra dari bermacam-

18. Menurut informasi dari pengarang, honorarium untuk sebuah geguritan itu rata-rata antara Rp3.000,00 dan Rp5.000,00/sebuah (sekarang Rp7.500,00); sebuah cerpen rata-rata dihargai antara Rp15.000,00 dan RpRp25.000,00 (sekarang Rp30.000,00), dan untuk satu cerita panjang (novel/cerbung) sepanjang 10-15 seri dihargai sekitar Rp100.000,00—Rp150.000,00 (sekarang antara Rp150.000,00—Rp250.000,00). Hal itu dikukuhkan oleh informasi Soebagijo I.N. (1995).

macam jenis sastra, seperti rubrik puisi (tradisional dan modern), prosa, bahkan memuat pula artikel atau kritik sastra.¹⁹

Di dalam majalah-majalah berbahasa Jawa tersebut, puisi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu puisi tradisional (*tembang*) dan puisi modern (*geguritan*). Misalnya, dua buah kutipan dari dua jenis puisi berikut ini mewakili jenis puisi tradisional (*tembang*) dan puisi modern (*guritan*), yang masing-masing ditempatkan dalam rubrik yang berbeda di majalah Jawa *Djaka Lodhang*.

(1) Tembang Macapat

*"Nguri-uri Tembang Jawa Rerepene Wong Biyen:
sekar Dhandhanggula"*

Dening: S. Warsito

*Bantal panjang yen ndalu tan guling,
padhang mbulan kekadhar neng nglatar,
thenguk-thenguk lingguh dhewe,
angin ngidid sumiyut,
saya kekes rasaning ngati,
rumongso yen wong lola,
tanpa bapa biyung,
yen rina karanta-ranta,
lamun ndalu kelingan ra nduwe dhuwit,
sapa kang melasana.*

*Kuning-kuning adhinesing kuning,
kuningira gawe lara bronta,
lali dhahar lali sare,
katon nglela wong ayu,
yen sarea katon nglamlami,
ing ndhuwur manuk garudha, abang netranipun,*

19. Kritik sastra muncul sejak awal tahun 1950-an melalui majalah khusus *Tjrita Tjekak*—dengan nama rubrik "*Sorotar*" dan majalah ilmiah bahasa Jawa *Medan Bahasa Jawa*.

*mbalalak tanpa semu,
ja nucuk ing mripatira,
anucuka bebaya beka wong kuning,
kareben tutug nendra.*

'Bantal panjang bila malam tanpa guling,
terang bulan *kekadhar* di halaman,
duduk merenung sendirian,
angin berembus sumilir,
semakin dingin rasa hati,
merasa jadi orang yatim,
tanpa ayah bunda,
bila siang merasa sedih,
bila malam ingat tak punya uang,
siapa mengasihani.
Kuning-kuning berdinas dengan kuning,
kuningmu membuat jatuh cinta,
lupa makan lupa tidur,
tampak jelas manisku,
bila tidur tampak menyenangkan,
di atas burung garuda, merah matanya,
melotot tanpa takut,
mau mencotok matamu,
cotoklah bahaya milik orang kuning,
biarlah puas tidur.'

(2) Puisi Modern (*Geguritan*)

*Dongeng Langit
Dening: Suto*

*Langit sisih wetan nandhang sungkawa
nyandhang sarwa ireng warata
ora bisa mara
bisane mung menehi donga
muga amal becike ditampa sing Kuwasa
kaluputane bisaa diapura
amien*

Sleman, 1997

"Dongeng Langit"

Oleh: Suto

Langit di arah timur berduka
berbaju hitam rata
tak bisa ndekat
hanya bisa beri doa
smoga amal baik diterima Yang Kuasa
dapatlah kesalahan dimaafkan
amien

Sleman, 1997

Selain puisi Jawa modern (*geguritan*) dan puisi Jawa tradisional (*macapat*), jenis sastra Jawa yang memiliki rubrik tetap dalam majalah umum adalah wayang, cerpen (*cerkak*), cerbung, cerita rakyat, cerita anak-anak, dan sejak tahun 1960-an hingga kini berkembang tiga jenis fiksi populer, yaitu (1) cerita bergambar yang biasanya disebut dengan cerita bergambar (*cergam*) (Widati, 1998), (2) rubrik "*Jagading Lelembut*", dan (3) rubrik "*Karang Taruna*". Melalui rubrik-rubrik tersebut redaksi majalah umum berbahasa Jawa itu mendukung para pengarang muda untuk kreatif dan menjalin hubungan dengan kelompok pembaca dari berbagai lapisan masyarakat, baik generasi muda maupun generasi tua, dari kelompok masyarakat kota maupun desa. Kehadiran beraneka ragam rubrik itu menunjukkan bahwa redaksi membuka peluang bagi pengarang --melalui berbagai spesifikasi yang mereka miliki-- untuk berkomunikasi dan mencari kemungkinan meluaskan wilayah pembacanya. Bahkan, penerbit majalah *Jaya Baya* turut serta membina pengarang melalui salah satu rubriknya, "*Karang Taruna*". Misalnya, penyair wanita Titah Rahayu mengawali karier kepenyairannya melalui rubrik itu, yang selanjutnya mengembangkan diri di

Sanggar Triwidha dan Sanggar Rara Jongrang (Yogyakarta). Demikian pula halnya dengan penulis cerpen Yudhet, dan beberapa penulis lainnya juga berkembang melalui kantong-kantong sastra di daerah sehingga terjalin hubungan kerja sama dengan penerbit. Terjalannya komunikasi antara penerbit dan pengarang seperti itu tidak dapat dilakukan tanpa pilihan kebijakan penerbit dalam mengusahakan kontinuitas dan perkembangan rubrik-rubrik sastranya. Dalam penerbitan modern, sistem "mencari" pengarang dan karyanya adalah kerja penerbitan yang dianggap tepat dan cepat (Tanaka, 1976).

Sistem "mencari" pengarang (dan karyanya) memang berbeda dengan sistem "menunggu" datangnya pengarang (dengan karyanya), seperti yang dilakukan penerbit tradisional. Melalui sistem tersebut, penerbit menjadi dinamis, tidak statis. Hal seperti itulah kiranya yang dilakukan oleh dua penerbit di Jawa Timur, yaitu penerbit *Djaya Baja* dan *Panjegar Semangat*, dengan dua cara yang amat strategis. Strategi pertama adalah menarik masuk pengarang-pengarang ternama atau pengarang-pengarang besar ke dalam lingkungannya. Misalnya, *Djaya Baja* menarik masuk Suparto Brata, Tamsir AS (alm.), Tiwiek SA, St. Iesmaniasita, Basuki Rachmat, dan yang terakhir adalah Jayus Pete dan Aye Suharyono. Upaya penarikan pengarang dengan cara sengaja itu tampak dari permintaan langsung, atau melalui pemberian honor yang lebih tinggi daripada pengarang lain, yang tidak termasuk pengarang seleksi.²⁰ Strategi kedua adalah dengan cara melakukan komunikasi langsung dengan pengarang Jawa melalui

20. Menurut pengakuan Jayus Pete (pada th. 1992) ia merasa terkejut ketika menerima honor cerpennya yang dirasa amat tinggi (Rp75.000,00 padahal untuk honor pengarang lainnya baru sekitar sepertiganya).

kunjungan ke kantung-kantung sastra di daerah-daerah, seperti "*Sanggar Parikuning*" (Banyuwangi), "*Sanggar Sastra Triwidha*" (Tulungagung), "*Paguyuban Sastra Jawa Surabaya*" (Surabaya), dan "*Pamarsudi Sastra Jawi*" (Bojonegoro). Kemandirian penerbit amat penting dalam menentukan pelaksanaan program mereka. Majalah *Panjebar Semangat* dan majalah *Djaja Baja* yang berada di Jawa Timur itu, misalnya, adalah penerbit yang sudah lama hadir di dunia sastra Jawa modern, terlebih penerbit *Panjebar Semangat* (1933). *Panjebar Semangat*, didirikan oleh politikus Boedi Oetomo, yaitu dr. Soetomo, seorang tokoh yang memiliki modal sendiri dan teruji memiliki ketegaran yang tinggi.²¹ Majalah *Djaja Baja* memang baru terbit tahun 1945, tetapi modal yang dimiliki tetap modal yayasan sendiri, bukan modal dari sebuah lembaga induk.

Di samping itu, seperti halnya *Panjebar Semangat*, majalah baru yang berdiri pada awal kemerdekaan itu juga sudah banyak makan garam melalui pergantian bahasa pengantar yang berkali-kali (dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia, kemudian kembali ke bahasa Jawa tahun 1954) dan periode yang panjang dalam persaingannya dengan majalah berbahasa Jawa lainnya di kota tersebut, yaitu *Panjebar Semangat*, yang sudah terbit lebih awal. Seperti halnya pemilik modal pada majalah *Panjebar Semangat* yang dipegang swasta, *Djaja Baja* demikian pula. Yang penting dicatat ialah bahwa tidak adanya birokrasi panjang dari pelaksanaan kebijakan penerbit merupakan kunci bagi terlaksananya program, misalnya program pencarian pengarang. Hal semacam itu tidak terjadi

21. Sejak terbit pertama kali, majalah ini sudah berhadapan dengan majalah kolonial, baik yang berbahasa Jawa (*Kadjawen*) (1926) maupun yang berbahasa Indonesia (*Pandji Poestaka*) (1925).

di Yogyakarta dan Surakarta karena keberadaan penerbit majalah di dua kota itu memang berbeda. Penerbit majalah dari luar kota tersebut bukanlah penerbit mandiri, melainkan penerbit yang dimodali oleh penerbitan media komunikasi induk. Misalnya, majalah *Djaka Lodhang* (terbit pertama kali tahun 1971) dimodali oleh harian pagi *Bernas*, dan majalah *Mekar Sari*, (terbit pertama kali tahun 1957) dimodali oleh harian pagi *Kedaulatan Rakyat*. Fakta tersebut, setidaknya, dapat mengindikasikan bahwa ada kendala utama dalam proses mencari pengarang dan karya-karya sastra.

Sepanjang tahun 1981-1997 masyarakat pemakai bahasa Jawa memiliki tiga jenis majalah berbahasa Jawa yang memuat berbagai sastra Jawa. Jenis pertama adalah majalah berbahasa Jawa yang bersifat umum, antara lain *Mekar Sari*, *Djaka Lodhang* (di Yogyakarta), *Panjebar Semangat*, *Djaja Baja* (Surabaya). Jenis yang kedua adalah majalah umum berbahasa Jawa yang khusus atau terbatas untuk kelompok tertentu (yang bergama Katholik), yaitu *Praba* (Yogyakarta), dan tabloid berbahasa Jawa di Surakarta, yaitu *Punakawan*, yang selanjutnya berganti nama menjadi *Jawa Anyar* (setelah pindah di Surabaya), tetapi kini mati. Jenis ketiga, ialah majalah berbahasa Jawa yang secara khusus benar-benar memuat sastra Jawa, bukan majalah yang bersifat umum seperti halnya jenis pertama dan kedua. Majalah itu adalah *Pagagan* (terbit pertama kali tahun 1991) merupakan satu-satunya majalah sastra berbahasa Jawa yang masih hidup hingga saat ini. Majalah khusus tersebut dikelola dan diterbitkan oleh Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta (SSJY) dengan oplag yang terbatas karena memang ditujukan untuk pembinaan internal anggotanya.

Dari sisi perkembangan media massa, baik yang bersifat mengembang dan melemahnya kualitas, maupun naik dan turunnya oplag penerbitan tampak sekali bahwa sastra Jawa memang harus "memasrahkan" dirinya kepada pemilik modal atau penerbit. Kepasrahan diri itu meliputi dua hal, yaitu (1) pemuatan, dan (2) jumlah honorarium, yang ditetapkan penerbit secara sepihak (dalam kategori senior dan junior). Dalam hal pemuatan dapat dilihat beberapa hal yang ditentukan secara sepihak, seperti dalam penentuan lokasi atau ruang, yang meliputi posisi atau penempatan, urutan waktu pemuatan, dan keutuhan pemuatan naskah (faktor editing).

Penetapan honorarium juga bersifat sepihak --tetapi harus diikuti semua pihak-- karena kualitas memang bersifat relatif, tetapi merupakan urutan utama dalam syarat pemuatan. Kualitas itu bersifat relatif karena penerbit seringkali harus bertumpu pada pasar demi kepentingan penjualan atau profit.²² Dengan demikian, ukuran kualitas dimungkinkan tergeser oleh tuntutan pasar. Dalam kaitannya dengan hal itu, fakta empirik dari rubrik-rubrik sastra dapat digunakan sebagai data konkret. Misalnya, ada cerpen yang dapat panjang (*long-short story*), tetapi ada pula cerpen yang amat pendek (*short-short story*), yang seringkali dimasukkan dalam rubrik "*Roman Sacuwil*" atau "*Crita Sakaca*". Walaupun proses pemendekan dan pemanjangan itu bukan selalu ulah redaksi, fakta empirik sastra semacam itu dapat dikategorikan sebagai ketidakcermatan redaksi, atau menunjukkan sikap masa bodoh redaksi dan penerbit. Fakta itu menunjukkan pemuatan

22. Informasi itu diperoleh dari staf redaksi *Djaja Baja*, *Panjebar Semangat*, *Mekar Sari*, dan *Djaka Lodhang*.

sastra di dalam majalah seringkali tidak terkontrol oleh tujuan. Berbagai kemungkinan kebutuhan atau idealisme penerbit turut mempengaruhi bentuk sastra sehingga kadang-kadang terjadi perubahan-perubahan bentuk sastra.

3.2 Kepengayoman dari Lembaga-lembaga

3.2.1 Lembaga-Lembaga Pemerintah

Penjelasan UUD '45 BAB XV, pasal 36, ayat 2, tentang bahasa negara, menyebutkan bahwa bahasa-bahasa daerah yang masih hidup dan dipelihara oleh masyarakatnya akan dipelihara oleh negara. Dalam hubungannya dengan hal itu, secara implisit negara berkewajiban memelihara bahasa-bahasa daerah --termasuk di dalamnya budaya dan sastra daerah-- agar tidak rusak atau mati. Dengan demikian, seharusnya, pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah menjadi kewajiban negara, baik ditangani secara langsung maupun melalui lembaga-lembaganya yang terkait. Akan tetapi, benarkah demikian? Berikut ini akan ditinjau beberapa lembaga pemerintah yang berkaitan dengan deskripsi tugas pembinaan dan pelestarian bahasa-bahasa daerah tersebut.

Sebenarnya, lembaga negara yang terkait dengan pengembangan dan pembinaan sastra daerah cukup banyak. Lembaga-lembaga tersebut berada di (1) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang bernama Departemen Pendidikan Nasional), (2) Pemerintah Daerah atau Pemda, dan (3) Departemen Penerangan (sekarang bernama Kementerian Informasi dan Komunikasi). Departemen yang disebutkan pertama itu diharapkan membina dan mengembangkan sastra di pusat atau di daerah, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah. Departemen itu memiliki berbagai

jenis lembaga pembinaan formal, seperti sekolah-sekolah dan Pusat Bahasa (dengan Balai-Balainya).

Pemerintah Daerah diharapkan secara langsung menangani pembinaan kesenian di daerah-daerah, di setiap propinsi. Namun, struktur organisasi Pemda di setiap propinsi tidak selalu sama. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, misalnya, bagian dari lembaga tersebut --yang menangani pembinaan sastra-- ialah Biro Pembinaan Masyarakat dan Generasi Muda. Semula, di dalam departemen ini hanya meliputi pembinaan kepada Generasi muda, yang mengaitkan berbagai sektor kegiatan kepemudaan di dalamnya, terutama olah raga. Akan tetapi, selanjutnya, bidang ini meluaskan jangkauan pembinaannya kepada sektor kebudayaan. Di dalam kegiatan pembinaan kebudayaan itulah sastra seharusnya berada. Akan tetapi, pada kenyataannya, sastra sering amat terabaikan. Di daerah Istimewa Yogyakarta, misalnya, sastra baru menjadi bagian pembinaan Pemda sejak tahun 1989, ketika Pemerintah Daerah mulai menyelenggarakan festival kesenian daerah untuk merayakan hari jadi kota Yogyakarta, pada setiap bulan Juli. Di dalam kegiatan festival tahunan itulah sastra menjadi bagian dari kegiatan itu dan mulai mendapat dana untuk penyelenggaraan. Kegiatan tahunan tersebut masih berlangsung hingga sekarang.

Lembaga Pemerintah yang disebutkan pada urutan ketiga ialah Kementerian Informasi dan Komunikasi, suatu lembaga yang bertugas membina dan mengembangkan kesenian melalui jaringan publikasi informasi tulis, suara, dan audiovisual. Misalnya, penerangan masyarakat melalui siaran pers, penerbitan, radio, dan TV, serta penyebarluasannya. Sastra memang sangat sulit bila dikaitkan dengan misi penerangan, lebih-lebih penerangan pemerintah. Akan tetapi,

sastra dapat menjadi alat informasi sosial dan informasi intelektual melalui pikiran masyarakat. Sastra juga dapat menjadi media untuk mengemban misi lembaga pemerintah, misalnya dalam jenis sastra populer.

Kesenian --yang di dalamnya terkandung fungsi *dulce* dan *utile*-- adalah bagian kebudayaan yang sangat fleksibel untuk menerjemahkan berbagai informasi penting kepada masyarakat. Fungsi *dulce* atau fungsi keindahan yang tergarap dengan baik akan mampu meminimalkan fungsi *utile*, sehingga pesan khusus apa pun dapat diterima dengan enak. Misalnya, naskah siaran TVRI Yogyakarta "*Mbangun Desa*" yang ditayangkan secara rutin sebulan sekali di stasiun TVRI Yogyakarta adalah tayangan khusus yang berisi berbagai aspek pembinaan pemerintah bagi masyarakat. Dari segi misi yang diemban sangat jelas bila lembaga itu lebih mementingkan unsur *utile*, terutama karena mengemban misi Pemerintah --dengan media bahasa daerah--ditujukan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Walaupun siaran tersebut ditujukan untuk masyarakat pedesaan, pada umumnya acara "*Mbangun Desa*" tersebut dikemas dengan apik dan artistik. Hal itu dapat dilihat dari sangat dinanti-nantinya siaran tersebut oleh hampir semua pemakai bahasa Jawa, baik di desa maupun di kota.

Model siaran penerangan dalam TV tersebut juga pernah digunakan oleh Bagian Pembinaan Masyarakat, baik oleh RRI Nusantara II Yogyakarta maupun oleh beberapa TV siaran niaga (swasta), terutama ketika lembaga pemerintah itu masih menjadi bagian dari Departemen Penerangan. Diperkirakan, tugas sastra --terutama sastra untuk sarana penerangan-- hingga kini masih amat penting. Hal itu mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia masih tinggal di

desa-desa, yang sebagian besar masyarakatnya masih berpendidikan SLTA ke bawah. Dalam situasi pendidikan sedemikian itu penjabaran informasi secara bertahap masih sangat diperlukan.

1) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Sekarang Departemen Pendidikan Nasional)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (selanjutnya disebut Departemen pendidikan Nasional) ialah lembaga pemerintah yang bertugas menangani berbagai aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan masyarakat. Sastra adalah salah satu jenis kebudayaan --yang bermedia-bahasa-- berkaitan erat dengan pengembangan mental bangsa. Sesuai dengan sifatnya yang imajinatif, sastra tidak mendidik manusia secara langsung, tetapi secara tersirat karena sastra menggunakan bahasa sebagai sarana kreativitas. Bahasa sastra ialah ragam bahasa khusus yang mengandung konotasi tinggi sehingga pemahaman terhadap sastra --terutama puisi-- tidak dapat dilakukan dalam sekali baca. Bahkan, seringkali terjadi kesalahan pokok pada pemahaman sastra karena kesulitan dalam interpretasi. Dengan demikian, hasil pembinaan melalui sastra hasilnya tidak mungkin segera tampak secara transparan seperti halnya pendidikan olah raga atau pendidikan seni yang lain, misalnya seni musik, seni tari, dan seni rupa.

Pendidikan mental bangsa melalui seni sastra sudah dapat dibuktikan oleh pendidikan masa lalu, yaitu pendidikan di zaman raja-raja Jawa melalui buku-buku sastra (jenis *wulang* atau *niti*) karya para pujangga kerajaan. Pemahaman sejarah bangsa pun seringkali ditanamkan melalui buku-buku sastra, misalnya di dalam sastra Melayu atau dalam sastra

di daerah-daerah seperti di Jawa. Beberapa contoh dapat disebutkan di sini, misalnya *Hikayat Raja-raja Pasai*, *Sejarah Melayu*, *Pararaton*, *Serat Panitisastra*, *Babad Pakepung*, *Babad Diponegoro*, *Babad Pacitan*, dan sebagainya.

Dalam sistem kerajaan, raja berkuasa mendidik masyarakat sesuai dengan sistem yang berlaku. Dalam sebuah negara yang kuat memang dibutuhkan bangsa yang kuat pula. Oleh karena itulah raja atau pemerintah berkuasa mendidik masyarakat, bahkan keluarganya. Posisinya dalam pembinaan mental bangsa yang amat penting itu menyebabkan sastra di masa kerajaan diletakkan pada posisi yang strategis di dalam sistem pemerintahan. Sistem pendidikan sastra dilakukan secara formal atau melalui pendidikan secara resmi, dan juga secara nonformal atau secara tidak resmi. Pada masa kerajaan, sistem pendidikan sastra secara formal dilakukan oleh raja atau pujangga kerajaan --secara langsung dan tatap muka-- kepada para kerabat kerajaan. Adapun yang dimaksud pendidikan tidak langsung adalah pendidikan atau penerapan ilmu yang dilakukan secara perorangan atau kelompok masyarakat, misalnya dengan membaca atau mempelajari sendiri --atau dengan mendengarkan-- aneka buku-buku *babad*, *serat*, dan sebagainya yang ditulis para pujangga kerajaan. Memberikan pendidikan kepada keluarga dan masyarakat secara efektif ialah secara tidak langsung, dapat melalui contoh, atau dapat pula dengan dongeng. Dengan demikian, pendidikan ialah salah satu bentuk perhatian kepada sastra, dan kedua cara pendidikan tersebut terus berlanjut hingga sekarang. Sukses besar model perlindungan atau kepengayoman budaya melalui penyebaran buku-buku sastra *adiluhung* di masa kerajaan itu ditumbuhkan kembali oleh pemerintah, terutama sejak Pemerintah Orde Baru. Pada tahun

1980-1982, misalnya, diterbitkan kembali sejumlah besar buku-buku sastra klasik melalui Proyek Penerbitan Buku Depdikbud, antara lain penerbitan buku berbahasa Jawa, Sunda, dan Madura. Akan tetapi, sangat disayangkan bahwa taktik tersebut tidak diiringi dengan tindak lanjut. Fakta itu menandai perhatian pemerintah kepada pembinaan dan pelestarian bahasa-bahasa (dan sastra) daerah tidak serius.

Ratusan buku yang telah diterjemahkan ternyata tidak banyak berguna sebagai bacaan yang bermutu karena banyak salah cetak, banyak yang tanpa/lupa mencantumkan buku sumber, nama pengarang, dan sebagainya. Di sisi lain, pada waktu kini mulai banyak generasi muda dwibahasawan, tetapi bukan dwibahasawan bahasa Indonesia—bahasa daerah, tetapi Indonesia Inggris, Jerman, Prancis, Belanda sehingga mempengaruhi minat baca mereka terhadap bahasa dan sastra daerah. Itulah sebabnya, gairah membaca sastra daerah semakin merendah. Dengan rumitnya kondisi masyarakat dari waktu ke waktu --sejak kemerdekaan-- menjadi jelas bahwa wahana dan sarana pembinaan bahasa dan sastra daerah itu seharusnya melibatkan banyak lembaga, baik yang berada di lingkungan pemerintah maupun yang berada di luarnya. Berikut ini berturut-turut dibahas lembaga-lembaga di lingkungan pemerintah.

(a) *Sekolah Negeri*

Pada zaman kemerdekaan, terutama sejak Pemerintahan Orde Baru, terutama sejak tahun 1981-1997, penanganan kebudayaan --sastra sebagai bagiannya-- memang bukan hanya di sekolah. Tugas pembinaan itu juga diserahkan kepada lembaga-lembaga pemerintah lainnya yang memiliki keterkaitan dengan kebudayaan, seperti Depdik-

nas), Pemda, maupun Deppen (sekarang menjadi Kementerian Informasi dan Komunikasi). Meskipun demikian, sekolah tetap merupakan mata kunci --sekaligus mata rantai-- bagi keberlanjutan proses belajar-mengajar sastra. Lembaga pendidikan tersebut ialah lembaga pendidikan formal yang didatangi siswa atau generasi muda untuk belajar berbagai mata ajar secara resmi. Sekolah dan pendidikan tinggi memang tidak bertugas langsung dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan, walaupun di tengah berbagai mata ajar yang diberikan kepada siswa dan mahasiswa terdapat mata ajar atau mata kuliah yang berkaitan dengan kebudayaan daerah atau sastra daerah. Itulah sebabnya banyak pendidik, dosen, siswa, dan mahasiswa yang terjun langsung di bidang kreativitas sastra, baik sastra Indonesia maupun sastra daerah, di daerah masing-masing, dengan jenis sastra yang berbeda-beda. Meskipun demikian, keberadaan para guru atau pendidik di tengah program kreativitas sastra itu bukan berarti sekolah adalah pengayom penting bagi pelestarian dan pembinaan sastra, karena perlindungan dan perhatian sekolah terhadap sastra harus seimbang dengan perhatian sekolah kepada mata ajar atau mata kuliah lainnya.

Menurut kurikulum 1994, pelajaran bahasa (dan sastra) daerah diberikan di tingkat SD s.d. SLTP secara penuh. Adapun untuk SLTA hanya diberikan pada pilihan Program-4, yang merupakan program studi yang amat jarang diminati siswa. Dalam kurikulum 1994 itu mata ajar bahasa daerah dijadikan mata ajar muatan lokal (meliputi 20% dari muatan nasional) yang pada gilirannya diharapkan dapat menumbuhkan kembali perhatian dan apresiasi siswa kepada kebudayaan daerahnya. Akan tetapi, pada kenyataannya,

hasil pendidikan tersebut kurang berhasil guna karena kurikulum yang belum tertata secara tepat, di samping juga kepustakaan dan kualitas guru yang kurang memadai. Dengan demikian, perhatian sekolah kepada sastra daerah masih sangat terbatas kepada materi sastra Jawa dalam buku pegangan. Pembinaan luar-sekolah, misalnya pembinaan ekstra kulikurer tentang apresiasi siswa melalui pendidikan kesastraan, pembinaan penulisan kreatif dalam majalah dan koran dinding, atau pendidikan khusus yang disebut pendidikan ekstrasekolah masih belum dilaksanakan. Informasi yang dapat diterima dari sekolah-sekolah negeri tentang terbatasnya pengembangan pengajaran sastra di lingkungan pendidikan formal itu pada umumnya sama yaitu karena dana yang terbatas. Keterbatasan finansial seperti di sekolah-sekolah negeri itu hampir bukan menjadi kendala bagi sekolah swasta. Namun, kendala pengajaran bahasa dan sastra Jawa di sekolah swasta juga ada, misalnya keterbatasan mencari guru bahasa/sastra Jawa yang berkualitas.

Selain sekolah-sekolah negeri, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang bernama Departemen Pendidikan Nasional) masih memiliki beberapa lembaga yang lebih jelas fungsinya sebagai pengayom bagi perkembangan bahasa dan sastra Jawa, dan atau bahasa/sastra daerah di setiap daerah-daerah propinsi. Setidaknya ada dua lembaga pemerintah yang penting disebutkan, yaitu Pusat Bahasa beserta balai-balainya, Taman Budaya, dan Dewan Kesenian.

(b) *Pusat Bahasa dan Balai-balainya*

Beberapa lembaga pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan Depdikbud adalah sekolah, pendidikan tinggi, PPPG Kesenian, Pusat Bahasa (dan balai-balainya), Dewan

Kesenian, dan Taman Budaya. Meskipun semua lembaga tersebut memiliki keterkaitan dengan kebudayaan, tidak semuanya menunjukkan keberkaitan langsung dengan tugas pembinaan dan pengembangan sastra, lebih-lebih kepada sastra daerah. Lembaga pemerintah, semisal Pusat Bahasa beserta balai-balainya di daerah-daerah, Dewan Kesenian (sekarang menjadi Dewan Kebudayaan), dan Taman Budaya ialah lembaga nonedukatif yang memiliki program pembinaan kepada kebudayaan dan sastra daerah.

Pusat Bahasa atau Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ialah salah satu dari lembaga-lembaga pemerintah yang melaksanakan penelitian, pembinaan, dan pengembangan bahasa dan sastra. Seluruh unit tugas tersebut didasarkan pada tujuan pokok dan fungsi lembaga masing-masing, yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang menjadi Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata). Sebagai lembaga negara yang berpusat di Jakarta, lembaga ini harus dibantu oleh kantor-kantor di daerah-daerah sebagai tangan kanan di bidang litbang. Kantor-kantor di daerah itu, antara lain, ialah balai bahasa-balai bahasa dan balai-balai pengkajian kebudayaan lainnya, seperti Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional. Setiap balai itu SDM di dalamnya diasumsikan lebih memahami situasi di daerah sehingga diharapkan mampu melaksanakan tugas kepengayoman kebudayaan di daerah secara baik.

Baik program kerja yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan, dan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang dilaksanakan oleh lembaga tersebut mendapat alokasi dana dari APBN, dengan jumlah dana yang tergantung pada kondisi keuangan yang teralokasi. Hingga tahun 1998

terdapat 3 Balai Penelitian Bahasa --yang sekarang bernama Balai Bahasa-- di seluruh Indonesia, yaitu di Yogyakarta, Denpasar, dan Ujungpandang (Makasar). Balai Bahasa di Yogyakarta ditugasi meneliti, mengembangkan, dan membina bahasa dan sastra Jawa, dan Balai tersebut memiliki wilayah jelajah seluruh wilayah P. Jawa yang menggunakan bahasa ibu bahasa Jawa. Balai di Denpasar ditugasi untuk meneliti, mengembangkan, dan membina bahasa dan sastra di P. Bali dan sekitarnya. Adapun Balai Bahasa di Ujungpandang ditugasi meneliti, mengembangkan, dan membina bahasa dan sastra di P. Sulawesi. Jadi, pada setiap Balai Bahasa di daerah-daerah itu terbebani tugas memperhatikan dan membina bahasa dan sastra di masing-masing daerah.

Tugas sekolah dan lembaga pendidikan tinggi --yang juga bernaung di bawah satu kementerian itu-- memang sangat berbeda dengan Pusat Bahasa dengan balai-balainya di daerah-daerah karena lembaga-lembaga pemerintah itu secara eksplisit memang memiliki tugas pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra. Khusus untuk balai-balainya dari lembaga pusat itu memang bertugas mengembangkan dan membina bahasa dan sastra yang hidup di daerahnya masing-masing, yang mencakupi wilayah yang amat luas. Misalnya, Balai Bahasa di Yogyakarta bertugas mengembangkan dan membina bahasa dan sastra Jawa di sekitar daerah propinsi tersebut; Balai Bahasa Makasar bertugas meneliti dan mengembangkan bahasa dan sastra di Sulawesi, dan Balai Bahasa di Denpasar bertugas membina dan mengembangkan bahasa dan sastra di Propinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Bali. Karena beban yang berat untuk pembinaan bahasa dan sastra --terutama sastra daerah

yang amat beragam itu-- sejak tahun 2000 Pusat Bahasa berusaha mendirikan balai-balai dan kantor di setiap propinsi.

Pembinaan dan penelitian bahasa dan sastra daerah yang dilakukan Balai Bahasa-Balai Bahasa di daerah-daerah itu seharusnya mampu menumbuhkembangkan bahasa dan sastra daerah di daerah masing-masing. Cara yang dipilih sebagai cara pembinaan sastra di daerah bermacam-macam, tetapi pada umumnya menggunakan cara pembinaan tidak langsung atau pembinaan nonformal. Cara-cara pembinaan yang pada umumnya digunakan adalah dengan mengadakan sarasehan atau diskusi, lokakarya, pemberian hadiah penghargaan, dan pengadaan lomba.

Sejak tahun 1990-an Pusat Bahasa melakukan pembinaan sastra Indonesia secara tidak langsung, yaitu memberikan penghargaan sastra kepada para tokoh pengarang, mengadakan lomba penulisan cerita pendek, puisi, naskah drama, dan lomba menulis sastra rakyat. Program pembinaan langsung yang dipilih ialah dengan model membina siswa secara langsung dalam membaca puisi dengan musikalisasi. Selanjutnya, sejak tahun 1998, Balai Bahasa Yogyakarta mulai mencoba memberikan pembinaan sastra Jawa secara langsung juga dengan cara baru. Cara baru itu ialah memberikan pembinaan apresiasi sastra Jawa secara langsung kepada para guru SLTP se DIY dan anggota SSJY, selama sepuluh kali tatap muka. Hal itu dilakukan karena pada kenyataannya, kendala utama proses belajar-mengajar di sekolah terletak pada kualitas guru atau pengajar bahasa dan sastra Jawa yang rendah. Penelitian Riyadi dkk. (1987) tentang pengajaran sastra Jawa di SPG menunjukkan materi ajar yang amat terbatas, tidak seimbang dengan kenyataan empirik di lapangan. Hal itu lebih diperparah dengan kenyataan empirik

tentang guru (pada umumnya), atau pendidikan yang sebagian besar bukan berasal dari Jurusan Sastra Daerah, tetapi adalah guru acak dari bidang studi lain.

Pada dua kali pembinaan terhadap guru-guru ajar bahasa daerah di DIY itu ternyata hasilnya masih sangat kurang memuaskan karena banyak guru tidak merasa tertarik untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang bahasa dan sastra daerah. Hal itu ditandai dengan semakin menyusutnya jumlah peserta pembinaan, dari hari ke hari. Itulah sebabnya, sekolah tidak dapat diharapkan menjadi pengayom sastra daerah, khususnya bahasa dan sastra Jawa. Oleh karena itu, pada tahun 1999/2000 Balai Bahasa Yogyakarta mengubah sasaran didik pada guru-guru SLTP itu dengan menghentikan pembinaan guru-guru SLTP dan selanjutnya mengganti sasaran pembinaan kepada siswa-siswa SLTA di DIY, terutama bagi yang memiliki kepedulian kepada sastra daerahnya. Pembinaan langsung sastra Jawa kepada siswa SLTA itu juga mengalami kendala besar karena pada kenyataannya jarang dari mereka yang masih menguasai bahasa daerahnya dengan baik. Kelemahan bukan saja pada penguasaan gramatika, tetapi lebih-lebih lagi kepada perbendaharaan kata mereka yang amat buruk karena mereka juga tidak menguasai budaya Jawa dengan baik. Kegagalan kedua dalam memilih objek didik atau objek pembinaan itu menyadarkan pembina sastra di Balai Bahasa Yogyakarta menetapkan siswa SLTP sebagai objek didik karena merekalah yang hingga saat ini masih mendapat pendidikan bahasa daerah.²³

23. Siswa SD tidak dapat dipilih atas dasar pemikiran bahwa secara psikologis siswa SD belum mampu mengembangkan imajinya secara bebas dan benar.

Selain menggunakan bentuk pembinaan secara formal untuk pembinaan sastra kepada masyarakat, Balai Bahasa di Yogyakarta memberikan kepengayoman sastra Jawa melalui sanggar. Sanggar ialah suatu tempat atau wahana untuk pertemuan para pengarang dan pencinta sastra, guna memperbincangkan berbagai masalah kebudayaan, atau guna melakukan kegiatan kebudayaan, termasuk di dalamnya sastra. Di sanggar itu juga para anggota melakukan kreativitas sastra. Sanggar Sastra di Yogyakarta sebenarnya cukup banyak. Akan tetapi, sebuah sanggar yang dibina oleh Balai Bahasa Yogyakarta bernama Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta (SSJY), berdiri pada bulan Februari 1991. Pada awal kehadirannya, sanggar sastra tersebut mendapat dana bantuan dari dua lembaga pemerintah, yaitu Balai Bahasa dan Taman Budaya Yogyakarta. Kadang-kadang sanggar ini mendapat bantuan dari Dinas Kebudayaan, Dinas Kesenian, serta Dewan Kesenian. Akan tetapi, sifat kepengayoman itu tidak tetap, tergantung pada program tahunan dan dana lembaga-lembaga.

Program pokok kepengayoman sanggar terhadap sastra Jawa ialah untuk menghimpun para penulis sastra Jawa yang tersebar di berbagai penjuru Daerah Istimewa Yogyakarta, tanpa pandang bulu. Selain itu, pembinaan juga dilakukan dengan menyertakan para anggota ke lomba dan pentas seni di daerah sekitar dengan tujuan untuk melatih kemampuan anggota dalam berkreasi. Sanggar juga menghimpun karya para anggota dengan sebuah penerbitan yang dinamai *Pagagan*, yang semula disiapkan terbit per dua bulan, sama dengan jadwal pertemuan rutin anggota yang juga per dua bulanan. Akan tetapi, sejak krisis moneter melanda Indone-



sia, penerbitan intern itu mengalami kesulitan terbit teratur karena kesulitan dana.

Kegiatan SSJY yang diselenggarakan secara rutin per dua bulan itu diisi dengan berbagai cara, seperti diskusi untuk meningkatkan dan meluaskan apresiasi anggota, berlatih menulis karya sastra dan nonsastra, atau berlatih mengekspresikan karya sastra secara lisan. Dengan pembinaan yang bervariasi seperti

itu diharapkan para anggota sanggar tidak hanya mampu mendengar dan membaca karyanya sendiri, tetapi juga mampu membaca dan menanggapi karya orang lain sehingga, pada gilirannya, mereka mampu menulis sendiri.

Seluruh anggota sanggar sastra Jawa itu beraneka, baik dari usia maupun profesinya, yaitu dari generasi tua dan ada pula generasi muda, dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Keanekaan itu amat penting untuk menyiapkan masa depan dan untuk menciptakan berjenis pandangan, yang pada gilirannya mampu menciptakan komunitas sastra yang tidak monoton.

Hasil kreativitas para anggota Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta senior sudah banyak dimuat dalam majalah-majalah berbahasa Jawa, baik di Yogyakarta maupun di luar Yogyakarta. Namun, untuk pengarang junior SSJY juga menyediakan media terbitan dua bulanan, yaitu *Pagagan*, yang diarahkan untuk pembinaan para anggota. Dengan

rubrik khususnya *Pagagan* memberi evaluasi terhadap karya para anggota. Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta (SSJY) pernah menghimpun cerpen-cerpen terpilih para anggotanya ke dalam antologi dengan judul *Pilihan Lurah* (1993).

(c) *Taman Budaya*

Taman Budaya adalah suatu lembaga pemerintah yang berada di bawah Kanwil P dan K (Depdikbud), tetapi sejak tahun 2003 menjadi bagian dari lembaga lokal di setiap propinsi. Lembaga tersebut berada di ibu kota-ibu kota propinsi di Indonesia. Mereka dilimpahi tugas oleh pemerintah untuk membina, melestarikan, dan jika mungkin mengembangkan berbagai aspek kebudayaan di daerah, di setiap propinsi, seperti halnya lembaga-lembaga yang berada dalam naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Departemen Pendidikan Nasional).

Lembaga pemerintah yang disebut Taman Budaya dan Dewan Kesenian itu hanya ada di ibu kota propinsi, tetapi di dalamnya ada dinas-dinas yang menangani pembinaan di daerah. Semula, di Pulau Jawa ada tiga buah Taman Budaya yang memiliki tugas melaksanakan pembinaan kebudayaan Jawa, termasuk di dalamnya pembinaan seni sastra (Indonesia dan Jawa). Seperti halnya Balai Bahasa, lembaga-lembaga milik pemerintah seperti yang telah disebutkan itu kini didirikan di hampir semua ibu kota propinsi. Sebagai lembaga pemerintah, dana untuk operasionalnya tentu saja diperoleh dari pemerintah melalui dana APBN/APBD. Sastra yang hidup di setiap daerah --baik sastra Indonesia maupun sastra daerah-- seharusnya menjadi bagian dari lingkup pembinaan lembaga-lembaga tersebut, termasuk lembaga yang bernama Taman Budaya dengan para pamong budaya

di dalamnya. Beberapa tugas pokok lembaga tersebut adalah (1) menggali dan melestarikan unsur-unsur kebudayaan daerah yang hilang atau terlupakan; (2) melakukan pembinaan tentang kebudayaan (termasuk sastra) kepada masyarakat di daerah, dan (3) memberi peluang generasi baru di daerah --yang akan meneruskan kehidupan serat-serat budaya di daerah-- untuk mengembangkan diri.

Di Yogyakarta, Taman Budaya cukup banyak membantu pengembangan sastra Jawa. Lembaga ini sering menyelenggarakan program pembinaan dengan bagus karena program tersebut ditata dengan rapi dan berjenjang. Pada tahun 1990, misalnya, Taman Budaya Yogyakarta bekerja sama dengan Balai Bahasa Yogyakarta (dahulu masih bernama Balai Penelitian Bahasa) dalam menyelenggarakan pembinaan sastra Jawa. Kegiatan itu dirancang dalam bentuk paket, yang diawali dengan lokakarya (tanggal 15-16 Desember 1990) dengan tajuk "Temu Pengarang, Penerbit, dan Pembaca Sastra Jawa". Hasil yang tersimpulkan dari kegiatan tersebut, antara lain, menyebutkan bahwa pengarang, penerbit, dan pembaca sastra Jawa di Yogyakarta dan sekitarnya perlu mendapat perhatian pemerintah. Kegiatan itu kemudian disusul dengan lomba penulisan *guritan* dan cerpen pada tahun berikutnya (1991). Naskah pemenang lomba tersebut --lomba *guritan* dan cerpen/*cerkak*-- dihimpun dalam sebuah buku berjudul *Antologi Cerita Pendek dan Puisi Jawa Modern: Hasil Lomba Penulisan Cerita Pendek dan Puisi*.

Dari hasil lomba itu terlihat peta perkembangan cerita pendek dan cerpen Jawa Modern yang ternyata lebih didominasi oleh kelompok pengarang Jawa Timur. Fakta itu mendorong Taman Budaya Yogyakarta untuk menindaklanjutinya, dengan pilihan program loka karya penulisan *cerkak*

(cerpen) dan *guritan* (puisi Jawa modern). Berikut ini antologi hasil lomba penulisan *cerkak* dan *guritan* oleh Taman Budaya itu.



Antologi hasil lomba penulisan *cerkak* dan *guritan* oleh Taman Budaya

Sebagai lembaga pemerintah, tugas yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang disebut Taman Budaya --dan didukung oleh Dewan Kesenian-- tersebut tidak dapat dilepaskan dari kebijakan-kebijakan pemerintah, serta harus berpijak pada UUD '45 Pasal 36 dan Pancasila. Dengan demikian, kedua lembaga tersebut bekerja secara birokratis, yang terlihat dalam keharusan membuat proposal dan memberi pelaporan tahunan secara rinci. Tidak mengherankan bila pengembangan sastra melalui sistem birokrasi semacam ini seringkali menyulitkan pelaksanaan program itu sendiri.

2) Pemerintah Daerah (Pemda)

Lembaga pemerintah selain Kanwil P dan K (sekarang disebut Dinas Pendidikan Nasional), secara jelas bertugas membina kesenian ialah Pemerintah Daerah melalui (1) Bidang Pembinaan Sosial untuk tugas pemberian dana, dan (2) melalui Dinas P dan K (sekarang Dinas Pendidikan Nasional) untuk pembinaannya. Akan tetapi, selanjutnya, terutama tentang tugas pendanaan kepada berbagai jenis kesenian dialirkan melalui alokasi dana Dewan Kesenian (sekarang menjadi Dewan Kebudayaan). Sedangkan pembinaan pentas dilakukan dengan izin dan dana pementasan, yang dilaksanakan per tahun secara rutin. Seperti dalam pembinaan sanggar-sanggar, Dewan Kesenian (atau Dewan Kebudayaan) tidak melaksanakan sendiri, tetapi hanya mengalirkan dana pembinaan dari Pemda.

Khusus untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, misalnya, sejak tahun 1989 dilaksanakan Festival Kesenian Yogyakarta (FKY) yang diselenggarakan kurang lebih selama sebulan, sepanjang bulan Juli. Pembukaan festival tersebut biasanya dilaksanakan pada hari ulang tahun kota Yogyakarta, tanggal 7 Juli. Pada festival tersebut ditunjukkan puncak-puncak kreativitas kesenian dari berbagai cabang seni di propinsi tersebut melalui pagelaran-pagelaran, di ibu kota propinsi sendiri maupun di ibu kota-ibu kota kabupaten. Sastra Jawa, biasanya, menunjukkan dirinya dengan dua cara, yaitu dengan (1) pagelaran baca *geguritan* dan *cerkak*, dan (2) menerbitkan antologi *geguritan* dan *cerkak*. Setidaknya ada empat buah buku antologi dari kegiatan bidang seni sastra Jawa.

Kegiatan yang melibatkan sastra Jawa tersebut hingga akhir tahun 1997, bahkan hingga tahun 2000, masih berlangsung dengan baik, dan kegiatan semacam itu selanjutnya juga

diselenggarakan di ibu kota dua propinsi lainnya di P. Jawa, yaitu Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi Jawa Timur. Di kedua propinsi itu mayoritas penduduknya berkebudayaan Jawa dan berbahasa Jawa. Hal itu terbukti dengan diselenggarakannya kegiatan serupa di Surabaya, yang dikaitkan dengan Hari Jadi Kota Surabaya, dan di Semarang dengan hari jadi kota Semarang.

3.2.2 Lembaga-Lembaga Swasta

Seperti telah disebutkan di depan bahwa di samping lembaga-lembaga pemerintah sebenarnya ada beberapa lembaga swasta yang juga berfungsi sebagai pelindung atau *maecenase* bagi kebudayaan daerah (termasuk sastranya). Beberapa lembaga swasta yang penting disebutkan di sini adalah (1) Javanologi, (2) Lembaga Studi Jawa (LSJ), dan (3) Yayasan Sastra "*Rancage*". Ketiga lembaga swasta itu memang memiliki misi khusus melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah, termasuk sastra daerah. Dengan demikian, lembaga swasta ini memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap pelestarian dan perkembangan budaya (dan sastra) daerah. Lembaga semacam itu dengan sadar menghimpun dan menyediakan dana untuk usaha pelestarian, pengembangan berbagai aspek kebudayaan daerah, termasuk di dalamnya sastra Jawa. Berikut ini pembahasan terhadap ketiga lembaga swasta itu.

(a) *Javanologi*

Lembaga ini berdiri pada tahun 1985 ketika Menteri Pendidikan RI ialah Dr. Daud Joesoef. Proyek Javanologi tersebut didirikan sebagai proyek percobaan bagi pembinaan kepada kebudayaan daerah di Indonesia, seperti Jawa,

Sunda, Minang, dan Madura, yang diawali dengan kebudayaan Jawa (Javanologi). Kebudayaan Jawa dipilih sebagai percobaan perdana karena masyarakat Jawa merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia. Selain itu, kebudayaan Jawa ialah salah satu dari kebudayaan daerah di Indonesia yang hingga kini masih hidup dan berkembang. Proyek tersebut diketuai oleh Dr. Soeroso, M.A.

Tujuan pokok pendirian lembaga khusus kebudayaan di Indonesia tersebut ialah "menciptakan kehidupan kebudayaan yang dinamis dan yang sanggup menunjang kehidupan kebudayaan Indonesia melalui kebudayaan-kebudayaan daerah sesuai dengan teori kebudayaan. Dalam tujuan tersebut terkandung tujuan lain, yaitu memperteguh kepribadian bangsa melalui pembinaan karakter dan pembinaan pengembangan bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional. Di samping itu, Proyek Javanologi tampak menyiapkan diri untuk menjadi pengayom unsur-unsur Kejawaen. Ada 2 kegiatan nyata yang dilakukan lembaga tersebut, yaitu (1) memperkenalkan kembali dan menyebarluaskan sifat-sifat kebudayaan Jawa, (2) memperkenalkan dan menyebarluaskan hasil penelitian dan hasil pengembangan aspek-aspek kebudayaan Jawa. Salah satu hasil konkret lembaga tersebut adalah dihidupkannya kembali tradisi *ruwatan* dan upaya transliterasi *Serat Centhini* (oleh Karkana Kamadjaja). Selain dua kegiatan tersebut, *Javanologi* juga menyelenggarakan penelitian sastra dan budaya Jawa, dan hasilnya diterbitkan secara stensil, untuk kepentingan intern.

Proyek Javanologi yang dikelola oleh P dan K (waktu itu) akhirnya mulai menunjukkan arah yang jelas ketika pergantian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dari Kabinet Pembangunan (yaitu pada tahun 1983) Menteri Pendi-

dikan diganti, dari Dr. Daoed Joesoep kepada Prof. Dr. Nugroho Notosusanto. Sebagai orang dari etnis Jawa, Nugroho Notosusanto takut dipandang hanya mementingkan kebudayaan sendiri, yaitu kebudayaan Jawa. Oleh karena itu, menurutnya, logi-logi yang lain perlu didirikan, seperti Baliologi, Sundanologi, Batakologi, Melayulogi, dan La Galegologi (Sulawesi Selatan). Logi-logi tersebut akan dinaungi oleh Indonesialogi sehingga tidak akan ada logi-logi yang bersaing tidak sehat. Akan tetapi, gagasan itu ternyata tidak dapat terbentuk karena Nugroho Notosusanto meninggal.

Kegagalan membentuk Indonesialogi itu tidak menghentikan kelompok Javanologi karena lembaga ini telah berdiri selama beberapa tahun sehingga program kerja sudah berjalan. Bagi Javanologi kehadiran banyak logi di Indonesia tidak akan berhasil dengan baik karena justru dimungkinkan memecah persatuan bangsa. Oleh karena itu, Ketua Javanologi --didukung Karkono Kamajaya-- tetap melanjutkan Javanologi dan mengesahkan lembaga itu sebagai yayasan ilmu pengetahuan tentang Jawa yang diberi nama "Yayasan Javanologi *Panunggalan*".

Yayasan Javanologi *Panunggalan* tersebut tidak bersifat yayasan tunggal, tetapi memiliki induk dan cabang. Kantor induknya bertempat di Jl. Sidobali 1, Yogyakarta, sedangkan cabang-cabangnya tersebar, seperti di Jakarta, Surabaya, Surakarta, dan Kediri. Pada tahun 1991, Yayasan Javanologi *Panunggalan* memantapkan diri sebagai pengayom kebudayaan Jawa (bagian darinya adalah sastra Jawa) dengan membentuk "Lembaga Pelestarian Kebudayaan". Sementara itu, faktor SDM, kepemimpinan dan pengelola yayasan sulit dikelola. Pada tahun 1990 sejumlah logi yang dibentuk oleh Departemen P dan K --dan telah menghabiskan banyak dana--

itu dibubarkan pemerintah. Kini, hanya tinggal sebuah yayasan kebudayaan Jawa di Yogyakarta yaitu: Yayasan Javanologi *Panunggalan*, yang pertama kali berdiri dipimpin oleh Dr. Soeroso, M.A. Sampai sekarang, lembaga ini masih aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan kejawaan. Untuk meringankan beban dana, mereka sering melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah, misalnya dengan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.

(b) *Lembaga Studi Jawa*

Sebuah penerbit harian berbahasa Indonesia yang berkaitan dengan peran kepengayoman bagi sastra Jawa ialah penerbit harian *Kompas*. Harian berstatus independen dan sangat besar jumlah oplagnya ini. memiliki kepedulian terhadap kebudayaan Jawa dan melalui kantung dana yang bernama "Kepedulian kepada budaya", yayasan tersebut mendirikan sebuah lembaga studi kebudayaan Jawa, bernama "Lembaga Studi Jawa" (LSJ). Lembaga itu didirikan pada bulan April 1994 di Tembi, Jalan Parangtritis, Yogyakarta. Meskipun secara *de facto* lembaga itu telah berdiri tahun 1994, tetapi baru diresmikan pada 6 September 1995, dengan upacara pembukaan perdana berupa peluncuran buku-buku Jawa yang diterbitkannya, selanjutnya disambung dengan diskusi.

Lembaga studi Jawa ini memprogramkan berbagai kegiatan, seperti diskusi kebudayaan, bukan hanya sastra Jawa. Kegiatan rutin lembaga ini ialah diskusi kebudayaan, pementasan wayang (pada situasi khusus), dan kadang-kadang juga menyelenggarakan *ruwatan*. Sebagai sebuah lembaga studi kebudayaan Jawa, gedung lembaga tersebut dibangun dengan bentuk khas, yaitu joglo, seperti berikut ini.



Kompleks Lembaga Studi Jawa

Lembaga swasta yang didanai harian *Kompas* itu didukung oleh beberapa bidang atau bagian, yaitu (1) Bagian Data dan Informasi Budaya, (2) Bagian Kajian Sastra dan Budaya, (3) Bagian Ensiklopedi, (4) Bagian Dokumentasi Budaya, (5) Bagian Pekayaan Budaya, (6) Bagian Perpustakaan, (7) dan Bagian Kajian Budaya dan Perubahan Sosial. Pembagian kerja secara rinci tersebut dimaksudkan agar dapat dikerjakan secara proporsional dan mendapatkan hasil yang optimal.

Dilihat dari banyaknya bagian-bagian dari lembaga tersebut dapat diperkirakan bahwa kegiatan lembaga tersebut tidak terbatas pada penyelenggaraan hiburan, seperti pagelaran wayang kulit, tetapi juga dapat sebagai penyelamat --seperti dengan menyelenggarakan diskusi kebudayaan, pembuatan dokumen tentang aspek-aspek kebudayaan Jawa melalui audio-visual--, menyiapkan dan membina masyarakat pendukung, bahkan sampai juga pada penerbitan, dan pendidikan multimedia.

Dengan biaya penyelenggaraan oleh harian *Kompas* --melalui dana utama dari kantong pengabdian masyarakat-- dan didukung oleh beberapa instansi terkait, Lembaga Studi Jawa itu memiliki dua sasaran utama, yaitu (1) sasaran jangka pendek dan (2) sasaran jangka panjang. Target atau sasaran jangka pendek adalah inventarisasi dan dokumentasi data dari berbagai aspek budaya Jawa ke dalam bank data (*data base*) kebudayaan Jawa. Program jangka pendek ini didukung oleh bagian-bagian kegiatan lain dari lembaga tersebut. Adapun program jangka panjang Lembaga Studi Jawa berupa upaya pengemasan unsur-unsur budaya Jawa menjadi produk industri --khususnya melalui multimedia interaktif (*interactive multimedia*)-- yang dikemas dalam sistem kerja industri budaya Jawa. Dilihat secara eksplisit dan implisit lembaga tersebut dapat disebut sebagai mentor bagi sekelompok lembaga terkait yang salah satu tugasnya ialah melindungi sastra Jawa.

c) *Yayasan Kebudayaan "Rancage"*

Yayasan ini diangkat dari istilah bahasa Sunda, "*Rancage*" yang berarti kreatif. Sebagai lembaga yayasan ini baru berdiri dan diakui pada tanggal 23 Maret 1993, di depan Notaris Imas Fatimah, S.H. Yayasan itu, sebenarnya, sudah mulai aktif sejak tahun 1989 dengan kegiatan pokok yang terbatas, yaitu pemberian hadiah sastra Sunda. Sistem kerja penentuan hadiah itu ialah dengan menilai hasil terbitan selama satu tahun terakhir penuh, untuk diserahkan pada awal tahun berikutnya.

Jadi, yayasan tersebut bukanlah milik orang Jawa, tetapi milik orang Sunda, Ajip Rosjidi. Ia adalah seorang sastrawan Indonesia yang autodidak, seorang intelektual, seorang

penerbit, dan sekaligus budayawan. Inisiatifnya dalam mendirikan yayasan tersebut berangkat dari kesadarannya bahwa sastra Sunda bernasib sama dengan sastra daerah lainnya, terabaikan oleh masyarakat. Bahkan, sampai sekarang pun sastra daerah masih tetap sebagai masalah masing-masing suku atau etnis. Hal itu terbukti dari pengembangan sastra daerah yang diserahkan kepada inisiatif suku masing-masing. Sampai sekarang pun tidak ada yayasan atau perorangan yang peduli kepada sastra daerahnya. Oleh karena itu, sikap Ajip Rosidi dalam menangani sastra Sunda --dengan tetap bersandar pada landasan kokoh, yaitu memelihara dan mengembangkan bahasa dan budaya daerah— menyisihkan sebagian gaji untuk pembinaan. Selain hadiah *Rancage*, Yayasan itu juga mengeluarkan "Hadiah Khusus untuk Penulisan Cerita Anak-anak Berbahasa Sunda", dan hadiahnya diberi nama "Hadiah Samsudi". Prinsip yang dipegangnya ialah agar masyarakat daerah tidak bersikap seperti "Kacang lupa pada kulit". Untuk itulah ia melakukan tindakan pembinaan konkret (sebelum "Yayasan *Rancage*" berdiri) dengan cara (1) selalu kembali pulang pada setiap tahun (ketika tinggal di Jepang), dan (2) memberikan sebagian dari rejekinya kepada sastrawan Sunda yang menulis dengan baik. Penghargaan diwujudkan dalam bentuk piagam dan uang pembinaan.

Sejak awal, Yayasan *Rancage* tersebut sudah memberikan penghargaan sastra Sunda. Baru pada tahun 1994 (24 Maret) "*Ran-*



RANCAGE

cage" mulai memberikan hadiah sastra kepada sastrawan daerah lain, yaitu kepada sastrawan dan pembina sastra Jawa. Untuk itu, Yayasan *Rancage* menunjuk seseorang sebagai penilai. Sastrawan Jawa pertama yang menerima hadiah "*Rancage*" itu ialah sastrawan dan budayawan senior Soebagijo I.N. untuk kategori pejuang sastra Jawa, sedangkan untuk hadiah karya sastranya diterimakan kepada Naniek P.M. (samaran dari Pamudji, seorang guru) dengan novelnya "*Sumpahmu Sumpahku*". Berikut ini adalah Drs. F.C. Pamudji ketika menerima hadiah "*Rancage*" di aula Universitas Pajajaran, Bandung dari Ajip Rosidi, pada tahun 1994.

Pemberian penghargaan "*Rancage*" tersebut berlangsung secara terus-menerus, setiap tahun, dan sekarang (1999) hadiah tersebut mencakupi sastra Sunda, Sastra Jawa, dan Sastra Bali.

BAB IV

BENTUK-BENTUK KEPENGAYOMAN

4.1 Aneka Rubrik untuk Sastra Jawa

Seperti telah disebutkan di depan, penerbit dan majalah merupakan pengayom yang pertama-tama muncul untuk melindungi sastra Jawa. Hal itu terjadi setelah kepengayoman dari kerajaan berhenti sepeninggal R. Ng. Ranggawarsita. Kepengayoman dari penerbit --baik penerbit buku maupun majalah-- itu ditunjukkan dengan disediakan ruang bagi sastra Jawa, melalui aneka nama rubrik.

Apabila diperhatikan secara mendalam tampak bahwa setiap penerbit memiliki selera atau wawasan sendiri-sendiri tentang idealisme sastra Jawa. Rubrik-rubrik yang dimiliki pada masing-masing majalah menunjukkan kecenderungan atau arah perhatian dari setiap penerbit. Ketidaksamaan perhatian majalah/penerbit kepada sastra itu juga tampak melalui cara atau penanganan dalam editing atau penyuntingan. Majalah *Panyebar Semangat*, *Jaya Baya*, misalnya memberi perhatian cukup besar kepada pemakaian bahasa Jawa yang baik dan benar. Oleh karena itu, faktor penyuntingan mendapat porsi tinggi, yang dapat dilihat dari

sedikitnya kesalahan ejaan di dalamnya. Di samping itu, di dalam majalah-majalah itu pemotongan naskah juga jarang dilakukan dengan semena-mena. Hal yang sebaliknya adalah yang terjadi di dalam majalah *Mekar Sari* (terbit pertama kali tahun 1957). Majalah umum berbahasa Jawa ini berlandung di balik fondasi keuangan harian umum *Kedaulatan Rakyat*. Kepemimpinan yang berganti-ganti --walaupun masih tetap dipegang oleh keluarga-- itu ternyata tidak memiliki perhatian yang selalu sama kepada majalah berbahasa Jawa tertua kedua di Yogyakarta tersebut. Hal itu terbukti dengan oplag majalah yang rendah dan berkali-kali majalah itu harus hidup dengan kembang kempis.

Sejak awal tahun 1990, majalah ini sudah goncang, walaupun beberapa tokoh besar masih ada di dalamnya. Mereka adalah Handung Kussudiyarsono (Rama Ndung), Bondan Nusantara, Warisman, Sarworo Suprpta, Suwariyun, dan beberapa orang lainnya. Ketiga tokoh besar dari tokoh-tokoh dalam majalah *Mekar Sari* tersebut (Handung Kussudiyarsono, Bondan, dan Suwariyun) membuat gebrakan-gebrakan untuk perbaikan majalah, misalnya mengubah visi, yang pada gilirannya terbukti dapat mengangkat atau meningkatkan oplag, seperti tampak pada contoh.



Kopi di depan ialah salah satu gebrakan *Mekar Sari* (pada tahun 1990-an) yang menantang, yang diharapkan akan mengubah visi majalah tersebut dari majalah yang berorientasi kepada majalah *Kadjawen* (untuk golongan menengah ke bawah) menjadi majalah *Kadjawen* untuk golongan menengah ke atas, khususnya untuk masyarakat (*kawula*) muda di kota-kota. Pengubahan visi tersebut dilontarkan melalui hadirnya dua gagasan baru. Pertama, yaitu menjadikan bahasa pengantar di dalam rubrik-rubriknya sebagai bahasa Jawa untuk generasi muda, seperti tampak dalam contoh di depan. Artinya, bahasa Jawa yang digunakan sebadai media komunikasi dalam rubrik-rubriknya diusahakan sederhana, mudah ditangkap sehingga menarik anak muda untuk belajar bahasa Jawa dan membaca majalah-majalah Jawa.

Kedua, redaksi menyiapkan jenis-jenis rubriknya ke arah rubrik anak-anak muda yang berbudaya maju dan berpikiran kritis. Misalnya, munculnya rubrik eksklusif seperti musik, teknologi modern, dan rubrik kritik diharapkan dapat mengajak generasi muda untuk membaca artikel-artikel tersebut. Pilihan rubrik-rubrik baru itu diperkirakan sesuai dengan jiwa anak-anak muda masa kini yang dinamis. Nilai-nilai budaya tradisional tetap dihadirkan, tetapi disuguhkan dengan ragam *ngoko* dan ditransformasikan ke dalam bentuk-bentuk yang sesuai dengan zaman. Rubrik "*Seninjong*", misalnya, adalah salah satu dari rubrik-rubrik yang disiapkan untuk menarik sikap kritis generasi muda. Rubrik "*Anjangsana*" adalah rubrik wisata yang "dijauhkan" dari sekadar usaha "ziarah" ke tempat-tempat bersejarah. Dengan demikian, perubahan suasana dalam majalah *Mekar Sari* itu benar-benar ingin di arahkan kepada kehidupan anak-anak muda, atau generasi penerus yang mampu berbahasa Jawa. Berikut

untuk menunjukkan kesungguhan dan validitas karya yang disajikan.

Kehadiran jenis cerpen yang sangat pendek (*short short-story*) menjadi "*Roman Sacuwil*" dan "*Crita Sakaca*" bukan hanya untuk mengisi kolom pendek, tetapi dikembangkan menjadi jenis cerpen yang betul pendek. Oleh karena itu, rubrik ini juga merupakan rubrik-rubrik yang disiapkan untuk jenis cerpen pendek, tetapi juga untuk mengisi ruang/tempat bagi sastra. Kelihatannya rubrik tersebut kurang bermanfaat karena ceritanya pun seringkali buruk. Akan tetapi, menurut redaksi *Panyebar Semangat*, misalnya, tidak semua majalah berbahasa Jawa memiliki rubrik semacam itu. Cerita yang sangat pendek cenderung tidak berkembang menjadi *short-short story* karena penulisnya masih belum mampu mengembangkan unsur-unsur cerita yang pendek secara baik.

Dilihat dari sistem kerja penerbit-penerbit yang dibayangi oleh kebijakan pemilik modal, tampaknya ketergantungan sastra dengan surat kabar atau majalah itu memang penting dan faktual. Meskipun demikian, derajat ketergantungan itu tidak dapat dikatakan harus seragam antara satu penerbit dengan penerbit lainnya. Setiap penerbit dan majalah ternyata juga memiliki kedekatan dengan pengarang tertentu. Misalnya, dari wawancara dengan Kusfandi (*Djaka Lodhang*) pada bulan Desember tahun 1993 diperoleh keterangan bahwa kehadiran cerbung (novel) karya Tiwiek SA adalah karena kekhasan karya pengarang dari Tulungagung itu memenuhi selera *Djaka Lodhang*. Demikian juga pernyataan F.X. Subrata dari *Djaka Lodhang* (Agust. 1999) tentang pemasangan cerpen dan cerbung dari beberapa orang tertentu (di luar pengarang dalam staf redaksi sendiri), termasuk di

dalamnya karya Aye Suharyono. Hal itu dibenarkan oleh Aye Suharyono, Margaretha Widhi Pratiwi, Esmiet, Djajus Pete, Suwardi Endrasawara, dan beberapa pengarang lainnya yang mengatakan sering dihubungi secara pribadi oleh penerbit untuk meminta karya-karyanya. Bahkan, menurut AY. Suharyono dan Djajus Pete, mereka amat terkejut dengan honorarium yang berbeda dibandingkan dengan pengarang yang lain. Perlakuan penerbit seperti itu juga terjadi dengan rubrik sastra yang lain, seperti wayang, cerita rakyat, cerita anak-anak, dan cerita bergambar.²⁴

Untuk rubrik *geguritan* dan *tembang* pun redaksi terkadang harus menghubungi pengarang-pengarang khusus secara langsung, terutama bila berkaitan dengan hari-hari khusus. Karya-karya semacam itu disebut karya-karya situasional atau "sastra kalender", seperti sastra Hari Kemerdekaan (17 Agustus), sastra Hari Angkatan Perang (5 Oktober), sastra Hari Pahlawan (10 November), sastra Tahun Baru (1 Januari), dan berbagai karya sastra yang berhubungan dengan hari-hari besar keagamaan, baik agama Islam, Kristen/Katholik, Hindu, dan Buda. Untuk sastra keagamaan seperti itu, pada umumnya redaksi sudah memiliki penulis-penulis tertentu, misalnya Esmiet, Tiwiek SA, M. Sujadi Madinah, dan Tamsir AS alm. (agama Islam), Aye Suharyono dan Y.F.X. Hoery, E. Suharjendro, Boedi L. Worang dipesan menulis berbagai jenis sastra yang berkaitan dengan religiusitas Katholik dan Kristen. Rubrik semacam itu menjadi lahan bagi sastrawan Jawa untuk berlomba mencari tambahan uang

24. Untuk cerita bergambar, biasanya penerbit memegang tokoh-tokoh tertentu yang menguasai dua bidang seni sekaligus karena penulis cergam memang tidak hanya mementingkan keahlian bersastra, tetapi juga mementingkan keahlian melukis.

karena tidak semua orang mampu menulis tema dasar yang dikatakan hampir selalu sama. Akan tetapi, variabel tema dapat dikembangkan oleh sastrawan sendiri berdasarkan keahlian atau keluasan jelajah baca setiap pengarang. Rubrik semacam itu telah dimunculkan sejak masa kolonial oleh majalah kolonial Belanda, *Kadjawen*, khususnya untuk lebaran.²⁵ dengan nama rubrik "Seri Lebaran".

Rubrik khusus seri lebaran dari majalah *Kadjawen* itu berpenampilan eksklusif, baik pada ruang/rubrik maupun seri ceritanya. Pada umumnya, pengisi rubrik seri khusus itu pun khusus pula, yaitu Mas Krendhadigdaja, cerpenis humor dari *Kadjawen*, seperti dalam kutipan di depan.

Dengan contoh di depan semakin jelas bahwa sudah sejak awal majalah berbahasa Jawa menjadi pendukung bagi kehadiran sastra, terutama dengan cara pemasangan berbagai rubrik sastra di dalamnya. Akan tetapi, sehubungan dengan pemilik modal masing-masing majalah itu memiliki kepentingan berbeda-beda, dapat diasumsikan bahwa keha-



25. Sebenarnya banyak hari besar lain, baik hari besar yang religius maupun yang bersifat nasional. Akan tetapi, majalah kolonial yang berbahasa pengantar tersebut hanya memberi lembar khusus untuk lebaran. Hal itu dimungkinkan persepsi para redaksi hanya tertumpu pada mayoritas masyarakat pembacanya, yaitu masyarakat yang beragama Islam.

diran sastra Jawa memiliki tempat khusus dalam masing-masing majalah. Pada periode kemerdekaan, misalnya, tidak semua majalah Jawa merasa perlu mengadakan rubrik-rubrik khusus semacam itu karena memang tidak semua majalah --apalagi majalah khusus berbahasa Jawa yang miskin dana-- merasa perlu memberi perhatian pada hari-hari besar.²⁶ Majalah *Panyebar Semangat* dan *Jaya Baya* hanya secara insidental memberikan perhatian kepada hari-hari besar khusus, berupa pemuatan tema-tema khusus didalam rubrik "Cerkak", "Cerbung", dan rubrik "Geguritan".

Dalam kaitannya dengan upaya pengembangan majalah itu satu-satunya majalah umum berbahasa Jawa yang diharapkan menciptakan era baru bagi sastra Jawa itu terpaksa harus berhenti karena meninggalnya Handung Kussudiharsono (tahun 1991). Fakta itu berlanjut dengan "eksodusnya" tokoh-tokoh lain yang semula mendampingi kerja pembaruan oleh Handung Kussudiyarsono tersebut. Dengan masuknya para staf redaksi *Djaka Lodhang* ke dalam dapur *Mekar Sari* (1996), majalah tersebut nyaris tidak lagi memiliki arti yang spesifik. Mengapa demikian? Jawabnya ialah karena *Mekar Sari* sebagai majalah umum berbahasa Jawa yang independen dan spesifik itu berubah menjadi majalah yang sebangun dengan dengan majalah *Djaka Lodhang* karena rubrik-rubrik itu sebangun dengan yang ada di dalam

26. Hal itu dipertegas dengan dua hal penting yang juga menjadi penyebab kekhususan rubrik sastra dalam majalah-majalah tersebut. Pertama, sifat majalah berbahasa Jawa yang pada umumnya adalah majalah umum. Kedua, sistem redaksi pada masing-masing majalah berbahasa Jawa yang berbeda-beda. Artinya, ada majalah yang benar-benar menempatkan persona yang tepat untuk rubrik sastra, ada pula yang hanya sekedarnya. Ketiga, sastra seringkali digunakan sebagai media penyebaran agama, terutama di dalam majalah-majalah khusus keagamaan seperti majalah *Pusaka Surakarta* di zaman kolonial, dan majalah *Praba*.

majalah tersebut. Demikian juga halnya dengan nasib majalah khusus milik agama Katholik di Yogyakarta, *Praba*. Pada awal tahun 1990 majalah ini pernah hampir ditampilkan sebagai sebuah tabloid berbahasa Jawa yang eksklusif, melalui bantuan dana dari harian *Kompas*. Akan tetapi, gagasan yang hampir terlaksana itu harus kembali ke bentuk semula --yaitu majalah khusus untuk Katholik-- karena pemimpin redaksinya (Arswendo Atmowiloto) mendapat musibah politik dan masuk ke penjara.

4.2 Kegiatan-Kegiatan Khusus Pengayom dan Pembinaan Sastra Jawa

Seperti telah disebutkan pada subbab 3.2 bahwa setidaknya ada empat buah lembaga penting dari pemerintah yang secara jelas memberikan perlindungan kepada sastra di daerah. Dengan kata lain, bagi sastra Jawa pun setidaknya ada empat lembaga pemerintah yang memberi perlindungan kepada sastra Jawa karena sastra memang merupakan salah satu mata program di lembaga itu. Lembaga pemerintah yang pertama ialah Balai Bahasa, kedua Kanwil Bidang Kesenian, dan ketiga ialah Dewan Kesenian (sekarang Dewan Kebudayaan), dan keempat Taman Budaya.²⁷

27. Hingga tahun 1998 tercatat hanya satu Balai Bahasa yang memiliki mata program pembinaan sastra Jawa, yaitu Balai Bahasa Yogyakarta, yang semula bernama Balai Penelitian Bahasa, Akan tetapi, sejak tahun 1999 tercatat dua Balai Bahasa baru yang juga berfungsi semacam Balai Bahasa Yogyakarta. Kedua Balai Bahasa baru itu adalah Balai Bahasa Jawa Tengah yang bertempat di Semarang dan Balai Bahasa Jawa Timur yang bertempat di Sidoarjo, Jawa Timur.

4.2.1 Macapat

Lembaga ini sudah memberikan perhatian kepada sastra --terutama sastra Jawa-- yang mulai dilaksanakan sejak tahun 1960-an (tepatnya tahun 1968). Kegiatan pembinaan yang pertama dilakukan berupa kegiatan macapat, yang diselenggarakan pada setiap *selapan dina* 'tigapuluh lima hari', bersama dengan Dinas P dan K. Karena mitra kerja pada waktu itu adalah Dinas P dan K (Kepatihan), tempat kegiatan itu menetap di *bangsal wetan Kepatihan*. Kegiatan itu diselenggarakan secara rutin untuk merangsang apresiasi kesastraan Jawa, khususnya jenis macapat. Beberapa tokoh di luar 2 lembaga resmi yang aktif di kegiatan tersebut adalah Drs. Sajiyo (FPBS, IKIP Negeri Yogyakarta), Drs. Subalidinata (Fakultas Sastra/Illmu Budaya UGM, Jurusan Sastra Nusantara), dan Karkana Kamadjaja (Yayasan Javanologi Panunggalan).

Kebutuhan dana untuk pembinaan seni macapat tersebut dibiayai oleh kedua lembaga, melalui anggaran rutin masing-masing.²⁸ Kegiatan tersebut kini semakin berkembang, terutama sejak tahun 1990-an, dan perkembangan tersebut bukan hanya karena berkembangnya anggota, tetapi juga karena peningkatan model penyelenggaraan. Sejak tahun 1995, misalnya, penyelenggaraan *macapat* dikembangkan dengan diskusi (bermakalah) oleh masing-masing anggota (secara bergiliran), dan kegiatan ini didukung secara dana dan penyelenggaraan oleh lembaga-lembaga atau instansi lain, seperti Musium Sanabudaya, Fakultas Sastra UGM

28. Isian dari pembinaan Macapat itu pada mulanya amat sederhana, yaitu menembangkan serat-serat macapat berbahasa Jawa oleh para pengunjung, secara bergiliran. Selanjutnya dilakukan diskusi sederhana tentang isi serat yang dibaca, dipimpin oleh salah seorang pengurus.

(sekarang Fakultas Ilmu Budaya), dan IKIP Negeri Yogyakarta (sekarang Universitas Negeri Yogyakarta). Akan tetapi, kegiatan ini hanya bersifat melestarikan sastra tradisional karena yang hadir, pada umumnya, hanya generasi tua. Kegiatan ini belum mampu merangkul generasi muda pemakai bahasa Jawa, kecuali mereka yang mengikuti kuliah di Jurusan Sastra Nusantara. Kendala utamanya bagi minat generasi muda menghadiri kegiatan tersebut adalah menembangkan naskah karena seluruh naskah tradisional ditulis dengan huruf Jawa. Ragam bahasa di dalam sebagian besar naskah Jawa adalah ragam *krama*, dengan kosa kata yang arkhaik pula. Di samping itu, kendala yang dihadapi generasi muda adalah waktu penyelenggaraan. Seluruh kegiatan *macapat* itu selalu malam sehingga berdampak sulitnya transportasi.

4.2.2 Pemberian Hadiah Sastra

Di samping menyelenggarakan kegiatan *macapatan*. Balai Bahasa juga mengikuti tradisi majalah berbahasa Jawa dalam hal merangsang kreativitas bersastra para pengarangnya. Kegiatan tersebut dilakukan bukan hanya membangkitkan kembali kepedulian menulis dalam bahasa Jawa, tetapi juga membangkitkan generasi baru sastrawan Jawa. Upaya Balai Bahasa Yogyakarta itu tidak dapat hanya diisi dengan kegiatan diskusi sastra, tetapi juga harus dengan kegiatan kreatif, seperti berlatih menulis, berlatih kritis terhadap karya sendiri atau karya pengarang lain, dan lomba membaca berbagai jenis sastra. Dengan kegiatan kreatif seperti itu diharapkan tumbuh generasi baru pengarang sastra Jawa yang tangguh dan berwawasan luas. Mengadakan lomba karya anggota atau antarpengarang Jawa segenerasi juga merupakan upaya memicu kreativitas para pengarang karena pada

gilirannya para anggota menjadi percaya diri dan berani menerbitkan karya-karyanya. Kegiatan terakhir itu mendorong para anggota sanggar berani bersaing secara terbuka untuk mendapatkan hadiah atau penghargaan sastra.

Pemberian hadiah atau penghargaan sastra dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu (1) memberikan penghargaan sastra kepada pengarang yang dalam kurun waktu tertentu karyanya dinilai sebagai karya terbaik, dan (2) memberikan penghargaan kepada tokoh sastra yang memiliki dedikasi tinggi dalam menyelamatkan dan mengembangkan sastra Jawa.

Balai Bahasa Yogyakarta --hingga tahun 1998 bernama Balai Penelitian Bahasa di Yogyakarta-- hingga tahun 1998 adalah satu-satunya lembaga negara yang secara fungsional membina masyarakat secara konkret dalam kemampuan berbahasa Jawa dan dalam bersastra Jawa. Di daerah pemakai bahasa Jawa lainnya di P. Jawa --di Semarang (melalui Balai Bahasa Semarang/Jawa Tengah) dan di Sidoarjo (melalui Balai Bahasa Sidoarjo/Jawa Timur), baru pada tahun 1999 dibuka kegiatan semacam itu.²⁹ Balai Bahasa, sebagai lembaga pemerintah, bertugas memberikan penghargaan/hadiah. Bentuk penghargaan dapat diganti dengan lomba dengan objek yang bervariasi, tergantung kepada besar atau kecilnya dana tahunan yang tersedia.

Pemberian hadiah kepada para pemerhati dan pelestari sastra Jawa adalah salah satu wujud kepedulian lembaga tersebut terhadap kehidupan bahasa dan sastra Jawa di wilayah kerjanya.

29. Kedua buah Balai Bahasa yang baru itu belum dapat diketahui hasil kerjanya sebagai lembaga-lembaga pendukung dan pengembang bahasa dan sastra daerah yang hidup di daerah-daerahnya, karena usia kedua Balai tersebut masih sangat muda, baru beberapa tahun.

Kegiatan pembinaan itu telah dilakukan oleh Balai Bahasa Yogyakarta sejak tahun 1967 hingga akhir tahun 1980-an dengan memilih kegiatan lomba penulisan cerpen (*cerkak*), lomba menulis *geguritan*, lomba menulis artikel/esai berbahasa Jawa, lomba membaca naskah berhuruf Jawa, dan lomba pidato dengan bahasa Jawa. Tiga buah lomba yang disebut terakhir itu ditujukan kepada siswa SLTP dan SLTA untuk mengingatkan mereka kepada kemampuan berbahasa Jawa mereka yang sudah sejak tahun 1978 terkibaskan dari kurikulum sekolah. Dengan lomba-lomba itu diharapkan mereka terpenggil untuk menghidupkan kembali dan mengembangkan kemampuan berbahasa Jawanya, dan pada gilirannya mampu lagi menyampaikan pikiran dalam berbagai bentuk ekspresi tulis dan lisan berbahasa Jawa.

Sejak *Rancage* menjadi sebuah yayasan (23 Maret 1993) pengelola hadiah kreativitas sastra—karena "*Rancage*" berarti 'kreatif'—maka pada tahun 1994 hadiah penghargaan sastra itu dikembangkan kepada penulis dan pembina sastra Jawa, seperti Drs. F.C. Pamudji yang menerima penghargaan dari Yayasan "*Rancage*".



Drs. F.C. Pamudji menerima penghargaan

Penyerahan hadiah sastra yang disponsori dan dikelola seniman Sunda (Ajip Rosidi) tersebut diharapkan dapat memacu tindak kreatif seniman daerah dalam menjaga dan mengembangkan sastra di daerahnya. Bentuk kepengayoman yayasan tersebut tampak nyata dari (1) pemberian hadiah kepada penulis yang kreatif, pembina kebudayaan daerah yang tangguh, dan penulis sastra anak-anak; (2) memberikan hadiah penghargaan berupa piagam dan uang pembinaan.

4.2.3 Diskusi dan Pembinaan Kreativitas

Selain dorongan yang berbentuk diskusi, pelatihan, dan lomba-lomba, baik lomba karya tulis maupun membaca karya. Balai Bahasa Yogyakarta juga melakukan kegiatan pembinaan secara langsung. Pembinaan langsung itu diawali melalui penyuluhan kepada guru-guru SLTP dan kepada siswa-siswa SMA yang berminat kepada sastra daerahnya. Pembinaan langsung kepada guru-guru bahasa Jawa se-Kodya Yogyakarta telah dilakukan dua kali, yaitu tahun 1997 dan tahun 1998. Akan tetapi, karena tidak semua guru mempunyai sisa waktu untuk belajar kembali tentang sastra, dua kali pembinaan itu hampir dikatakan tidak berhasil guna. Selanjutnya, Balai Bahasa Yogyakarta mencoba mengalihkan sasaran kepada siswa-siswa SMA yang berminat mempelajari sastra daerah. Gagasan itu direalisasikan pada tahun anggaran 1999/2000.

Sejak tahun 1991 --ketika Balai Bahasa Yogyakarta-- merestui pendirian Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta (SSJY), lembaga yang mengelola seniman-seniman sastra Jawa di Yogyakarta itu mencoba membangkitkan semangat menulis, kritis, dan semangat memiliki sastra daerahnya. Pada setiap dua bulan sekali lembaga pembinaan sastra daerah yang

bernama Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta (SSJY) itu mengadakan pertemuan rutin dengan diskusi, mengevaluasi karya-karya dalam majalah berbahasa Jawa (khususnya majalah intern SSJY sendiri), membaca *geguritan* karya rekan-rekan pengarang SSJY, dan sebagainya. Wadah untuk karya-karya kreatif SSJY --berupa cerpen, *geguritan*, dan *tembang*-- ialah majalah sastra Jawa bernama *Pagagan*. Majalah khusus tersebut hanya memuat karya para anggota SSJY karena diperuntukkan bagi para anggotanya berlatih menulis kreatif. Berikut ini salah satu gambar pertemuan rutin anggota Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta, yang mengambil tempat di Balai Bahasa Yogyakarta.



Pertemuan rutin anggota Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta.

4.2.4 Penerbitan Buku

Sudah lama --yaitu diawali sejak kemerdekaan-- karya-karya sastra Jawa kurang mendapat kesempatan diterbitkan dalam bentuk buku. Padahal, terbitan buku adalah upaya mendasar untuk penyebaran dan pelestarian sastra Jawa, yang pada gilirannya membangkitkan kepercayaan dan kecintaan kepada jenis sastra tersebut. Kendala penerbitan buku berbahasa daerah --terutama buku-buku sastra-- adalah alasan klasik, yaitu tidak laku atau berarti merupakan kerugian pemilik modal. Bahkan, Balai Pustaka yang merupakan satu-satunya penerbit pemerintah pun sudah sejak kemerdekaan menyusutkan penerbitan sastra daerah dengan tetap berpegang pada alasan klasik. Setelah penerbitan antologi puisi Jawa (*geguritan*) macapat *Warisan* (1983) karya Suwardi, antologi puisi Jawa karya Suripan Sadi Hutomo *Geguritan: Antologi Puisi Jawa Modern 1940-1980* (1985), novel *Trajumas* (1986) dan novel *Kridhaning Ngaurip* (1986) karya Imam Sardjono, novel *Dokter Wulandari* (1987) karya Yunani, dan novel *Sapecak Bumi sing Kobong* (1988) karya Tamsir AS, Balai Pustaka tidak menerbitkan buku-buku sastra Jawa yang patut dipertimbangkan. Memang masih ada beberapa penerbit sastra Jawa oleh Balai Pustaka, misalnya *Putri Messalina* (1989) karya Soebagijo I.N., tetapi buku tersebut merupakan cerita saduran dari Persia, yang tergolong ke dalam cerita rakyat. Balai Pustaka juga melanjutkan penerbitan buku sastra Jawa, tetapi buku-buku atau hasil transliterasi naskah-naskah klasik. Hal itu dilakukan penerbit tersebut dengan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka menunjang salah satu program pemerintah, meningkatkan nilai-nilai luhur bangsa. Betapa pun, kepengayoman Balai Pustaka itu tetap harus diperhitungkan

karena penerbitan melalui lembaga tersebut dapat diperkirakan dapat lebih tersebar luas.

Meskipun Balai Pustaka tidak lagi menerbitkan sastra Jawa, Pemda di Yogyakarta telah menerbitkan beberapa antologi sastra Jawa melalui Festival Kesenian Yogyakarta, yang diawali antologi *Rembulan Padang ing Ngayogyakarta* (1992), suntingan Dhanu Priyo Prabowa, Suryanto Sastroatmodjo, dan AY. Suharyono.

Karena Festival Kesenian Yogyakarta selalu dilaksanakan setiap tahun, melalui sebagian dana Seksi Sastra Jawa, koordinator seksi (Dhanu Priyo Prabowa) berinisiatif untuk menerbitkan antologi sastra Jawa lainnya, yaitu *Cakra Manggilingan* (1993), *Pangilon* (1994), *Pesta Emas Sastra Jawa* (1995), dan *Pisungsung* (1997).

Melalui penerbitan-penerbitan yang dilakukan oleh panitia Seksi Sastra Jawa Festival Kesenian Yogyakarta itu dapat disebutkan bahwa Pemerintah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta telah menunjukkan perannya sebagai pelindung sastra Jawa, baik melalui kegiatan tahunan (Festival Kesenian Yogyakarta) maupun melalui penerbitan karya-karya para pengarang Yogyakarta. Namun, sejak awal krisis moneter (1998) sastra Jawa tidak lagi mendapatkan dana yang memadai untuk penerbitan buku sehingga untuk penerbitan antologi harus berbagi dengan sastra Indonesia. Dunia penerbitan mengalami masa suram kembali, seperti sepanjang dekade '80-an yang dapat dikatakan tidak ada satu pun penerbit swasta yang mengambil bagian untuk penerbitan sastra Jawa, walaupun situasi sosial-ekonomi di dalam negeri semakin mantap. Jadi, penerbit swasta yang bergerak di dunia sastra Jawa baru mengawali kepengayomannya dengan penerbitan sastra Jawa modern sebenarnya baru bangkit kembali

sejak tahun 1990-an, tetapi juga segera surut di awal era reformasi.

Meskipun fakta penerbit sebagai pengayom sastra Jawa menunjukkan fakta yang tidak amat menggembirakan, setidaknya masih ada beberapa buah penerbit swasta yang dapat dicatat. Ada tiga buah penerbit swasta di beberapa kota besar yang patut dibicarakan. Ketiga penerbit itu berada di kota besar, yaitu Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta: (1) Yayasan Adhigama dan Citra Almamater (Semarang), (2) Pustaka Nusatama, Pustaka Pelajar, dan Narasi (Yogyakarta), dan (3) Yayasan *Panyebar Semangat* dan Yayasan *Jaya Baya*, C.V. Sinar Wijaya (Surabaya). Penerbit-penerbit swasta lainnya juga ada, tetapi tidak besar dan hanya menerbitkan sastra Jawa secara insidental.

Penerbit di Jawa Tengah dan Yogyakarta yang beberapa kali menerbitkan sastra Jawa sebenarnya tidak banyak, misalnya Yayasan Adhigama dan Citra Almamater (Semarang), dan Pustaka Pelajar (Yogyakarta). Penerbit Narasi (Yogyakarta) baru aktif menerbitkan sastra Jawa pada pasca tahun 2003. Dibandingkan dengan penerbit di Yogyakarta dan Jawa Tengah, peran penerbit di Jawa Timur dalam menerbitkan sastra Jawa lebih besar. Hal itu dapat dilihat dari populasi terbitan sastra Jawa di kota ini. Selain dua yayasan dari dua majalah Jawa di Surabaya (*Panyebar Semangat* dan *Jaya Baya*), di Surabaya masih ada pula penerbit C.V. Sinar Wijaya yang pada tahun 1993 sangat aktif menerbitkan novel-novel pengarang muda.

Jenis sastra yang diterbitkan ialah novel, cerpen, dan *geguritan*. Terbitan Yayasan Adigama menerbitkan karya-karya Ardini Pangastuti. Penerbit itu menerbitkan beberapa buah buku sastra Jawa, yaitu sebuah antologi cerpen Jawa

Nalika Srengenge Durung Angslup (1996), sebuah novel berjudul *Lintang* (1997), dan antologi *geguritan* berjudul *Kidung Jaman* (1998). Akan tetapi, khusus pada penerbit C.V. Sinar Wijaya (Surabaya), penerbit ini pada tahun 1993 menerbitkan lima buah novel, yang diurutkan dalam lima seri, yaitu: (1) Seri 001 ialah *Kembang Alang-alang* karya Margareth Widhy Pratiwi, (2) Seri 002 ialah *Nalika Prau Gonjing* karya Ardini Pangastuti, (3) Seri 003 ialah *Sintru oh Sintru* karya Suryadi W.S., (4) Seri 004 ialah *Kerajut Benang Ireng* karya Harwimuka, dan (5) Seri 005 *Kubur Ngemut Wewadi* karya AY. Suharyono.

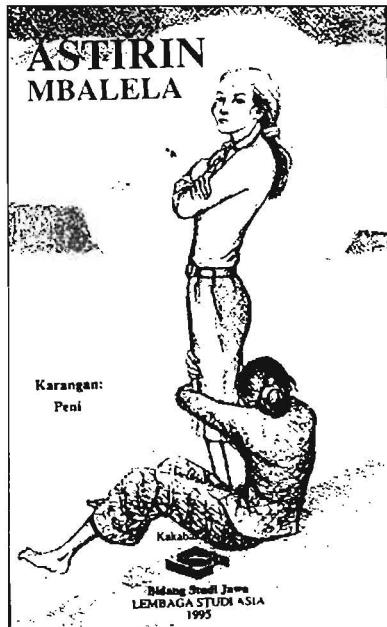
Di samping terbitan dari Yayasan Adhigama (Semarang), patut dicatat pula terbitan dari Pustaka Nusatama (Yogyakarta). Penerbit ini ialah salah satu anak penerbit Gramedia, dan setidaknya perlu dicatat sebagai salah satu penerbit dan sekaligus pengayom bagi sastra Jawa di Yogyakarta. Bukti kepengayomannya dapat dilihat dari dua buah buku sastra Jawa yang diterbitkannya, yaitu novel *Lintang Saka Padhepokan Gringsing* (1995) karya AY Suharyono dan antologi *cerkak* berjudul *Ratu* (1995) karya Krisna Mihardja.

Beberapa penerbit lain yang menerbitkan sastra Jawa adalah Lembaga Studi Jawa di Yogyakarta, yaitu sebuah lembaga swasta yang di bagian depan telah dibicarakan. Pada awal kehadirannya lembaga ini telah menerbitkan sebuah novel Jawa dan sebuah antologi *guritan* karya Djaimin K. Kedua buku sastra Jawa yang diterbitkan oleh penerbit ini ialah *Siter Gading* karya Jaimin K. dan *Astirin Mbalelo* (1996) karya Suparto Brata. Salah satu dari terbitan Lembaga Studi Jawa itu —yaitu antologi *guritan* berjudul *Siter Gading* karya Jaimin K. mendapatkan penghargaan dari “Yayasan Rancage” pada tahun 1997.

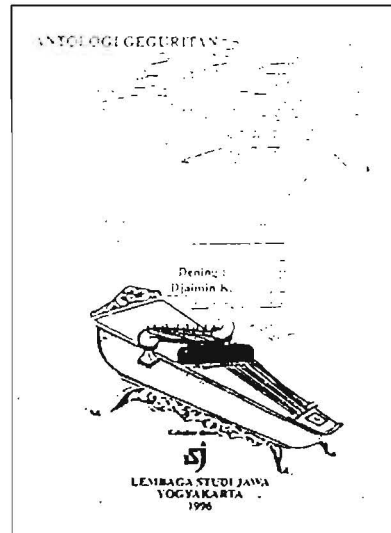
Di samping lembaga-lembaga swasta tersebut, ada beberapa lembaga swasta lainnya yang perlu dicatat, terutama bukan karena banyaknya penerbitan sastra Jawa yang dilakukan, tetapi karena terbitannya mendapatkan penghargaan sastra. Setelah *Siter Gading* karya Jaimin K. —terbitan Lembaga Studi Jawa mendapatkan penghargaan “Rancage” (1996), penghargaan lain yang menyusul adalah bagi novel *Timbrenng* karya Satim K. (1997), terbitan Yayasan Jaya Baya. Setelah itu, yang mendapatkan penghargaan —secara berturut-turut—adalah novel *Nalika Langite Obah* (1998) karya Esmiet, terbitan Yayasan Jaya Baya juga dan novel Suharmono Kasiyun berjudul *Pupus kang Pepes* (1999) terbitan Yayasan Mitra Alam Sejati (Malang). Masih banyak lagi karya sastra Jawa yang mendapat penghargaan sastra dari Yayasan “Rancage” karena penghargaan ini diusahakan berlanjut. Banyak yang dapat diharapkan dari pemberian hadiah sastra semacam itu karena dari adanya tradisi pemberian penghargaan sastra kepada seniman-seniman Jawa --di samping seniman dari Sunda dan Bali-- sangat dimungkinkan akan bertambah lagi penerbit swasta yang turut berperan mengayomi sastra Jawa.

Dengan demikian, hadirnya sejumlah karya sastra yang diterbitkan penerbit swasta itu berarti bahwa peran mereka dalam pelestarian dan pendokumentasian sastra tidak perlu diragukan lagi. Walaupun faktor keuntungan (*profit*) tetap menjadi landasan atau prasyarat penerbitan, keberanian mereka dalam menerbitkan karya sastra daerah yang tanpa prospek cerah itu dapat diartikan sebagai salah satu tanda kepengayoman penerbit swasta terhadap sastra Jawa modern. Lebih-lebih karena mereka telah dengan rela menerbitkan karya-karya sastra unggulan. Berikut ini sebuah contoh

novel Jawa *Astirin Mbalelo* karya Suparto Brata dan antologi *Siter Gading* karya Jaimin K. yang menerima penghargaan dari "Yayasan Rancage". Keduanya hadir atas prakarsa Lembaga Studi Jawa yang berdiri di desa Tembi, Kecamatan Bantul, Yogyakarta.



Astirin Mbalelo



Siter Gading

Kedua buku sastra Jawa itu hanya terbit terbatas sehingga tidak dapat dibaca oleh masyarakat luas. Keberadaannya hanya dapat dipantau pada referensi para pemerhati sastra Jawa, atau di perpustakaan-perpustakaan yang memiliki perhatian kepada sastra Jawa.

BAB V

KENDALA KEPENGAYOMAN DAN PEMBINAAN

Secara umum lembaga pemerintah memiliki sistem birokrasi yang sama karena semuanya mendapatkan dana dari APBN-daerah. Setiap daerah memiliki dana kucuran yang berbeda-beda, tergantung dari program masing-masing daerah yang diusulkan pada setiap tahun. Hal seperti itu berlaku secara umum di setiap lembaga yang berada dalam lingkungan pemerintah, misalnya, seperti telah dibicarakan di subbab 4.1 lembaga-lembaga pemerintah itu adalah Pemda dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Kementerian Pendidikan Nasional).

5.1 Dari Kepengayoman Lembaga-Lembaga Pemerintah

Badan dari Pemda yang disebut Pembinaan Generasi Muda adalah bagian dari lembaga-lembaga pemerintah yang terdapat di daerah-daerah. Itu berarti bahwa kekuasaan pemda meliputi daerah-daerah binaan di tingkat Dati I dan II. Biasanya, kegiatan kepengayoman yang dilakukan Pemda --baik di tingkat Dati I maupun tingkat Dati II dan III-- itu

untuk pembinaan berbagai jenis kesenian (sastra menjadi bagiannya). Sebagai lembaga pemerintah, sampai di tingkat mana pun wilayah yang dibina birokrasi tetap ada, bahkan semakin rendah Datinya, dapat semakin tinggi atau semakin rumit birokrasinya. Hal itu karena rentetan proses permohonan dana di daerah-daerah semakin panjang, bahkan dapat menyebabkan pemborosan uang dan waktu.

Semua sanggar atau grup kesenian --terutama di daerah-daerah-- yang akan menerima bantuan binaan dari pemerintah melalui Pemda harus melengkapi dirinya dengan sejumlah persyaratan, seperti pemilikan AD/ART, sekretariat yang rapi dan terarah, program kerja tahunan yang jelas, dokumentasi hasil kerja. Pada kenyataannya, tidak semua grup kesenian --terutama yang berada di daerah-daerah-- memiliki persyaratan selengkap yang dituntut itu. Di samping itu, pada kenyataannya, tidak semua grup atau kelompok kesenian tertata program tahunannya secara rapi. Itu berarti bahwa tidak semua grup kesenian di daerah itu memenuhi persyaratan administrasi seperti yang disyaratkan Pemda dan tidak memenuhi syarat sebagai calon penerima dana bantuan pemerintah.

Kesulitan demi kesulitan yang diajukan calon penerima bantuan dana dari Pemda --baik Dati I maupun Dati II-- menyebabkan terhentinya dana kepada grup-grup atau kelompok-kelompok kesenian tertentu, terutama di kota-kota. Banyak grup atau kelompok kesenian --yang sebenarnya amat memerlukan bantuan-- terpaksa harus tidak mendapat dana kepengayoman itu. Itulah sebabnya, dana Pemda dialirkan melalui Dewan Kesenian Daerah (sekarang Dewan Kebudayaan Daerah) dan lembaga itu ditugasi untuk memberikan

pembinaan langsung ke daerah-daerah. Dengan demikian, seharusnya daerah-daerahlah yang harus mengusulkan nama-nama grup atau kelompok keseniannya masing-masing. Akan tetapi, seperti halnya hambatan atau kendala yang muncul pada pengucuran dana oleh Pemda, lembaga perpanjangan Pemda itu pun mengalami kendala kelengkapan persyaratan dana. Oleh karena itu, khusus untuk Dewan Kesenian Daerah di Yogyakarta, persyaratan yang panjang itu menjadi terabaikan dan yang diutamakan adalah kreativitas grup-grup kesenian itu.

Catatan yang sangat penting untuk pembinaan sastra Jawa tampak dari peranan Dewan Kesenian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (sekarang Dewan Kebudayaan), Dewan Kesenian Jawa Timur di Surabaya (DKS), dan Dewan Kesenian Jawa Tengah yang berpusat di Semarang. Dari ketiga Dewan Kesenian Daerah di tiga propinsi tersebut seharusnya terdapat mata program bantuan kepada perkembangan kesenian, yang antara lain seni sastra di daerahnya, termasuk sastra Jawa. Dari informasi mutakhir yang didapat, diperoleh masukan bahwa pembinaan sastra atau unsur-unsur kebudayaan --yang melalui Pemda-- memang harus melalui cara, dan salah satu dari cara-cara itu ialah mencari momen-momen tertentu yang signifikan agar berhasil. Hal itu selain untuk menjadikan kegiatan tersebut bersifat monumental juga agar dapat digunakan untuk merencanakan berbagai kebutuhan dana. Seperti halnya Propinsi DIY, Surakarta, dan Surabaya sudah mulai mencoba mencari kemungkinan dari momen berdirinya kota sebagai titik waktu monumental dan signifikan.

Dewan Kesenian Yogyakarta, misalnya, memberikan bantuan dana kepada sastra, baik sastra Indonesia maupun sastra Jawa. Untuk sastra Indonesia dan kebudayaan pada umumnya bantuan diberikan melalui bantuan dana untuk diskusi kesastraan, atau untuk penerbitan majalah budaya *Citra Yogya*. Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sejak awal tahun 1980-an. Khusus untuk pembinaan sastra Jawa baru dilaksanakan sejak tahun 1998, berupa uang bantuan pembinaan. Bantuan seperti itu sebenarnya limpahan tugas dari Dinas P dan K (sekarang Dinas Pendidikan Nasional) --yang berpusat di Kantor Kepatihan, Malioboro, Yogyakarta-- setelah lembaga itu menyerahkan tugas tersebut kepada Pemda, sejak tahun 1996.³⁰ Di dalam lingkungan Pemda itu terdapat juga Dinas P dan K yang salah satu tugasnya juga melakukan pembinaan kesenian di daerah-daerah. Pembinaan kesenian dari Dinas P dan K (sekarang Dinas Pendidikan Nasional) ada beberapa jenis, seperti memberi bantuan dana, atau memberikan kesempatan pentas, memberikan dana lomba. Berikut ini salah satu bukti bantuan dari Dinas P dan K (atau Dinas Pendidikan Nasional) pada tahun 1995 kepada Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta, berupa dana untuk keperluan administrasi.

30. Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta mendapatkan tiga kali bantuan melalui Dinas P dan K (sekarang Dinas Pendidikan Nasional), yaitu pada tahun 1991, 1993, dan 1995. Bantuan dana tersebut harus dipertanggungjawabkan melalui pembelian peralatan kegiatan, seperti mesin ketik dan buku-buku kepustakaan. Selanjutnya, sejak tahun 1996, bantuan itu dilimpahkan kepada Dewan Kesenian Yogyakarta (atau Dewan Kebudayaan).

Alamat : BANGUN HASTYA JAWA YOGYAKARTA
Jalan Y. Dasa Nyoman 04a. 34. Yogyakarta 55224

No. :
 Lembaran I (satu) lembar
 No. I : Laporan Penggunaan Uang
 Bantuan Tahun _____
 1995/1996


Untuk
 Dit. : Bapak Sekretaris Jenderal,
 N.P. Kepala Biro Administrasi
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 Jln. Jenderal Sudirman, Senayan
 Kotak Pos 4270/JKMG
JAKARTA

Dengan hormat,
 Sehubungan dengan bantuan yang telah kami terima dari Depar-
 tement Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp _____
 (_____), besaran SK Mendik
~~Hibah/anggraha rendah~~ Honor : _____
 bersama ini kami sampaikan laporan ~~Penggunaan/kegiatan~~ bantuan
 sesuai dengan ketentuan penggunaannya sebagaimana tercantum
 dalam Surat Keputusan tersebut.

Adapun uang bantuan tersebut telah kami pergunakan untuk ke-
 perlunya _____
~~penerbitan majalah Paganan 23 dan 24, dan seranoban.~~
 Atas perhatian dan perkeana Bapak, kami ucapkan terima
 kasih.

Bapak/LEMBAGA/Us. Yasa/ _____

 BANGUN HASTYA JAWA YOGYAKARTA

 ()
 Slamet Riyadi

TEMBUSAH YTH :

Contoh Bukti Bantuan

Persyaratan seperti yang telah disebutkan itu tidak hanya dituntut oleh Pemda, tetapi juga oleh donor lainnya karena mereka membutuhkan bukti nyata kepastian menerima bantuan (SPJ) dan persyaratan lain seperti telah disebutkan di depan. Hanya Taman Budaya, Balai Bahasa, dan Dewan Kesenian saja yang tidak banyak menuntut persyaratan bagi kepengayoman yang dilakukannya.

Kendala kedua yang tidak kalah penting untuk dicatat tentang kepengayoman dari lembaga Pemerintah adalah sedikitnya jumlah bantuan apabila dibandingkan dengan tuntutan program kerja dan pekerjaan pengurus yang amat berat. Bantuan dana dari lembaga pemerintah --yang harus diawali dengan proposal dan persyaratan rumit-- itu ternyata hanya berimbang bantuan dana yang terbatas karena dana mereka tergantung besarnya APBN dan alokasi dana yang diterima oleh setiap daerah. Itulah sebabnya, jarang grup-grup kesenian yang mendaftarkan diri atau mengajukan permohonan bantuan atau kepengayoman dari Pemerintah.

5.2 Dari Lembaga-Lembaga Swasta

5.2.1 Javanologi

Seperti telah disebutkan di depan pada bab IV bahwa lembaga Javanologi ini didirikan atas dasar perhatian masyarakat Jawa terhadap kebudayaan daerahnya, termasuk terhadap sastra. Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan lembaga ini di bidang sastra Jawa ialah (1) penelitian, (2) pembinaan, dan (3) penerbitan/ kepengayoman. Penelitian kepada sastra Jawa dilakukan per jenis atau per kasus dengan tujuan untuk mengamati kriteria spesifik, perkembangan, dan aspek-aspek lain dalam berbagai jenis sastra Jawa. Hasil dari penelitian --yang diharapkan sudah memenuhi standar kelayakan-- selanjutnya didiskusikan agar laporan penelitian tersebut mendapat tanggapan yang bersifat kritis dan mendukung terbitnya penelitian yang lebih baik. Hasil akhir penelitian tersebut menjadi bahan pembinaan.

Hasil penelitian dan pembinaan yang dilakukan oleh Javanologi cukup banyak dan sebagian besar berhasil guna bagi masyarakat karena membawa masyarakat Jawa semakin

memahami unsur-unsur positif dan negatif kebudayaan daerahnya. Akan tetapi, dalam hal dana lembaga Javanologi --dan Baliologi-- amat tergantung kepada penyediaan dana pemerintah sehingga volume kegiatan setiap tahun berubah-ubah. Di sisi lain, karena hanya ada dua lembaga etnis --di antara puluhan etnis lain yang masih aktif-- yang memiliki fasilitas kegiatan semacam itu, timbul kecemburuan etnis-etnis yang lain. Oleh karena itu, lembaga Javanologi tersebut dihentikan, tetapi kegiatannya diteruskan oleh Yayasan *Javanologi Panunggalan* pimpinan R.H. Karkono Komodjojo. Yayasan *Javanologi Panunggalan* ini bekerja sama dengan Balai Kajian Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional dalam penelitian dan pembinaan budaya Jawa. Hal itu ditandai dengan hampir semua kegiatan lembaga ini, baik diskusi maupun pentas budaya, diselenggarakan di Balai Kajian Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional. Akan tetapi, ketergantungan program lembaga swasta kepada lembaga negara seringkali bersifat temporal, bahkan terkadang hanya sesaat

5.2.2 Lembaga Studi Jawa (LSJ)

Lembaga yang berdiri pada tahun 1992 ini merupakan kepanjangan tangan dari harian pagi yang terbesar oplagnya, yaitu *Kompas*. Sesuai dengan namanya, kegiatan pokok lembaga tersebut adalah melakukan pembinaan dan pengembangan kebudayaan Jawa. Dengan demikian, jenis sastra yang menurut program mereka amat penting diayomi sangat absolut, tergantung pada kecenderungan lembaga swasta tersebut. Hal ini berkaitan dengan fakta pada yang dilakukan LSJ, selama lembaga tersebut berdiri. Pada kenyataannya, program pokok mereka adalah yang pada aspek-aspek yang bersifat dokumentatif, ilmiah, dan intertaimen atau meng-

hibur. Program dokumentatif yang lebih banyak menelan biaya --karena melibatkan multimedia-- itu lebih banyak tersedot kepada program pendokumentasian aspek-aspek budaya, sebaliknya kurang sekali memperhatikan pada pendokumentasian sastra. Lebih-lebih pada pendokumentasian sastra modern. Demikian pula dengan program ilmiah, seperti diskusi dan penelitian, pada hakikatnya tidak dikembangkan kepada tindak lanjutnya, misalnya menyebarkan informasi ke media massa atau ke khalayak luas, baik melalui media massa atau melalui majalah.³¹ Dengan demikian, kepengayoman pada aspek ini tidak banyak membantu khalayak sastra Jawa secara luas.

Program sastra yang paling awal dan paling populer adalah pertunjukan wayang kulit, penyelenggaraan ruwatan, dan macapat. Untuk pertunjukan sastra Jawa modern sangat kurang mendapat tempat. Tercatat hanya sekali dilakukan pertunjukan sastra modern, yaitu pada tahun 1996. Meskipun demikian, pada waktu Seksi Sastra Jawa dipimpin oleh Dr. A. Sudewa, lembaga tersebut pernah menerbitkan 1 novel Jawa karya Suparto Brata berjudul *Astirin Balela* (1995) dan sebuah antologi *geguritan* karya Jaimin K., berjudul *Siter Gading* (1996).³² Adapun novel Suparto Brata yang juga diterbitkan LSJ itu juga merupakan karya sastra Jawa modern yang patut dicatat karena di dalamnya pengarang buku tersebut mempertimbangkan pendiriannya tentang perempuan Jawa, di tengah dinamika perubahan sosial. Setelah

-
31. Lembaga ini memang mempunyai majalah, yaitu Jawa, (sekarang menjadi lembar informasi kebudayaan bernama "Tembi". Baik Jawa maupun "Tembi" tidak tersebar luas dan tidak terbit secara kontinyu atau bersinambungan.
 32. Buku antologi *Siter Gading* (1996) itulah yang pernah mendapat penghargaan sastra dari "Yayasan Rancage", dan hadiah itu diterimakan Djaimin K. di aula Undip, Semarang.

terbitan kedua buku sastra Jawa tersebut, Lembaga Studi Jawa tidak lagi berminat menerbitkan buku. Dana penerbitan diarahkan untuk membuat ensiklopedi Jawa, sebuah proyek penerbitan yang diprediksikan akan menelan dana yang amat besar. Dengan demikian, anggaran untuk penerbitan lainnya mengalami hambatan.

Kendala lain dari lembaga swasta adalah peranan atau keadaan pengurus, lebih-lebih pemimpin atau koordinator. Pada kenyataannya, perhatian suatu lembaga dalam memberikan kepengayoman itu amat tergantung kepada pimpinan atau koordinatornya. Tinggi dan rendahnya apresiasi koordinator suatu lembaga kebudayaan amat mempengaruhi besarnya dana yang disisihkan untuk kepengayoman dan durasi waktu kepengayoman. Hal itu dapat dilihat dari terbit dan tidak terbitnya majalah pendukung sastra Jawa, seperti pada kasus majalah *Mekar Sari* (Yogyakarta) dan tabloid *Jawa Anyar* (Surakarta). Yang lebih jelas lagi adalah sangat sulitnya penerbit swasta bersedia menerbitkan sastra Jawa.

5.2.3 Kepengayoman dari "Yayasan Rancage"

Yayasan ini dikelola oleh Ajip Rosidi, seorang pengarang sastra Indonesia dari etnis Sunda, yang juga menulis sastra Sunda, yaitu sastra daerah di tanah kelahirannya: Jatiwangi. Ia memiliki penerbit Pustaka Jaya, di Jakarta. Penerbit ini banyak menghasilkan buku cetak sastra Indonesia, dan sebagai penerbit majalah kebudayaan *Budaya Jaya* yang kini telah almarhum.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini ialah kedudukannya sebagai pengelola dan penanggung jawab yayasan pemberi hadiah tahunan kepada sastra daerah, yaitu "Yayasan Sastra Rancage". Sejak tahun 1994 yayasan ini mulai

memberikan dua buah penghargaan sastra (sebuah karya dan seorang tokoh bahasa/sastra Jawa). Tujuan pokok yayasan ini dalam memberikan penghargaan sastra (karya sastra terbitan setahun sebelumnya) dan seorang tokoh bahasa/sastra. Penghargaan itu dirancang untuk mendorong para penerbit agar menggiatkan penerbitan sastra daerah.

Sebelum yayasan tersebut berdiri, penerbit milik Ajip Rosidi (Pustaka Jaya) telah berperan dalam penerbitan sastra Jawa. Ada beberapa pengarang Jawa yang karyanya bagus dan telah diterbitkan di sini, seperti novel *Tanpa Daksa* (1976) karya Sudarmo KD, *Tunggak-tunggak Jati* (1976) karya Esmiet, dan *Candhikala Kapuranta* (2002) karya Sugiarto Sriwibowo. Dari sudut pandang bobot atau kualitas, buku-buku tersebut memang bagus dan patut beredar di tengah pembacanya. Hal itu dibuktikan dengan diangkatnya *Candhikala Kapuranta* sebagai pemenang "Hadiah Sastra Rancage" pada tahun 2003.

"Yayasan Sastra Rancage" untuk penilaian buku terbaik, yayasan ini hanya bertumpu pada penerbitan, bukan pada produktivitas karya, dengan alasan untuk melihat perkembangan penerbitan. Dengan demikian, penilaian karya untuk penghargaan ini sangat tergantung kepada kreativitas dan hubungan pengarang dengan penerbit. Atau pula amat tergantung kepada dana yang dimiliki pengarang untuk mensubsidi penerbit. Hal itu yang menjadi kendala utama bagi pengarang dalam upaya penyebarluasan sastra.

BAB VI

KESIMPULAN

Dari pembicaraan tentang kepengayoman dalam sastra Jawa modern pada kurun waktu 1981-1997, yang menggunakan teori sosial untuk pendekatannya, dapat disimpulkan bahwa masalah kepengayoman dalam sastra Jawa masih sangat jarang diteliti, bahkan dapat dikatakan masih belum pernah dilakukan. Padahal, masalah itu amat penting, bukan saja bagi pengembangan ilmu sendiri. Pada umumnya, para peneliti sastra menafikkan faktor-faktor penting yang berada di luar karya sastra, padahal faktor-faktor itu amat mempengaruhi kehidupan sastra. Kehadiran sastra memang tidak hanya bertumpu pada faktor pengarang, tetapi juga bertumpu pada banyak faktor lainnya yang berada di sekitar sistem pengarang. Salah satu faktor penting tersebut adalah pengayom beserta sistem di dalamnya. Faktor tersebut hampir selalu penting bagi sastra Jawa, sepanjang kehidupannya, terutama setelah berakhirnya sistem kepujangaan kerajaan, yang secara implisit menggambarkan kepengayoman bagi pengarang.

Seperti pada periode-periode sebelumnya, sastra Jawa modern pada periode 1981-1997 juga tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan adanya pengayom bagi mereka. Ber-

dasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa pada periode 1981-1997 tampak kehadiran dua jenis pengayom, yaitu (1) pengayom dari lembaga-lembaga pemerintah, dan (2) pengayom dari lembaga-lembaga swasta. Yang dimaksud dengan lembaga-lembaga pemerintah ialah lembaga yang berada di bawah naungan pemerintah, baik pada rumusan kebijakan, administrasi, maupun keuangan.

Sepanjang periode 1981-1997 setidaknya ada tiga lembaga pengayom yang berada di bawah naungan pemerintah, yaitu (1) sekolah, (2) Pemda, (3) Taman Budaya, dan Dewan Kesenian (Dewan Kebudayaan). Kehadiran sekolah atau pendidikan formal sebagai pengayom sastra --terutama bagi sastra Jawa-- ternyata sangat kecil atau terbatas, walaupun sejumlah nama pengarang sastra Jawa adalah guru-guru: guru SD maupun SLTP, bahkan ada pula dosen. Posisi mata ajar sastra Jawa tetap menempel pada mata ajar bahasa Jawa, yaitu sebagai salah satu mata ajar tambahan dengan porsi yang jauh dari kurang. Dengan kata lain, sekolah tidak menganggap bahasa dan sastra daerah sebagai mata ajar yang penting bagi syarat kenaikan kelas siswa.

Karena posisi bahasa dan sastra Jawa (daerah) seperti itu, guru tidak dapat memaksakan kehendaknya dalam mendidik siswa agar mau mempelajari berbagai aspek bahasa dan sastra daerah. Dapat diibaratkan bahwa pengorbanan guru dalam mengajarkan mata ajar bahasa dan sastra daerah tidak akan berguna karena perhatian siswa terhadap mata ajar tersebut rendah. Selain faktor yang berkaitan dengan kurikulum tersebut, melemahnya niat guru memberikan mata ajar bahasa juga dimotivasi oleh rendahnya gaji guru sehingga waktu luang mereka lebih diarahkan untuk meningkatkan masukan keuangan, bukan untuk meningkatkan SDM demi

kualitas pengajaran bahasa dan sastra daerah. Kondisi tersebut sekaligus merupakan kendala dari posisi sekolah dalam kepengayoman sastra daerah --khususnya sastra Jawa-- walaupun bahasa dan sastra daerah ialah bekal dasar siswa untuk memahami kebudayaan daerahnya.

Bila sekolah mengalami kendala dalam kepengayoman sastra Jawa, ada beberapa buah lembaga pemerintah di lingkungan Depdikbud (Depdiknas) yang seharusnya mampu melakukan kepengayoman dan pembinaan kepada sastra daerah, seperti Pusat Bahasa, Dewan Kesenian (Dewan Kebudayaan), dan Taman Budaya. Pusat Bahasa ialah lembaga pemerintah yang salah satu tugasnya melakukan pembinaan dan pengembangan bahasa (dan sastra) Indonesia dan daerah. Adapun Taman Budaya dan Dewan Kesenian (Dewan Kebudayaan) ialah lembaga pemerintah yang juga bertugas memelihara dan mengembangkan kebudayaan di seluruh daerah di Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut, melalui cabangnya di daerah-daerah ternyata sangat potensial dalam memelihara dan mengembangkan sastra di daerahnya. Melalui dana yang mereka miliki --tergantung pada kucuran dana dari APBN-- mereka memberikan perhatian kepada sastra daerah --dalam hal ini adalah sastra Jawa-- dengan berbagai bentuk. Pusat Bahasa --melalui Balai Bahasa di daerah-daerah-- dahulu hanya Balai Bahasa Yogyakarta, tetapi kini ada Balai Bahasa Semarang/Jawa Tengah dan Balai Bahasa Surabaya/Jawa Timur bertugas melindungi sastra Jawa melalui penelitian karya-karya sastra, dan mengembangkannya melalui penyuluhan dan pembinaan. Kerja itu dilakukan secara berkelanjutan, dari tahun ke tahun, periode ke periode, dan selanjutnya menyusunnya ke dalam sejarah sastra Jawa. Balai Bahasa juga memberikan penghargaan kepada seniman

yang berhasil sebagai salah satu wujud pembinaan kreativitas, sekaligus kepengayoman kepada para pengarang Jawa. Selain itu, satu hal yang terpenting, yang telah dilakukan oleh Balai Bahasa adalah pembinaan langsung para pengarang dan pemerhati sastra Jawa melalui Bengkel Sastra dan Sanggar Sastra. Dua buah kelembagaan yang dilindungi Balai Bahasa Yogyakarta inilah yang secara menonjol membedakannya dari kepengayoman yang lain. Adapun Taman Budaya bersama Dewan Kesenian/Dewan Kebudayaan—memiliki peran kepengayoman yang tidak kalah penting melalui penyaluran dana pembinaan kepada grup-grup kesenian di wilayahnya masing-masing, termasuk kepada grup atau kelompok sastrawan Jawa, misalnya kepada SSJY. Taman Budaya juga berjasa dalam upayanya menyebarluaskan karya-karya pengarang Jawa, baik melalui lomba sastra maupun penerbitan antologi sastra. Akan tetapi, pada umumnya, lembaga-lembaga pemerintah amat ketat dengan birokrasi dan hal itu menyulitkan grup-grup kesenian untuk memohon bantuan.

Selain lembaga-lembaga di dalam jaringan pemerintah yang banyak birokrasi itu, sastra Jawa sebenarnya juga mempunyai pengayom dari lembaga swasta, dan beberapa yang menonjol adalah Lembaga Studi Jawa, Javanologi, dan Yayasan "*Rancage*". Javanologi adalah lembaga pemerintah yang berubah menjadi lembaga swasta sejak tahun 1983 karena kekecewaan para pengurusnya kepada kebijakan pemerintah. Yayasan yang berlokasi di Yogyakarta itu menghimpun dana dengan mengadakan bermacam kegiatan kultural sambil bekerja sama dengan lembaga pemerintah yang terkait, misalnya Balai Kajian Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisio-

nal. Sayang sekali, lembaga swasta tersebut membatasi diri kepengayomannya kepada jenis-jenis sastra klasik.

Seperti halnya Javanologi, Lembaga Studi Jawa juga menjadi pengayom sastra Jawa. Akan tetapi, agak berbeda dari Javanologi, Lembaga Studi Jawa sedikit memberi perhatian kepada jenis sastra modern, yang diwujudkan melalui penerbitan antologi *geguritan* karya Jaimin K. yang berjudul *Siter Gading* (1996). Adapun lembaga swasta yang paling nyata memberikan kepengayoman kepada sastra daerah --termasuk di dalamnya kepada sastra Jawa-- adalah sebuah yayasan milik sastrawan dan budayawan Sunda, Ajip Rosidi. Yayasannya itu bernama "Yayasan *Rancage*", yang sudah mulai bekerja sejak tahun 1989 dengan memberikan penghargaan sastra kepada pengarang sastra Sunda. Sejak tahun 1994 yayasan tersebut menunjukkan perlindungan atau pengayoman yang amat besar kepada sastra-sastra daerah dengan meluaskan jangkauan kepengayoman kepada sastra Jawa, yang selanjutnya sejak tahun 1999 meluaskan jangkauan kepada sastrawan Bali.

Landasan kerja kepengayoman yayasan itu adalah pemberian penghargaan kepada sastrawan daerah yang dedikasinya tinggi untuk memberi arti kepada kehidupan sastra daerah. Dengan kehadiran tokoh tersebut sastra daerah menjadi maju dan bermakna. Para pengarang yang diperhatikan adalah yang mampu menerbitkan karya-karya mutakhir yang berkualitas, baik untuk jenis sastra anak-anak ("Hadiah Samsudi"), atau juga jenis sastra dewasa ("Hadiah *Rancage*"). Selain itu, "Hadiah *Rancage*" juga diberikan kepada tokoh/ lembaga/pengarang yang dinilai berjasa dalam memelihara dan mendorong kehidupan sastra di daerahnya.

Bila lembaga-lembaga pemerintah mempunyai kendala pada birokrasi yang rumit dan sedikitnya akumulasi dana untuk bantuan, pada lembaga pengayom swasta tidak ada. Akan tetapi, sebagai gantinya, adalah perlunya hubungan baik antara calon penerima bantuan dan pengelola bantuan. Oleh karena itu, seksi lembaga-lembaga swasta itu seringkali mengalami kerugian atau defisit karena jumlah rekanan calon penerima bantuan jauh lebih besar daripada jumlah alokasi dana. Jenis-jenis kepengayoman yang dilakukan para pengayom itu, pada hakikatnya, amat tergantung kepada tujuan kepengayoman, keuntungan yang akan diperoleh, dan jumlah dana. Jadi, pada hakikatnya, tidak semua lembaga --baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta-- yang memiliki tugas kepengayoman kepada budaya daerah mampu menjadi pengayom sastra Jawa. Hal itu disebabkan tidak selalu adanya kesadaran dan perhatian yang memadai dari pimpinan atau juga SDM di dalam lembaga-lembaga tersebut. Sistem birokrasi yang rumit dan melelahkan dalam proses permohonan dan penyaluran dana kepada calon lembaga kesenian daerah (misalnya sastra Jawa) telah menyebabkan aliran dana tidak selalu sampai baik dan utuh kepada lembaga kesenian yang membutuhkan. Di samping itu, kepengayoman dari lembaga-lembaga pemerintah juga amat tergantung dari alokasi dana yang disediakan pemerintah. Besar atau kecilnya dana itu amat tergantung pada keadaan keuangan negara dan perhatian pemerintah kepada kebudayaan daerah.

Jadi, simpulan dari benang-benang merah yang muncul di sepanjang penelitian tentang kepengayoman dalam sastra Jawa periode 1981-1997 itu adalah sebagai berikut. Pertama, kepengayoman kepada sastra Jawa --sebagai bagian

dari sastra daerah yang harus dilindungi pemerintah-- itu harus ada, dan memang ada pada sejumlah lembaga, baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta. Kedua, sastra daerah seringkali terpinggirkan dari perhatian para penyusun kurikulum --karena berbagai alasan dari faktor eksternal, misalnya kurikulum yang berubah-ubah-- yang berdampak kepada berbagai kebijakan dalam proses belajar-mengajar sastra daerah. Ketiga, birokrasi dalam struktur pemerintahan yang sangat rumit seringkali memberi kesan berbelit-belit, atau mempersulit proses kerja bagi calon penerima bantuan. Proses berbelit-belit itu hampir tidak ditemui dalam lembaga-lembaga swasta, tetapi sebagai penggantinya adalah sulitnya kepengayoman diberikan bila tidak menunjukkan adanya kedekatan hubungan calon penerima bantuan dengan pihak lembaga pemberi dana atau kepengayoman. Itu semua merupakan kendala yang sangat mengikat bagi kelancaran proses pengayoman yang tulus. Para pengayom, baik dari pemerintah maupun swasta, pada akhirnya, bukan lagi menjadi pengayom yang tulus dan memperhatikan kepada seni sastra daerah, tetapi menjadi kepengayoman yang memberati penerima dana karena sarat dengan syarat. Yang perlu dicatat pula adalah sangat sedikitnya kepengayoman perorangan, seperti *Maesenas*. Hanya seorang Ajip Rosidi, yang selanjutnya dengan "*Yayasan Rancage*"-nya saja yang berani tampil berbeda. Ia merupakan pengayom perorangan yang tulus memperhatikan perkembangan sastra daerah yang lamban akibat tidak adanya perhatian pemerintah. Padahal, kewajiban pemerintah ialah melindungi dan mengembangkan sastra daerah, yang kedudukannya sebagai bagian dari kebudayaan daerah. Akan tetapi, pengayom perorangan seperti Ajip Rosidi itu memang untuk saku Indonesia sulit dilakukan

karena berbagai hal yang amat individual. Itulah sebabnya, Ajip Rosidi mengganti kepengayoman pribadinya menjadi sebuah yayasan agar menjadi wadah bagi para dermawan yang peduli kepada sastra daerah, walaupun modal terbesar pertama ialah dari sakunya. Yayasan "*Rancage*" itu hingga kini memberikan penghargaan kepada terbitan karya sastra terbaik dari yang berbahasa Sunda, Jawa, dan Bali yang terbit pada setahun sebelumnya. Selain itu, yayasan ini juga memberikan hadiah penghargaan kepada lembaga, atau perorangan yang dinilai berjasa dalam memajukan sastra Jawa. Perhatian kepada sastra daerah secara bersinambungan seperti itu amat diperlukan agar perkembangan sastra daerah dapat digairahkan melalui penerbitan.

Akhirnya, apa pun bentuk kepengayoman dari setiap lembaga atau perorangan, harus disadari bahwa kepengayoman terhadap sastra daerah --terutama dalam hal ini adalah sastra Jawa-- tetap diperlukan demi pelestarian dan perkembangan sastra Jawa sebagai salah satu sastra daerah yang hingga saat ini masih ditulis dan dibaca. Tugas kepengayoman tersebut juga tidak selalu harus dibebankan kepada pemerintah, tetapi juga menjadi tugas seluruh masyarakat (dalam hal ini masyarakat di daerah) dan lembaga-lembaga swasta yang merasa terpenggil di bidang kepengayoman ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Damono, Sapardi Djoko. 1978. *Pengantar Teori Sosiologi Sastra*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. 1976. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Echols, John M. and Hassan Shadily. 1980. *Kamus Inggris-Indonesia*. Itacha, New York, Jakarta: Gramedia.
- Encyclopedia Americana Vol. 16*. 1991. Dunbury. Connecticut: Grolier Inc.
- Hornby, AS. 1977. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English (New Edition)*. Oxford: Oxford University Press.
- Hutomo, Suripan Sadi. 1975. *Telaah Sastra Jawa Modern*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Kayam, Umar. 1981. *Seni, Tradisi, Masyarakat*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Laurencon, Diana and Swingewood. 1972. *The Sociology of Literature*. London: Paladin.
- Moeliono, Anton M. (Ed.). 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Morris, William. 1988. *The Grolier International Dictionary*. Dunbury: Massachusett.

06-0192

- Ricklefs, M.H. 1991. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Salim, Peter Drs. 1987. Third Edition. *The Contemporary English-Indonesian Dictionary*. Jakarta: Jakarta Modern English Press.
- Shipley, Yoseph T. 1962. *Dictionary of World Literature*. Paterson, New Jersey: Little-field, Adams & Co.
- Sudewa. A. 1989. *Serat Panitisastra*. Yogyakarta: Duta Wacana Press.
- Tanaka, Ronald. 1976. *System Models for Literary Macro-Theory*. Lisse: The Petter de Ridder Press.

